



Penjual Canang di Pasar Badung

I Wayan Budiarta Aryawan-Branch Support Bali Nusra
Finalis-Lomba Foto Pasar Tradisional



Tata Kelola Perusahaan



Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan



Danamon menempatkan tata kelola perusahaan sebagai landasan dalam pencapaian nilai-nilai ekonomi dalam jangka panjang bagi kepentingan pemegang saham, para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan tata kelola perusahaan berstandar tinggi akan menjadikan Danamon sebagai Bank yang sehat secara fundamental dan berkesinambungan, mampu mengelola tantangan serta memiliki daya saing yang tinggi.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) membuat Danamon dapat melewati tahun penuh tantangan dengan kinerja keuangan dan non-keuangan yang positif. Untuk itu, Danamon berkomitmen untuk terus menguatkan pelaksanaan GCG sesuai dengan standar tata kelola ASEAN dan Internasional, sehingga Danamon dapat tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan memiliki daya saing yang tinggi serta menjadi lembaga keuangan Indonesia yang diakui baik di tingkat nasional dan komunitas ekonomi ASEAN.

Danamon memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkannya didukung dengan adanya:

- Visi, Misi dan Tata Nilai Danamon yang jelas dan realistis yang dikaji dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
- Pedoman GCG Danamon sebagai acuan pelaksanaan GCG;
- Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite;
- Penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas bagi organ Danamon;
- Penetapan standar etika dan perilaku yang dilaksanakan secara konsisten dan menjadi budaya Danamon;
- Sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi audit internal dan eksternal serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dari unit-unit bisnis dan operasional;
- Penerapan mekanisme *checks and balances* yang proporsional;
- Pedoman transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi afiliasi dan pihak terkait;
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam upaya menjamin kepastian hak dan kewajiban Danamon dan karyawan untuk mendukung suasana kerja yang kondusif;
- *Whistle Blowing system* sebagai sarana untuk diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan *stakeholder* lainnya;
- Program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang jelas dan dapat dilaksanakan.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam dunia perbankan penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan akan tetapi merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi keberlanjutan perusahaan. Pelaksanaan GCG yang berstandar tinggi dan konsisten memacu kinerja Danamon, meningkatkan kepercayaan investor, melindungi kepentingan *stakeholder* serta memberikan kontribusi yang positif terhadap industri keuangan dan perekonomian nasional.

Penerapan GCG di Danamon juga bertujuan untuk mengoptimalkan nilai Danamon bagi para pemangku kepentingan, menjamin hak-hak dan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, serta menjaga profesionalisme dalam pengelolaan Bank. Untuk itu, Danamon akan terus berupaya memperkuat pelaksanaan praktik-praktik GCG di seluruh aspek kegiatan usahanya.

Tata Kelola Perusahaan

ROADMAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penguatan penerapan GCG dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses dari waktu ke waktu. Berikut *Roadmap* GCG Danamon dari tahun 2006 sampai dengan 2015:

2006-2008

- Menerbitkan buku manual GCG dan Pedoman Perilaku
- Pengangkatan Komisaris Independen dan menempatkan Komisaris Independen sebagai ketua di komite-komite di bawah Dewan Komisaris
- Menyediakan saluran rahasia bagi seluruh karyawan dan/atau pemasok untuk melaporkan kecurigaan/terjadinya penipuan, korupsi dan/atau pelanggaran atas Pedoman Perilaku;
- Menerapkan kebijakan investasi, kebijakan transaksi pihak terkait dan kebijakan penanganan informasi rahasia milik Danamon;
- Memisahkan Komite Risiko dan Audit menjadi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko ternasuk Pedoman dan Tata tertib Komite;
- Membentuk Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite *Corporate Governance*.
- Memperluas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada anak perusahaan, PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. PT Asuransi Adira Dinamika, dan PT Adira Quantum Multifinance. Pelaksanaan fungsi kepatuhan di anak perusahaan dipantau melalui forum pemantauan bulanan;
- Menyempurnakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Corporate Governance*.

2009-2011

- Menyempurnakan modul e-Learning-Compliance untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan karyawan
- Menyempurnakan dan memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
- Membentuk Komite Kepatuhan
- Mengkinikan Kebijakan APU/ PPT.
- Menguatkan pengelolaan risiko kepatuhan melalui *Compliance Regulatory Self Assessment (CRSA)*.
- Menyempurnakan dan mengkinikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
- Menyempurnakan Kebijakan *Whistle Blower*
- Mengembangkan *Risk Appetite Statement*
- Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan GCG perusahaan anak.

2012-2013

- Menyempurnakan kebijakan dan pelaksanaan GCG pada anak perusahaan
- Mendelegasikan fungsi dan peranan *Operational Risk Management* di level Unit Bisnis dan Unit Pendukung
- Mengimplementasikan *Compliance Regulatory Self Assessment (CRSA)* melalui sistem
- Menyempurnakan E-Learning *Compliance & UKPN*
- Membentuk Komite ORM di bawah Direksi
- Menganalisis implementasi GCG Danamon terhadap ASEAN CG Scorecard
- *Sustainability report* mengikuti standart Global *Reporting Initiative (GRI)*
- Menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penilaian pelaksanaan GCG
- Menyelaraskan GCG Danamon dengan ASEAN CG Scorecard.

2014

- Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik pelaksanaan *good corporate governance* dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku utamanya dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia.
- Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik pelaksanaan *good corporate governance* dengan ASEAN CG Scorecard.
- Memfasilitasi semua anggota Dewan Komisaris dengan pelatihan *risk management refreshment course*
- Memecah Komite Nominasi & Remunerasi menjadi dua komite, yaitu Komite Nominasi dan Komite Remunerasi
- Mengacu kepada peraturan yang berlaku, menyesuaikan struktur keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, Komite Nominasi
- Menyempurnakan dan memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi, Komite Remunerasi, dan Komite *Corporate Governance*
- Menerbitkan penyempurnaan kebijakan yang mengatur pelaksanaan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan
- Dalam rangka meningkatkan kinerja Direksi, menyempurnakan dan memperbarui kebijakan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

2015

- Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal yang Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Menerapkan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

FOKUS TATA KELOLA DANAMON TAHUN 2014

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi dunia perbankan. Danamon dituntut untuk dapat mengelola tantangan dan berkembang dengan tetap menjalankan bisnis perbankan yang sehat, permodalan dan pengelolaan risiko yang kuat serta berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang konsisten dan berkelanjutan.

Visi, Misi dan Tata Nilai Danamon

Langkah-langkah strategis Danamon disusun berdasarkan visi, misi dan tata nilai Danamon yang senantiasa dievaluasi secara berkala. Visi dan Misi Danamon, “Kami peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan” serta menjadi “Lembaga Keuangan Terkemuka di Indonesia” merupakan komitmen Danamon untuk terus mengembangkan layanan perbankan yang berkualitas yang melayani semua segmen dan didukung dengan keunggulan pelayanan serta teknologi. Langkah strategis dan rencana bisnis bank disusun sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan visi dan misi dan tata nilai Danamon.

ASEAN CG Scorecard dan OJK Roadmap

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola, Danamon telah melakukan penyesuaian praktik Tata Kelola sejalan dengan standar ASEAN CG Scorecard dan OJK roadmap. Beberapa penyempurnaan yang telah dilakukan selama tahun 2014 antara lain penyempurnaan mekanisme dalam proses pengumuman dan pemanggilan RUPS, mekanisme *closed voting*, penambahan Komisaris Independen pada komposisi komite Dewan Komisaris, penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris, Pemisahan Komite Nominasi dan Remunerasi, serta penyempurnaan kebijakan Pihak-Pihak Terafiliasi.

Tata Kelola dan Pengelolaan Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan tata kelola dan pengelolaan risiko terintegrasi antara Danamon dan anak perusahaan secara umum telah diterapkan melalui proses penyesuaian kebijakan anak perusahaan terhadap proses pelaksanaan tata kelola dan pengelolaan risiko di Danamon sebagai bagian pelaksanaan *group* konsolidasi. Danamon secara berkala melakukan pemantauan dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan tata kelola, pengelolaan risiko dan pengelolaan keuangan secara konsolidasi antara Danamon dan Anak Perusahaan termasuk pelaksanaan fungsi audit dan kepatuhan oleh SKAI dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2014 mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan serta Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Danamon telah melakukan kajian dan perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan terhadap struktur dan infrastruktur terintegrasi antara lain keanggotaan dan tugas komite, kebijakan terintegrasi dan kebijakan transaksi *intra group*.

Peningkatan Aspek Transparansi

Dalam upaya peningkatan aspek transparansi telah dilakukan penyempurnaan dalam pengungkapan pelaksanaan RUPS mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS, informasi rinci terkait tata tertib, mata acara atau agenda RUPS termasuk penjelasan dari masing-masing agenda, pengungkapan profil kandidat Dewan Komisaris/Direksi bersamaan pada saat pemanggilan RUPS, pelaksanaan *closed voting*, serta penyempurnaan-penyempurnaan transparansi informasi pada *website* Danamon (www.danamon.co.id).

Tata Kelola Perusahaan

Peningkatan Perlindungan Konsumen

Sejalan dengan komitmen Danamon untuk terus menciptakan sistem perlindungan konsumen yang handal serta meningkatkan pemberdayaan konsumen, Danamon telah menyempurnakan kebijakan, prosedur, dokumen dan infrastruktur terkait layanan nasabah. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yaitu transparansi produk dan layanan, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, keandalan sistem dan sumber daya manusia, keamanan dan kerahasiaan data konsumen serta pelayanan atau penyelesaian pengaduan dan sengketa.

Literasi Keuangan

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap strategi nasional literasi keuangan guna menuju masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi tentang keuangan. Danamon melaksanakan kegiatan literasi keuangan bersamaan dengan kegiatan temu nasabah dan calon nasabah secara rutin yang diselenggarakan oleh masing-masing unit bisnis setiap tahun dengan pengalokasian waktu khusus melalui penyampaian materi edukasi perbankan di setiap pertemuan. Selama tahun 2014, jumlah peserta yang tereduksi dari kegiatan literasi keuangan sebanyak 350.107 orang dengan kelompok peserta ibu-ibu rumah tangga, pengusaha mikro dan UKM, pelajar/mahasiswa, pekerja pemula, pasangan muda dan komunitas pasar yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Danamon juga menyediakan informasi edukasi melalui situs *web* Danamon dan akun media sosial.

AML *Champion* dan Implementasi FATCA

Sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) telah menunjuk *AML Champion* untuk memastikan penerapan program APU dan PPT di kantor cabang yang memiliki kompleksitas usaha tinggi.

Sehubungan dengan implementasi *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), Danamon telah melakukan registrasi FATCA, mendapatkan *Global Intermediary Identification Number* (GIIN) *number*, implementasi proses identifikasi dan *due diligence* nasabah perorangan yang teridentifikasi sebagai US (United State) *indicia*. Bersamaan dengan itu, proses tersebut juga akan diimplementasikan untuk nasabah non-perorangan dan diharapkan selesai pada awal tahun 2015.

Peningkatan Pengelolaan Risiko

Memperkuat pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari strategi Danamon dalam meminimalisasi potensi kerugian. Dalam rangka memperkuat pengelolaan risiko kredit, selama tahun 2014 telah dilakukan validasi ulang *risk rating* model terhadap nasabah kredit korporasi dan komersial sebagai dasar penetapan *Obligor Risk Rating* dan *Credit Pricing*. Selain itu, *risk rating* model disiapkan bilamana Danamon akan menerapkan model *Internal Ratings Based Approach* (IRB) dalam menghitung bobot risiko aktiva kredit.

Dalam rangka persiapan penerapan Basel II/III, Danamon berpartisipasi aktif dengan melakukan *credit risk stress test* secara *bankwide* dan bersama 14 bank juga melakukan *stress test* dari OJK.

Dalam pengelolaan risiko operasional, Danamon melakukan transformasi pendekatan pengelolaan risiko operasional menjadi berbasis risiko. Pendekatan ini dilakukan melalui perubahan *tools Risk Loss Event database*, *Risk Control Self Assessment (RCSA)* dan *Key Risk Indicators (KRI)* baik bagi Danamon maupun anak perusahaan.

Inisiatif Keberlanjutan (*Sustainability*)

Fokus keberlanjutan Danamon di tahun 2014 tetap pada pemberdayaan komunitas sekitar operasional Danamon melalui program revitalisasi pasar rakyat yang dilaksanakan oleh Yayasan Danamon Peduli. Selain itu, Danamon terus melakukan inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang memadukan kegiatan operasionalnya seperti inisiatif penghematan penggunaan listrik dan kertas.

KEBIJAKAN, STRUKTUR & PELAKSANAAN TATA KELOLA DANAMON

Kebijakan atau Pedoman Tata Kelola Danamon

Danamon telah merumuskan kebijakan atau pedoman Tata Kelola sejak tahun 2006 yang menjadi acuan penerapan Tata Kelola di seluruh tingkatan organisasi Danamon. Pedoman Tata Kelola Danamon disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. **Transparansi:** Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

2. **Akuntabilitas:** Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi. Danamon sebagai lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.

3. **Responsibilitas:** Danamon berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan. Selain itu, Danamon juga mewujudkan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, untuk mencapai kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

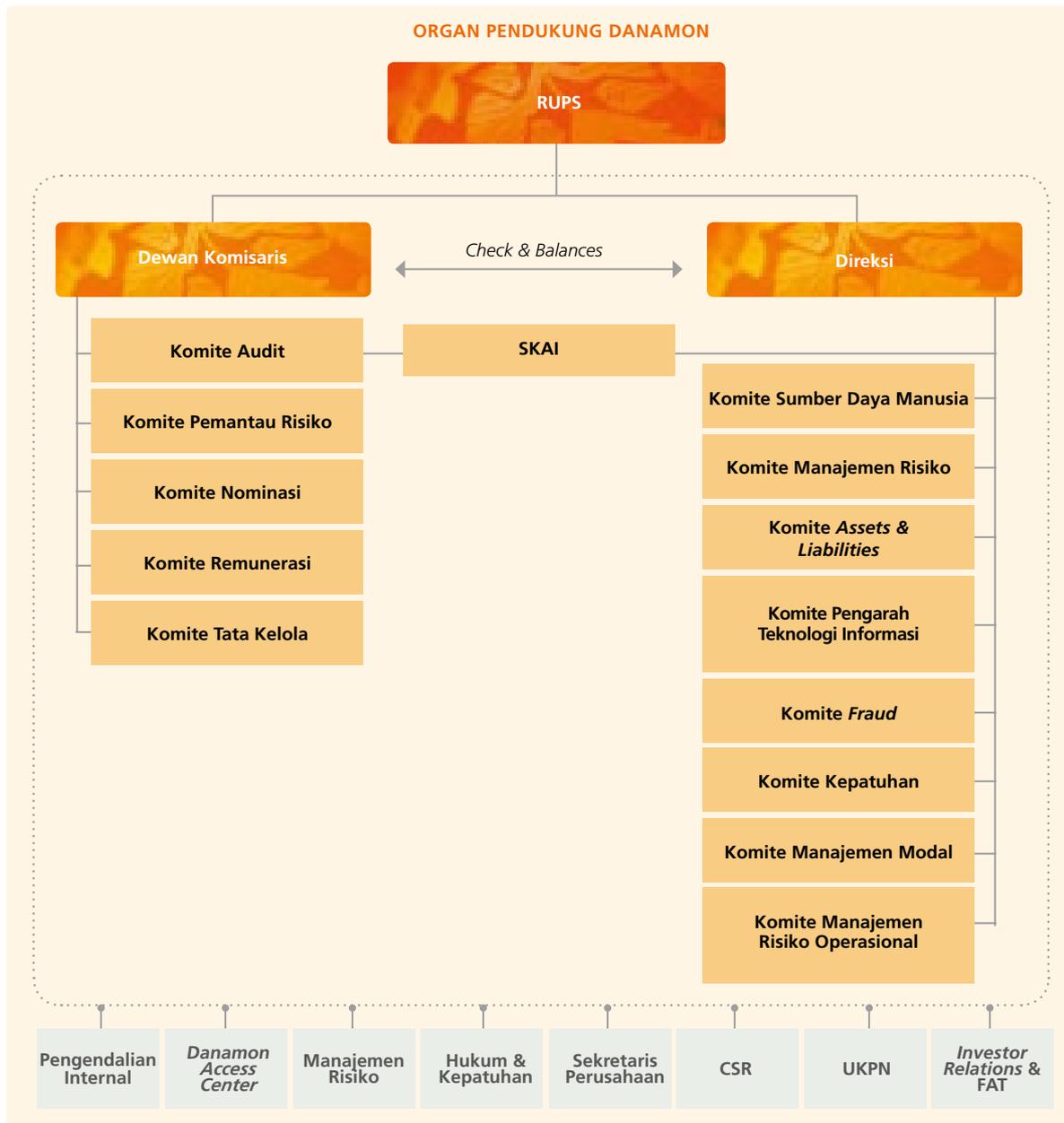
4. **Independensi:** Organ-organ perusahaan Danamon menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Danamon berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

5. **Kewajaran dan kesetaraan:** Danamon senantiasa memastikan agar hak serta kepentingan semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terpenuhi. Danamon juga selalu memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola Danamon

Struktur tata kelola Danamon dibangun untuk menjamin pelaksanaan tata kelola Danamon berjalan sistematis, organ-organ dalam struktur tata kelola memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga dapat mendukung terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik.



Pelaksanaan Tata Kelola Danamon

Tata kelola Danamon dilakukan dalam suatu rangkaian yang terintegrasi meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola yaitu *structure*, *process* dan *outcome* yang menjamin kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola, efektivitas proses pelaksanaan dan kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholder*.

Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi struktur Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite Danamon memadai dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia; • Selain komite-komite yang wajib dibentuk sesuai persyaratan regulasi, Danamon memiliki <i>Komite Corporate Governance</i>, Komite Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko Operasional dan Komite Manajemen Modal yang menjadi bagian dalam penguatan struktur GCG Danamon; • Tugas pokok, tanggung jawab, dan fungsi organ-organ Danamon memadai dan ditetapkan dalam Kebijakan, Pedoman dan Tata Tertib. Kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Danamon tersedia dan mendukung kegiatan operasional Danamon; • Kerangka manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal, fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal yang memadai dengan penugasan audit ekstern yang sesuai persyaratan; • Ketersediaan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait/penyediaan dana besar, benturan kepentingan dan aspek transparansi; • Rencana strategis dan bisnis sejalan dengan visi dan misi Danamon 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ-organ Danamon memadai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian; • Proses penggantian dan pengangkatan Komisaris, Direksi dan Komite; • Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; • Pengungkapan transaksi afiliasi, benturan kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui surat pernyataan; • Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui proses persetujuan kredit secara normal dan <i>arms length</i>; • Manajemen risiko telah diterapkan dengan baik sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat dikelola; • Mentransparasikan informasi keuangan, non keuangan, produk Bank, pengaduan nasabah secara lengkap, akurat dan proporsional; • Penyusunan rencana strategis dan bisnis dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur yang disetujui Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Danamon positif yang mencakup rentabilitas, efisiensi dan permodalan; • Kegiatan Bank bebas dari intervensi pemilik dan pihak terkait lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; • Transparansi pelaksanaan GCG Danamon, kondisi keuangan dan non keuangan yang didukung dengan <i>website</i> Danamon yang informatif dan mudah diakses oleh <i>stakeholders</i>; • Kepatuhan dan pengelolaan risiko yang memadai serta tindak lanjut hasil audit; • Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dan memberi manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi <i>stakeholder</i>.

Tata Kelola Perusahaan

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DANAMON

Penyusunan laporan Tata Kelola Danamon merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang dilakukan Danamon sepanjang tahun 2014. Penyusunan laporan ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ASEAN CG Scorecard dan *Best Practices* pelaksanaan tata kelola yang berlaku secara universal.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham merupakan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang saham Danamon. Saham-saham Danamon adalah saham atas nama yang terdiri dari saham seri A dan seri B. Jumlah saham seri A yang diterbitkan sebanyak 22.400.000 dan jumlah saham seri B adalah 9.562.243.365 dengan total jumlah saham adalah 9.584.643.365.

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B memiliki hak dan kewajiban yang setara dan tidak membagi saham ke dalam saham jenis istimewa ataupun biasa. Hak dan kewajiban secara rinci diatur dalam Anggaran Dasar Danamon yang dapat diakses melalui situs *web* Danamon (www.danamon.co.id).

Struktur Pemegang Saham

Pemegang Saham Danamon per tanggal 31 Desember 2014 diungkapkan sesuai struktur sebagai berikut:



Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2014

Nama		Persentase	Lembar Saham
Asia Financial (Indonesia) Pte, Ltd.		67,37%	6.457.558.472
JPMCB-Franklin Templeton Investment Funds		6,79%	650.279.488
Publik	Saham Seri A: 22.400.000	0,23%	2.476.805.405
	Saham Seri B: 2.454.405.405	25,61%	
Total		100%	9.584.643.365

Informasi Pemegang Saham Utama atau Pengendali

Pemegang Saham Utama atau Pengendali Danamon adalah Asia Financial (Indonesia) Private Ltd (“AFI”). AFI merupakan sebuah badan hukum Singapura, didirikan pada 10 November 1990 dengan nama ENV Corporation (Private) Limited dan memiliki usaha di bidang investment holding.

Pemegang saham Pengendali Akhir Danamon adalah Temasek Holdings Private Limited (“Temasek”), melalui Fullerton Management Private Limited dan Fullerton Financial Holdings Private Limited. Temasek merupakan sebuah perusahaan investasi yang berkedudukan di Singapura dan dimiliki oleh Kementerian Keuangan Singapura.

Informasi para pemegang saham di atas 5 % per 31 Desember 2014

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)
Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd.	6.457.558.472	67,37	500	3.228.779.236.000
JPMCB-Franklin Templeton Investment Funds	650.279.488	6,79	500	325.139.744.000

20 Pemegang Saham Terbesar per 31 Desember 2014

No.	Nama Investor	Kepemilikan	Persentase
1	Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd	6.457.558.472	67,37%
2	JPMCB-Franklin Templeton Investment Funds	650.279.488	6,79%
3	Citibank Singapore S/A CBSG-Aranda Inv Pte Ltd	392.822.398	4,10%
4	JPMCB-Stichting Depositary APG EME MRKT EQ Pool	135.842.700	1,42%
5	JPMCB-Templeton Emerging Market Investment Trust Plc	134.932.433	1,41%
6	Singapex Investment Pte Ltd	130.414.740	1,36%
7	PT Guna Dharma	95.846.434	1,00%
8	BBH Boston S/A Vangrd EMG MKTS STK INFD	60.919.524	0,64%
9	GIC S/A Government Of Singapore	54.708.218	0,57%
10	BNYM SA/NV AS Cust Of Employees Provident Fund	51.656.546	0,54%
11	Citibank New York S/A Dimensional Emerging Markets Value Fund	36.234.654	0,38%
12	SSB OBIH S/A Ishares MSCI Emerging Markets ETF	33.193.916	0,35%
13	SSB HJT3 S/A HKJC Equity Trust Fund	32.446.000	0,34%
14	JPMCB-PFA KAPITALFORENING	26.808.900	0,28%
15	RBC IST S/A Canada Post Corporation Pension Plan	26.304.085	0,27%

Tata Kelola Perusahaan

20 Pemegang Saham Terbesar per 31 Desember 2014

No.	Nama Investor	Kepemilikan	Persentase
16	SSB 1BA9 ACF MSCI Equity Index Fund B-Indonesia	25.461.489	0,27%
17	Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Dinamis	23.527.000	0,25%
18	Reksa Dana Kharisma Flexi Terbatas 3	22.619.000	0,24%
19	JPMCB-Templeton Asian Growth Fund	22.214.100	0,23%
20	Interventures Capital Pte. Ltd.	21.688.300	0,23%

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan yang eksklusif yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam RUPS, para pemegang saham dapat menggunakan haknya dan memberikan suaranya sesuai Anggaran Dasar. RUPS juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan, menunjuk Auditor Eksternal, serta menentukan jumlah kompensasi/remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014 (RUPS Tahunan)

Penyelenggaraan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan Danamon diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2014 bertempat di Hotel JW Marriot, Jakarta Selatan. RUPS dilakukan di lokasi yang mudah diakses oleh pemegang saham dan di tempat kedudukan/kantor Pusat Danamon. Materi dan agenda RUPS Tahunan termasuk penjelasan dan dasar pertimbangan atas setiap agenda serta profil kandidat masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diungkapkan pada situs *web* Danamon pada 15 April 2014 bersamaan dengan tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. Salinan dan dokumen fisik atas materi dan agenda RUPS Tahunan tersedia di Kantor Danamon.

Pengumuman rencana RUPS Tahunan disampaikan pada tanggal 28 Maret 2014 atau 16 hari sebelum Pemanggilan RUPS tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS disampaikan pada tanggal 15 April 2014 atau 21 hari sebelum penyelenggaraan RUPS tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan melalui 3 (tiga) media surat kabar baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris serta melalui situs *web* Bursa Efek dan situs *web* Danamon.

Pengumuman RUPS memuat tanggal pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS, dan ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dan berhak mengusulkan agenda rapat. Pemanggilan RUPS memuat tanggal, tempat, waktu, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dan agenda RUPS. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Danamon untuk memenuhi hak pemegang saham dalam memperoleh informasi terkait RUPS sedini mungkin.

RUPS Tahunan Danamon dibuka oleh Ng Kee Choe sebagai Komisaris Utama, dan selanjutnya pelaksanaan RUPS Tahunan dipimpin oleh J.B. Kristiadi sebagai Wakil Komisaris Utama Danamon. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Danamon Pasal 23 ayat 1 dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. No.KSR-Kom.Corp.Sec.004 tanggal 4 Maret 2014.

Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Penyampaian Hasil RUPS Tahunan

Pemberitahuan Kepada Regulator	Pengumuman Rencana RUPS	Tanggal Pencatatan	Pemanggilan	Hasil RUPS	
				Laporan ke Regulator	Publikasi
<ul style="list-style-type: none"> Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta Bursa Efek Indonesia (melalui <i>E-Reporting</i>) tanggal 20 Maret 2014 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan Jakarta Post tanggal 28 Maret 2014 <i>E-Reporting</i> Bursa Efek Indonesia tanggal 28 Maret 2014 <i>website</i>: www.danamon.co.id 	14 April 2014	<ul style="list-style-type: none"> Surat kabar Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan Jakarta Post tanggal 15 April 2014 <i>E-Reporting</i> Bursa Efek Indonesia tanggal 15 April 2014 <i>website</i>: www.danamon.co.id 	<ul style="list-style-type: none"> Surat laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tanggal 09 Mei 2014 Bursa Efek Indonesia (melalui <i>E-Reporting</i>) tanggal 09 Mei 2014 	<ul style="list-style-type: none"> Surat kabar Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan Jakarta Post tanggal 08 Mei 2014 <i>website</i>: www.danamon.co.id

Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah

Pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Danamon per tanggal 14 April 2014, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS. RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang diwakili sejumlah saham 8.702.145.895 atau ±90,79% dari sejumlah saham 9.584.643.365 yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham. Lebih dari 50% atau ½ bagian dari jumlah seluruh saham telah hadir dan telah memenuhi persyaratan kuorum RUPS Tahunan.

RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris, perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS Tahunan

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs *web* Danamon dan dibacakan oleh pimpinan rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat.

Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pada RUPS Tahunan tersebut Danamon telah menunjuk P. Soetrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik dan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.

Tata Kelola Perusahaan

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUN 2014

RUPS tahun 2014 telah memutuskan 5 agenda rapat yang diusulkan melalui mekanisme *voting*, seluruh keputusan rapat telah direalisasikan tahun 2014, sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Agenda, Keputusan, Perhitungan Suara dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan

Agenda dan Keputusan

Agenda Pertama

Total Suara Setuju: 8.696.335.084 saham atau 99,933%

Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 5.810.811 saham atau 0,067%

1. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013;
2. mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 5 Februari 2014, Nomor RPC-4764/PSS/2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013.

Agenda Kedua

Total Suara Setuju: 8.701.793.911 saham atau 99,996%

Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 351.984 saham atau 0,004%

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 sebesar Rp4.041.684.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp40.416.840.000 disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. 30% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.212.505.200.000 atau sebesar Rp126,50 per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2013, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");
 - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2013 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
 - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2013, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
 - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2013; dan
 - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2013, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2013 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda Ketiga

Total Suara Setuju: 8.603.299.515 saham atau 98,864%

Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 1.307.974 saham atau 0,015%

Menunjuk Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 sesuai dengan Memo Rekomendasi dari Komite Audit No.B.01-KA tanggal 24 Maret 2014.

	Tabel Perhitungan Jumlah Suara			Realisasi
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	
	6.308.800 saham atau 0,072%	nihil	8.690.026.284 saham atau 99,861%	Telah direalisasikan
	4.600.800 saham atau 0,053%	nihil	8.697.193.111 saham atau 99,943%	<p>Penyisihan Dana cadangan untuk tahun buku 2013 telah dibukukan.</p> <p>Pembagian dividen untuk tahun buku 2013 telah dilakukan pada tanggal 18 Juni 2014, berdasarkan pengumuman Perseroan yang disampaikan melalui IDX E-Reporting tanggal 8 Mei 2014 dan publikasi pada surat kabar Media Indonesia, Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 8 Mei 2014 dan dengan Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) pada tanggal 4 Juni 2014.</p> <p>Laba Ditahan untuk tahun buku 2013 telah dibukukan.</p>
	6.307.571 saham atau 0,072%	97.538.406 saham atau 1,121%	8.596.991.944 saham atau 98,792%	Berdasarkan Memo Rekomendasi Komite Audit No.B.001.-KA tanggal 24 Maret 2014, Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2014

Tata Kelola Perusahaan

Agenda dan Keputusan

Agenda Keempat

Total Suara Setuju: 8.132.697.512 saham atau 93,456%

Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 1.526.581 saham atau 0,018%

1. a. menerima baik pengunduran diri bapak Ali Rukmijah (Ali Yong) selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 07-03-2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut;
- b. menyetujui untuk tidak mengangkat kembali bapak Milan Robert Shuster, bapak Harry Arief Soepardi Sukadis, dan bapak Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy selaku Komisaris-komisaris Perseroan karena telah berakhirnya masa jabatan mereka efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat jabatan tersebut;
- c. menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan dan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- d. menyetujui pengangkatan-pengangkatan:
 - 1) Andriaan Laoh selaku Komisaris (Independen) Perseroan; dan
 - 2) Made Sukada selaku Komisaris (Independen) Perseroan;

efektif sejak lulus uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Henry Ho Hon Cheong
Direktur	: Muliadi Rahardja
Direktur	: Vera Eve Lim
Direktur	: Herry Hykmanto
Direktur	: Kanchan Keshav Nijasure
Direktur (Independen)	: Fransiska Oei Lan Siem
Direktur	: Pradip Chhadva
Direktur	: Michellina Laksmi Triwardhany
Direktur	: Satinder Pal Singh Ahluwalia
Direktur	: Khoe Minhari Handikusuma

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Ng Kee Choe
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Prof. Dr. J.B. Kristiadi
Komisaris	: Gan Chee Yen
Komisaris (Independen)	: Manggi Taruna Habir
Komisaris	: Ernest Wong Yuen Weng
Komisaris (Independen)	: Andriaan Laoh *
Komisaris (Independen)	: Made Sukada*

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan Andriaan Laoh dan Made Sukada efektif sejak lulus uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

	Tabel Perhitungan Jumlah Suara			Realisasi
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	
	24.361.746 saham atau 0,280%	567.921.802 saham 6,526%	8.108.335.766 saham 93,176%	Telah direalisasikan

Tata Kelola Perusahaan

Agenda dan Keputusan

2. menyetujui pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin

Anggota : Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS;

Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag.

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda Kelima

Total Suara Setuju: 8.695.107.272 saham atau 99,919%

Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 6.296.217 saham atau 0,072%

1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 sebesar Rp13.977.700.000 gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2014 sebesar Rp14.585.290.882 gross;
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/ bonus selama tahun buku 2013 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2014 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.02-KR tanggal 30 April 2014, dan
2. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2013 sebesar Rp68.630.000,00 gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014 yaitu sebesar Rp671.488.006 gross;
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014, berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.03-KR tanggal 30 April 2014.
3. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2013 sebesar Rp52.733.150.000 gross;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2014 yaitu sebesar Rp44.864.444.937 gross;
- c. Menyetujui pelaksanaan *Special Grants* ("SG") dan *Long Term Incentive Plan* ("LTI") bagi anggota Direksi Perseroan dan Karyawan Senior, dan menetapkan total alokasi dana SG dan LTI sampai dengan maksimum Rp404.809.767.150 gross, dan
- d. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - (i) menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2013 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2014 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B. 01-KR tanggal 30 April 2014.
 - (ii) Menetapkan metode dan prosedur pembagian LTI dan SG, serta nilai LTI dan SG bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Tabel Perhitungan Jumlah Suara			Realisasi
Abstain	Tidak Setuju	Setuju	

8.632.535 saham
atau 0,099%

742.406 saham
atau 0,009%

8.686.474.737
saham
atau 99,820%

Telah direalisasikan

Tata Kelola Perusahaan

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik di Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan secara independen.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi melalui Dewan Komisaris. Sesuai Anggaran Dasar Danamon, pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pedoman & Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris memuat hal-hal yang terkait dengan organisasi, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, keterbukaan, etika kerja, pembentukan komite dan pengaturan rapat. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta *best practices* dan ditinjau secara berkala.

Etika Kerja Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris wajib tunduk pada Kode Etik Danamon dan peraturan perbankan lainnya yang berlaku.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang untuk saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

- Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Danamon dan anak perusahaan.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material, sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon pada saat pernyataan dibuat.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dituangkan dengan jelas di dalam Anggaran Dasar Danamon dan telah merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (*code of conduct*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan kebijakan internal Danamon.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan organisasi.
- Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- e. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Danamon.
 - f. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Danamon, kecuali:
 - 1) Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait; dan,
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Danamon secara berkala.
 - h. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk paling kurang:
 - 1) Komite Audit
 - 2) Komite Pemantau Risiko
 - 3) Komite Remunerasi
 - 4) Komite Nominasi
 - 5) Komite Tata Kelola
 - i. Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite di atas seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite di atas menjalankan tugasnya dengan efektif.
 - j. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Danamon, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - k. Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
 - l. Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Danamon.
 - m. Dewan Komisaris wajib memberitahu Bank Indonesia/OJK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Danamon.
 - n. Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Bisnis Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan laporan tugas pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - o. Dewan Komisaris wajib memonitor dan mengevaluasi rencana strategis teknologi informasi, termasuk meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh Danamon yang diusulkan oleh Direksi.
 - p. Dewan Komisaris wajib menyiapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meninjau dan memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja secara berkala.
 - q. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.
- Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama**
- a. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*.
 - b. Memimpin rapat Dewan Komisaris dan menentukan keadaan mendesak dalam undangan rapat jika rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari.
 - c. Menerima kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendistribusikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris.
 - d. Sebagai Ketua Rapat, Komisaris Utama menandatangani berita acara rapat.
 - e. Menerima laporan-laporan dari Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Tata Kelola Perusahaan

- f. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Danamon yang dianggap perlu.
- b. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
- c. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Danamon maupun usaha Danamon dan memberi nasihat kepada Direksi;
- f. Berdasarkan rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengadakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara anggota Direksi, dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danamon;
- h. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Danamon untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Danamon. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Dewan Komisaris berwenang untuk menetapkan batasan tertentu (limit) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi;
- j. Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan terlebih dahulu kepada Direksi atau menandatangani dokumen yang berkaitan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dan dari waktu ke waktu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindakan Direksi sebagai berikut:
 - 1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - i. Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
 - ii. Yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, atau
 - 2) Mengikat Danamon sebagai penjamin atau penanggung utang (*borgtocht*), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:
 - i. Yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; atau

- ii. Dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 3) Mendirikan perusahaan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perusahaan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;
- 4) Meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Danamon) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 5) Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Danamon dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- 6) Mengalihkan/mengoperkan atau melepaskan hak Danamon untuk menagih piutang Danamon yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/ menjaminkan, kekayaan Danamon, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Anggaran Dasar Danamon).

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Penetapan komposisi Dewan Komisaris Danamon dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Danamon memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

Jumlah, Komposisi, Kriteria, Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Per tanggal 31 Desember 2014, anggota Dewan Komisaris Danamon termasuk Komisaris Utama berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari:

1. Komisaris Utama: Ng Kee Choe
2. Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: J.B. Kristiadi
3. Komisaris: Gan Chee Yen
4. Komisaris Independen: Manggi T. Habir
5. Komisaris: Ernest Wong Yuen Weng
6. Komisaris Independen: Made Sukada

Catatan:

Andriaan Laoh telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen pada tanggal 13 Agustus 2014.

Jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi yaitu 9 (sembilan) orang dan hal ini telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. 3 (tiga) atau 50% (lima puluh persen) dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, yaitu J.B. Kristiadi, Manggi T. Habir, dan Made Sukada. Sebanyak 3 (tiga) anggota atau 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Tata Kelola Perusahaan

Data/Informasi Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	Pengangkatan	Jumlah Periode Pengangkatan	Domisili
Ng Kee Choe	Komisaris Utama	22 Mei 2006	24 Mei 2006	2006-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	4x	Singapura
J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama/ Independen	9 Mei 2005	5 Desember 2005	2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	4x	Indonesia
Gan Chee Yen	Komisaris	16 Juni 2003	21 Oktober 2003	2003-2005 2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	5x	Singapura
Manggi T Habir	Komisaris Independen	9 Mei 2005	22 Juli 2005	2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	4x	Indonesia
Ernest Wong Yuen Weng	Komisaris	29 April 2010	14 September 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017	3x	Singapura
Made Sukada	Komisaris Independen	7 Mei 2014	8 Agustus 2014	2014-2017	1x	Indonesia

Pengangkatan kembali J.B. Kristiadi sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen serta Manggi T. Habir sebagai Komisaris Independen Danamon dalam RUPS Tahunan 2014 tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 yang mengatur bahwa masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut yang diperhitungkan sejak RUPS pengangkatan tahun 2014.

Pengangkatan kembali J.B. Kristiadi sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Manggi T. Habir sebagai Komisaris Independen diperlukan untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran proses pelaksanaan pengawasan, mengingat Komisaris Independen lainnya baru diangkat pada RUPS 2014 dan masih harus menjalani proses *fit and proper test* oleh OJK.

Komisaris Independen

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

a. Komisaris Independen adalah:

- 1) anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Danamon, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

- 2) berasal dari luar Danamon;
 - 3) bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, atau mengawasi aktivitas Danamon dalam periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki saham Danamon; dan,
 - 5) secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan usaha yang terkait dengan kegiatan Danamon.
- b. Masa jabatan maksimal 2 (dua) kali berturut-turut.
- c. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Danamon atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Danamon, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen Danamon, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan setidaknya selama 1 (satu) tahun.
- d. Jika posisi Komisaris Independen menjadi kosong dan mengakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, Danamon wajib mengisi kekosongan selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan setelah kekosongan terjadi.

Pernyataan Independensi oleh Komisaris Independen

Masing-masing Komisaris Independen menandatangani pernyataan independensi yang dibuat dan diperbaharui secara berkala.

Persyaratan Komisaris Independen	Komisaris Independen Danamon		
	J.B. Kristiadi	Manggi T. Habir	Made Sukada
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Danamon, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	√	√	√
Berasal dari luar Danamon	√	√	√
Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, atau mengawasi aktivitas Danamon dalam periode 1 (satu) tahun terakhir	√	√	√
Tidak memiliki hubungan usaha yang terkait dengan kegiatan Danamon secara langsung maupun tidak langsung	√	√	√

Independensi Anggota Dewan Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Tata Kelola Perusahaan

Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ng Kee Choe Komisaris Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
J.B. Kristiadi Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Gan Chee Yen Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Manggi T. Habir Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ernest Wong Yuen Weng Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Made Sukada Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dapat memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga perusahaan non keuangan, atau dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak non-bank yang dikendalikan oleh Danamon.

Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Danamon yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Danamon.

Semua Komisaris Independen juga telah menandatangani pernyataan tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku dan diungkapkan setiap tahun.

Anggota Dewan Komisaris Danamon tidak memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Berikut ini adalah daftar jabatan Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2014:

Nama	Jabatan di Danamon	Jabatan di Perusahaan Lain
Ng Kee Choe	Komisaris Utama	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Chairman</i>, Nonexecutive AusNet Services.*) Singapore Power Group: <ul style="list-style-type: none"> o SP Australia Networks (Transmission) Ltd, o SP Australia Networks (Distributon) Ltd, o SP Australia Networks (Finance) Trust melalui SP Australia Networks (RE) Ltd - <i>Board of Directors</i> Fullerton Financial Holdings Pte Ltd. - <i>Chairman</i> CapitaLand Limited - <i>Member of International Advisory Council</i> China Development - <i>Member of Temasek Advisory Panel</i> Temasek Holdings (Private) Ltd - <i>Chairman Tanah Merah Country Club</i> <p>*) SP AusNet adalah dual listed company pada Australian Securities Exchange dan Singapore Exchange Securities Trading Limited.</p>
J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Anggota Dewan Komisaris PT Citra Tubindo
Gan Chee Yen	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini menjabat sebagai CEO Fullerton Financial Holdings (Internasional) Pte. Ltd., anak perusahaan Temasek Holdings (Pte.) Ltd., 2012. • Co-Chief Investment Officer and Senior Managing Director, Special Project at Temasek Internasional Pte. Ltd. • Co-Chief Investment Officer and Head of China. • Co-Chief Investment Officer, Temasek Internasional Pte. Ltd. • Senior Managing Director, Investment, Temasek Internasional Pte. Ltd. • Managing Director, Finance Temasek International Pte. Ltd. • Direktur Keuangan Singapore Technologies Pte Ltd. • Manajer Senior Keuangan di Singapore Technologies Marine Ltd. • Sebagai akuntan, Showa Leasing (S) Pte Ltd. • Auditor di Pricewaterhouse Coopers.
Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Asuransi Adira Dinamika • Ketua Dewan Pengawas Yayasan Danamon Peduli
Ernest Wong Yuen Weng	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Board Trustee Nanyang Technological University • Board Member Singapore Health Services Pte Ltd ("SingHealth") • Chairman Fullerton Financial Holdings Pte Ltd • Board Member Singbridge Holdings Pte. Ltd. • Board Member Pavilion Capital Holdings Pte. Ltd • Chairman A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd
Made Sukada	Komisaris (Independen)	-

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Danamon dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui Surat Pernyataan. Mengacu pada Kebijakan Investasi Pribadi No.Kep:DIR-CORP.SEC-014 tanggal 16 Desember 2013, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga kepada Sekretaris Perusahaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum dan setelah transaksi.

Tata Kelola Perusahaan

Khusus Komisaris Independen tidak diperkenankan baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Danamon sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris baik langsung maupun tidak langsung:

Pemegang Saham	Bank Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Ng Kee Choe Komisaris Utama	Jumlah Saham yang Dimiliki 94.275	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Kepemilikan saham: 0,00% Jenis saham: saham seri B
J.B. Kristiadi Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	-	-	-	-
Gan Chee Yen Komisaris	-	-	-	-	-
Manggi T. Habir Komisaris (Independen)	-	-	-	-	-
Ernest Wong Yuen Weng Komisaris	-	-	-	Ewong Pte Ltd Jumlah saham yang dimiliki 50.000	<ul style="list-style-type: none"> Domisili Perusahaan: Singapura Persentase Kepemilikan saham: 100% Tercatat atas nama: Ernest Wong & Paulina Wong

Pemegang Saham	Bank Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Made Sukada Komisaris (Independen)	-	PT Bank Tabungan Negara Persero. Jumlah saham yang dimiliki 62.500	-	-	Persentase Kepemilikan saham: 0,0006% tercatat atas nama Made Sukada
	-	-	-	PT Ace Hardware Indonesia. Jumlah saham yang dimiliki 140.000	Persentase Kepemilikan saham: 0,0008% tercatat atas nama Made Sukada
	-	-	-	PT Ciputra Development. Jumlah saham yang dimiliki 75.000	Persentase kepemilikan saham: 0,0005% tercatat atas nama Made Sukada
	-	-	-	PT Ciputra Property. Jumlah saham yang dimiliki 70.000	Persentase kepemilikan saham: 0,0001% tercatat atas nama Made Sukada
	-	-	-	PT Waskita Karya. Jumlah saham yang dimiliki 100.000	Persentase kepemilikan saham: 0,001% tercatat atas nama Made Sukada
	-	-	-	PT Sumarecon Agung. Jumlah saham yang dimiliki 100.000	Persentase kepemilikan saham: 0,001% tercatat atas nama Made Sukada
	-	-	-	PT Perusahaan Gas Negara Persero. Jumlah saham yang dimiliki 20.000	Persentase kepemilikan saham: 0,00008% tercatat atas nama Made Sukada
	-	-	-	PT Alam Sutra Realty. Jumlah saham yang dimiliki 100.000	Persentase kepemilikan saham: 0,0005% tercatat atas nama Made Sukada
	-	-	-	PT Agung Podomoro Land. Jumlah saham yang dimiliki 150.000	Persentase kepemilikan saham: 0,0007% tercatat atas nama Made Sukada

Tata Kelola Perusahaan

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon minimal 6 (enam) kali dalam setahun.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.
- c. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
- d. Jika para anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, mereka dapat berpartisipasi dalam rapat melalui tele atau *videoconference*. Notulen rapat wajib ditandatangani oleh semua peserta yang menghadiri rapat secara fisik maupun oleh peserta yang berpartisipasi melalui tele atau *videoconference* yang didukung oleh bukti rekaman.
- e. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dengan tingkat kehadiran (kuorum rapat) minimal 75% dari anggota Dewan Komisaris.
- f. Jika Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- g. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah mufakat.
- h. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh 2/3 (dua pertiga) didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.
- i. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- j. Keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicatat dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- k. Notulen rapat disimpan dan dibagikan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan.
- l. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis.
- m. Bahan rapat wajib dibagikan kepada peserta rapat paling sedikit 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat.
- n. Undangan rapat wajib disampaikan ke peserta rapat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat.
- o. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
- p. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Danamon menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014, 4-5 Maret 2014, 6 Mei 2014, 17 Juni 2014, 28 Oktober 2014, dan 27 November 2014. Rapat-rapat dihadiri secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh anggota Dewan Komisaris sehingga memenuhi persyaratan korum rapat.

Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati dan dijadwalkan secara berkala. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat *dissenting opinion*. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Nama	Dewan Komisaris/Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi (6 kali)	Tingkat Kehadiran
Ng Kee Choe	5	83%
J.B. Kristiadi	5	83%
Gan Chee Yen	6	100%
Manggi T. Habir	6	100%
Ernest Wong Yuen Weng	6	100%
Made Sukada	3	100%

Catatan:

-Made Sukada diangkat oleh RUPS pada tanggal 7 Mei 2014 dan lulus *fit & proper* test pada tanggal 8 Agustus 2014

-Ernest Wong Yuen Weng satu kali *teleconference* pada tanggal 17 Juni 2014

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2014

No	Tanggal	Agenda
1.	05 Februari 2014	1.Kinerja Finansial Tahun 2013 2.Dividend payment ratio 3.Risk Appetite Statement 4.Agenda Rapat Umum Pemegang Saham 5.Laporan Komite-komite
2.	04-05 Maret 2014	1.Proyek <i>Dragonfly</i> 2.Proyek Pegasus
3.	06 Mei 2014	1.Kinerja Finansial Tahun Berjalan 2.Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan Komite 3.Laporan Komite-komite
4.	17 Juni 2014	1.Kinerja Finansial Mei 2014 2.Progres Strategi Inisiatif 3.Laporan Komite-komite
5.	28 Oktober 2014	1.Kinerja Finansial Tahun Berjalan 2.Progres Strategi Inisiatif-Proyek Merdeka 3.Proyek Gedung Kantor Pusat 4.Laporan Komite-komite
6.	27 November 2014	1.Kinerja Finansial Tahun Berjalan-Oktober 2014 2.Rencana Bisnis Bank 2015 3.Proyek Merdeka

Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Dewan Komisaris 2014

Beberapa rekomendasi penting selama tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui beberapa inisiatif antara lain transformasi bisnis model, sinergi bisnis dan sentralisasi kegiatan operasional.
- 2) Mengelola struktur pendanaan dengan lebih optimal melalui peningkatan rekening Giro dan Tabungan.
- 3) Pertumbuhan portofolio pinjaman diimbangi dengan pengelolaan risiko di tingkat yang wajar dan mempertahankan kualitas kredit yang baik.
- 4) Mengelola rasio pinjaman dengan simpanan pada tingkat yang optimal dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 5) Menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada seluruh kegiatan Danamon dan melanjutkan penyesuaian dengan standar ASEAN, *Roadmap* OJK dan *International* sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai Danamon.
- 6) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Assessment Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur dan operasional, pengarahannya dan pengawasan serta pelaporan. Dewan Komisaris menyampaikan kinerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Kriteria Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria-kriteria yang menjadi dasar penilaian adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pencapaian kinerja Danamon.
2. Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris atas terselenggaranya pelaksanaan GCG pada setiap kegiatan usaha Danamon.
3. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi dan rapat-rapat komite Dewan Komisaris.
4. Terlaksananya tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Assessment Kinerja Dewan Komisaris

Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris berdasarkan laporan-laporan Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Indikator dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal Danamon, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta mempertimbangkan kinerja Danamon. Rekomendasi Komite Remunerasi diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris didasarkan kepada kinerja masing-masing anggota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komisaris Utama.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dapat digambarkan sebagai berikut:



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris terdiri dari Gaji, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kendaraan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti dan Tantiem. Di bawah ini adalah tabel yang menggambarkan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Komisaris serta jumlah seluruh remunerasi yang diterima dalam 1 (satu) tahun:

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris (dalam jutaan rupiah)

Remunerasi	2014		2013		2012		2011		2010	
	Nominal	Orang								
1 Gaji dan Fasilitas	13.049	6	14.334	8	11.667	8	10.758	8	10.532	7
2 Tantiem	8.370	6	13.641	8	9.240	8	8.017	8	8.683	7
3 LTCP	NA									
4 Tunjangan lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, Asuransi kesehatan, dan lainnya)										
a. dapat dimiliki	382	6	495	8	495	8	495	8	495	7
b. tidak dapat dimiliki	1.696	6	931	8	672	8	672	8	672	7

Tata Kelola Perusahaan

Pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima remunerasi yang diterima dalam 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*	2014	2013	2012	2011	2010
Di atas 5 miliar	-	-	-	-	-
Di atas 2 miliar s/d 5 miliar	5	8	8	8	7
Di bawah 2 miliar	1	-	-	-	-

Catatan:

1 orang Komisaris baru bergabung di bulan Mei 2014

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Program pengenalan bagi Komisaris baru dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai Danamon, kode etik, struktur organisasi, *lines of business*, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan-peraturan perbankan. Program orientasi tersebut dilakukan melalui pemberian *On-Boarding Pack* dan pemahaman singkat baik oleh manajemen maupun unit bisnis dan unit pendukung lainnya secara tatap muka.

Program Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, Danamon memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan, seminar atau *workshop* yang diadakan secara internal maupun diselenggarakan oleh institusi eksternal. Pada tahun 2014, partisipasi anggota Dewan Komisaris dalam program peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal Pelatihan
Ng Kee Choe	<i>Risk Management Refreshment Course</i>	The Risk Forum	Jakarta	28 Oktober 2014
J.B. Kristiadi	<i>Risk Management Refreshment Course</i>	The Risk Forum	Jakarta	28 Oktober 2014
Gan Chee Yen	<i>Risk Management Refreshment Course</i>	The Risk Forum	Jakarta	28 Oktober 2014
Manggi T. Habir	<i>Risk Management Refreshment Course</i>	The Risk Forum	Jakarta	28 Oktober 2014
Ernest Wong Yuen Weng	<i>Risk Management Refreshment Course</i>	The Risk Forum	Jakarta	28 Oktober 2014
Made Sukada	<i>Risk Management Refreshment Course</i>	The Risk Forum	Jakarta	28 Oktober 2014

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Danamon membentuk 5 (lima) komite, yaitu:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Nominasi;
- Komite Remunerasi;
- Komite Tata Kelola

Anggota-anggota komite diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan surat keputusan Direksi. Komite-komite diketuai oleh Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite di bawah Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun dan ditinjau ulang secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Komite Audit

Komite Audit memiliki fungsi utama untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit guna menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Pembentukan Komite Audit mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP: Kom-Corp. Sec.070 tanggal 21 November 2001 tentang Pembentukan dan Penugasan Komite Audit.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, syarat keanggotaan, independensi, wewenang, pelaksanaan rapat, etika kerja dan masa tugas. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ini ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

a. Pelaporan Keuangan

- 1) Mengkaji informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Danamon ke publik dan/ atau kepada pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Danamon.
- 2) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku.
- 3) Mengkaji kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.
- 4) Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Danamon.

b. Audit eksternal

- 1) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian atau penggantian, persyaratan keterlibatan dan remunerasi akuntan publik untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
- 2) Mengkaji lingkup pekerjaan dan hasil kerja akuntan publik, independensi dan obyektivitas akuntan publik setiap tahun, dan menyatakan di Laporan Tahunan (a) jumlah keseluruhan biaya yang dibayarkan kepada akuntan publik untuk tahun buku, dan (b) rincian biaya yang dibayar secara total untuk jasa audit dan jasa non-audit atau *negative statements* yang tepat dan apakah semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.
- 3) Mengkaji audit laporan keuangan, temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi akuntan publik dan tanggapan Direksi.
- 4) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit akuntan publik serta memonitor tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 5) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan akuntan publik dengan standar audit yang berlaku.

c. Audit Internal

- 1) Mengkaji kecukupan dan efektivitas fungsi Satuan Kerja Audit Internal.
- 2) Mengkaji independensi Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan memastikan bahwa Kepala Satuan Kerja Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Komite Audit dan Direktur Utama Danamon.

Tata Kelola Perusahaan

- 3) Mengkaji lingkup pekerjaan dan rencana audit dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk interaksi dengan Direksi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
 - 4) Mengkaji temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal serta tanggapan Direksi.
 - 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan temuan-temuan hasil audit dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.
- d. Pengendalian Internal
- Mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara teratur, kecukupan dan efektivitas pengendalian intern yang ditetapkan oleh Direksi mencakup keuangan, operasional, kepatuhan dan pengendalian teknologi informasi.
- e. Kepatuhan
- 1) Mengkaji kerangka kepatuhan, dan ruang lingkup kerja serta rencana fungsi Kepatuhan.
 - 2) Mengkaji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Danamon.
 - 3) Mengkaji masalah-masalah hukum yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan-laporan keuangan, kebijakan kepatuhan terkait, dan laporan-laporan yang diterima dari regulator.
- f. Lain-lain
- 1) Memeriksa dugaan kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Komite Audit atau oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Danamon.
 - 2) Menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
 - 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
 - 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Danamon.
 - 5) Mengkaji dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Danamon.
 - 6) Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
- Audit Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Menyelidiki masalah apapun yang termasuk dalam kerangka acuannya, memiliki akses dan kerjasama dengan Direksi serta keleluasaan untuk mengundang setiap direktur maupun pejabat eksekutif untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit, serta untuk memiliki sumber daya yang wajar dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik.
 - b. Mengkaji transaksi-transaksi afiliasi dan benturan kepentingan berdasarkan laporan penilaian dari Direktur Kepatuhan, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Danamon dan pemegang saham minoritas serta dilakukan dengan wajar berdasarkan persyaratan komersial normal
 - c. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
 - d. Mengundang/menunjuk peninjau dan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan, Keahlian, Dasar Hukum Penunjukan dan Independensi Komite Audit

Komite Audit Danamon beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Pihak Independen. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Manggi T. Habir.

Keanggotaan Komite Audit didasarkan pada Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. KSR-Kom.Corp. Sec-015 tanggal 01 September 2014 dan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR-Corp.Sec.-015 tanggal 01 September 2014.

Setiap anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian meliputi bidang keuangan dan/atau akuntansi, manajemen risiko, perbankan dan/atau hukum.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, seluruh anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit.

Profil Anggota Komite Audit

Profil anggota Komite Audit menjabarkan rincian nama dan jabatan anggota Komite Audit, periode jabatan, keahlian, kualifikasi dan riwayat pendidikan, serta pengalaman kerja masing-masing anggota Komite Audit termasuk Pihak Independen, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Manggi T. Habir	Ketua/ Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan/Manajemen Risiko	<i>Master in Business Administration,</i> University of Michigan, 1979 <i>Master in Public Administration,</i> Harvard University, 2002

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, Danamon, 2005-sekarang.
- Ketua Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2006-sekarang.
- Komisaris Utama, PT Asuransi Adira Dinamika, 2013-sekarang.
- Direktur, Standard & Poors's, Singapore, 2002-2005.
- Direktur Utama, PT Pefindo, 1998-2001.
- Direktur Riset, PT Bahana Securities, 1995-1998.
- Koresponden bisnis dan ekonomi, Far Eastern Economic Review, 1982-1985.
- Menjabat beberapa posisi utama, Citibank N.A. Jakarta, 1985-1991.

Tata Kelola Perusahaan

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
J.B. Kristiadi	Anggota/ Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan/Manajemen Risiko	PhD (<i>Public Administration</i>), Sorbonne University, Perancis tahun 1979.
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Komisaris Utama, Danamon, 2005-sekarang. - Anggota Dewan Komisaris, PT Citra Tubindo, 2009-sekarang. - Anggota Tim Penataan Kelembagaan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Menpan, 2011-sekarang. - Sekretaris, Tim Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai, 2010. - Staf Khusus, Menteri Keuangan, 2009-2011. - Guru Besar, Universitas Negeri Padjadjaran Bandung, 2007-sekarang. - Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan, 2005-2006. - Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003-2005. - Deputi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2001-2003. - Asisten Menko, Pengawasan Pembangunan, 1999-2001. - Ketua, Lembaga Administrasi (LAN) Negara RI, 1990-1998. - Direktur, Pembinaan Anggaran Departemen Keuangan RI, 1987-1990. - Komisaris, beberapa BUMN (PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, 1980-1989; PT Bank Dagang Negara, 1982-1991; PT Aneka Tambang, 1986; Bank BNI, 2005). - Direktur, Pembinaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Moneter, 1980-1987. 				
Made Sukada	Anggota/ Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan/Manajemen Risiko	Master bidang Ekonomi dari University of Pittsburgh, USA, 1984
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2014-sekarang - Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010-2014. - Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata, Tbk, 2010-2014. - Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010. 				
Angela Simatupang	Anggota/ Pihak Independen	September 2014-sekarang	Audit Internal, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan	Master of Commerce in International Business dan Management of Technology, The University of Sydney
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Managing Partner</i>, <i>Governance Risk Control Practice</i> di RSM AAJ, 2012-sekarang. - Anggota RSM International Network Limited di Indonesia, organisasi RSM global, 2009-2012. - Anggota RSM Asia Pacific Risk Advisory Sub Committee, International Contact Partner untuk Indonesia, 2008-sekarang. - <i>Governor</i>, Institute Internal Auditors-Chapter Indonesi, 2014-2017. - Pengajar mata kuliah audit internal dan manajemen risiko di program Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Indonesia, 2008-2010. - Penulis berbagai artikel untuk mensosialisasikan dan mendorong kesadaran publik mengenai tata kelola yang baik, 2007-2011. - Bekerja (Supervisor), RSM Bird Cameron Australia, 2005. 				
Yusuf Nawawi	Anggota/ Pihak Independen	September 2014-sekarang	Pembiayaan Mikro dan Korporasi, Derivatif, Manajemen Kredit dan Investasi serta Pelatihan dan Pengembangan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya dan <i>Master of Business Administration</i> dari Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama, Dana Pensiun BRI, 2010-2014. - Kepala Divisi, Pendidikan dan Pelatihan BRI, 2006-2010. - Kepala Divisi, <i>Micro Banking</i> BRI, 2004-2006. - Direktur, International Visitors Program, 2001-2004. - Staff, Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan RI, 1978-1984. 				

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

- Rapat diselenggarakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon.
- Rapat hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2014, Komite Audit melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Manggi T. Habir	9	100%
J.B. Kristiadi	8	89%
Made Sukada*)	5	100%
Angela Simatupang*)	5	100%
Yusuf Nawawi*)	5	100%

Catatan:

*) Selalu menghadiri rapat Komite Audit sejak aktif menjabat

Tata Kelola Perusahaan

Agenda Utama Rapat Komite Audit Tahun 2014

No.	Tanggal	Agenda Utama
1.	23 Januari 2014	1. SKAI <i>Update</i> 2. <i>Update</i> oleh Auditor Eksternal-Laporan Keuangan 2013 3. Tanggal rapat berikutnya
2.	04 Maret 2014	1. SKAI <i>Update</i> 2. Penunjukan kembali auditor eksternal 3. Tanggal rapat berikutnya
3.	10 April 2014	1. SKAI <i>Update</i> 2. Tanggal rapat berikutnya
4.	6 Mei 2014	1. SKAI <i>Update</i> 2. Tanggal rapat berikutnya
5.	17 Juni 2014	1. SKAI <i>Update</i> 2. <i>Update</i> oleh Auditor Eksternal 3. Tanggal rapat berikutnya
6.	07 Agustus 2014	1. SKAI <i>Update</i> 2. Tanggal rapat berikutnya
7.	11 September 2014	1. SKAI <i>Update</i> 2. <i>Update</i> Auditor Eksternal 3. <i>Update</i> Audit Pajak 4. Tanggal rapat berikutnya
8.	16 Oktober 2014	1. SKAI <i>Update</i> 2. <i>Update</i> Auditor Eksternal 3. Tanggal rapat berikutnya
9.	27 November 2014	1. SKAI <i>Update</i> 2. <i>Update</i> Auditor Eksternal 3. Tanggal rapat berikutnya

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Audit Tahun 2014

Beberapa kegiatan kerja penting yang dilakukan Komite Audit, antara lain:

- a. Menerima penyampaian laporan dari SKAI terkait:
 - Implementasi rencana audit SKAI 2014, dengan jumlah objek audit sebanyak 744 entitas.
 - Rencana Audit Danamon 2014 dan Komite Audit memberikan persetujuan atas rencana tersebut.
 - Penyampaian hasil internal audit bulanan, serta laporan atas tindak lanjut terhadap temuan audit dan temuan *fraud*.
- b. Melakukan kajian atas auditor eksternal dan merekomendasikan PT Ernst & Young Indonesia ("E&Y") sebagai Auditor Eksternal untuk diusulkan kepada RUPS.
- c. Menerima penyampaian laporan dari SKAI terkait rencana audit 2015.
- d. Menerima penyampaian laporan PT E&Y atas audit yang dilaksanakan terhadap Danamon dan anak perusahaan.

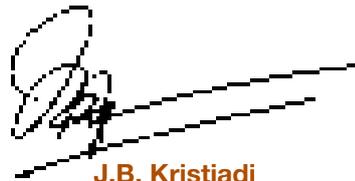
Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Pernyataan Komite Audit atas Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Danamon dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.



Manggi T. Habir
Komisaris Independen



J.B. Kristiadi
Anggota, Komisaris Independen



Made Sukada
Anggota, Komisaris Independen



Angela Simatupang
Anggota, Pihak Independen



Yusuf Nawawi
Anggota, Pihak Independen

Tata Kelola Perusahaan

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko dan memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen terkait dengan kerangka kerja dan kebijakan pengelolaan risiko yang konsisten dengan *risk appetite* Danamon. Pembentukan Komite ini didasarkan pada Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. KEP: Kom-Corp.Sec.026 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, keanggotaan dan etika kerja, independensi, jangka waktu penugasan dan pelaksanaan rapat. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk:

- a. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan manajemen risiko Danamon.
- b. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Danamon dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko Danamon dengan pelaksanaannya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, setidaknya sekali setahun.
- c. Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pelaksanaan tugas-tugas komitenya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Danamon dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi.
- e. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko setidaknya sekali dalam tiga bulan.
- f. Mengatur atau memberikan wewenang pelaksanaan penyelidikan dalam ruang lingkupnya.
- g. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Danamon.
- h. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.

Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Danamon yang diperlukan.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Melibatkan pihak independen dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukkan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Danamon beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, seorang Komisaris, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan Manajemen Risiko, dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum/Keuangan.

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian, integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Danamon telah melakukan perubahan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. No. KSR-Kom.Corp. Sec-015 tanggal 01 September 2014 dan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR-Corp.Sec.-015 tanggal 01 September 2014 yang efektif sejak tanggal 01 September 2014.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, mayoritas (80%) keanggotaan Komite

merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Anggota Direksi dilarang duduk dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Manggi T Habir.

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko menjabarkan rincian nama dan jabatan anggota Komite Pemantau Risiko, periode jabatan, keahlian, kualifikasi dan riwayat pendidikan, serta pengalaman kerja masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko termasuk Pihak Independen, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Manggi T. Habir	Ketua/ Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	<i>Master in Business Administration</i> , University of Michigan, 1979 <i>Master in Public Administration</i> , Harvard University, 2002

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, Danamon, 2005-sekarang.
- Ketua Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2006-sekarang.
- Komisaris Utama, PT Asuransi Adira Dinamika, 2013-sekarang.
- Direktur, Standard & Poors's, Singapore, 2002-2005.
- Direktur Utama, PT Pefindo, 1998-2001.
- Direktur Riset, PT Bahana Securities, 1995-1998.
- Koresponden bisnis dan ekonomi, Far Eastern Economic Review, 1982-1985.
- Menjabat beberapa posisi utama, Citibank N.A. Jakarta, 1985-1991.

Ernest Wong Yuen Weng	Anggota/ Komisaris	September 2014-sekarang *)	Perbankan & Keuangan Manajemen Umum	First Class Honours Degree Teknik Kimia dari University of Surrey, Inggris pada tahun 1967.
--------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	---

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- *The Board of Commissioner*, Danamon, 2010-sekarang .
- *Board Trustee*, Nanyang Technological University, 2006-sekarang
- *Board Member*, Singapore Health Services Pte Ltd ("SingHealth"), 2006-sekarang
- *Chairman*, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd, 2011-sekarang
- *Board Member*, Singbridge Holdings Pte. Ltd, 2011-sekarang.
- *Board Member*, Pavilion Capital Holdings Pte. Ltd, 2012-sekarang
- *Chairman*, A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd, 2012-sekarang.
- *Board Member*, Economic Development Board and The Ministry of Finance, 1989-1993.
- *Group CEO*, MediaCorp Pte Ltd, 2000-2005
- *Board Member*, United Overseas Bank Group, 1990-2005
- *Chairman*, the Association of Banks in Singapore, 1991-1993 dan 1999-2000

Tata Kelola Perusahaan

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Made Sukada	Anggota/ Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	Master bidang Ekonomi dari University of Pittsburgh, USA, 1984
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2014-sekarang - Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010-2014. - Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata, Tbk, 2010-2014. - Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010. 				
Angela Simatupang	Anggota/Pihak Independen	September 2014-sekarang	Audit Internal, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan	Master of Commerce in International Business dan Management of Technology, dari The University of Sydney
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Managing Partner, Governance Risk Control Practice di RSM AAJ, 2012-sekarang. - Anggota RSM International Network Limited di Indonesia, organisasi RSM global, 2009-2012. - Anggota RSM Asia Pacific Risk Advisory Sub Committee, International Contact Partner untuk Indonesia, 2008-sekarang. - Governor, Institute Internal Auditors-Chapter Indonesi, 2014-2017. - Pengajar mata kuliah audit internal dan manajemen risiko di program Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Indonesia, 2008-2010. - Penulis berbagai artikel untuk mensosialisasikan dan mendorong kesadaran publik mengenai tata kelola yang baik, 2007-2011. - Bekerja (Supervisor), RSM Bird Cameron Australia, 2005. 				
Yusuf Nawawi	Anggota/Pihak Independen	September 2014-sekarang	Pembiayaan Mikro dan Korporasi, Derivatif, Manajemen Kredit dan Investasi serta Pelatihan dan Pengembangan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya dan Master of Business Administration dari Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama, Dana Pensiun BRI, 2010-2014. - Kepala Divisi, Pendidikan dan Pelatihan BRI, 2006-2010. - Kepala Divisi, Micro Banking BRI, 2004-2006. - Direktur, International Visitors Program, 2001-2004. - Staff, Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan RI, 1978-1984. 				

* Catatan: Per tanggal 9 Januari 2015, Ernest Wong Yuen Weng sebagai peninjau di Komite Pemantau Risiko sesuai keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris No. KSR-KOM.Corp.Sec.-001 mengenai Perubahan Komposisi Komite Pemantau Risiko.

Masa Jabatan

Masa jabatan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko

- Rapat diselenggarakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon.
- Rapat hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

- c) Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- d) Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- e) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2014, Komite Pemantau Risiko melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Manggi T. Habir	9	100%
Ernest Wong Yuen Weng	8	89%
Made Sukada*)	5	100%
Angela Simatupang*)	5	100%
Yusuf Nawawi*)	5	100%

Catatan:

*) Selalu menghadiri rapat Komite Pemantau Risiko sejak aktif menjabat

Agenda Utama Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2014

No.	Tanggal	Agenda
1.	23 Januari 2014	1. <i>Treasury & Capital Market</i> 2. Portofolio Nasional 3. Portofolio <i>Financial Institutions</i> 4. Portofolio Solusi Emas Syariah 5. Parameter Regulasi dan Transaksi Pihak Terkait 6. Penyampaian Kasus Hukum 7. Penyampaian Anti <i>Money Laundering</i>
2.	04 Maret 2014	1. <i>Treasury & Capital Market</i> 2. Produk Program & Portofolio Anak Perusahaan 3. Portofolio Nasional 4. Portofolio Syariah 5. Parameter Regulasi dan Transaksi Pihak Terkait 6. Penyampaian Kasus Hukum 7. Penyampaian Anti <i>Money Laundering</i>
3.	10 April 2014	1. <i>Treasury & Capital Market</i> 2. Portofolio Nasional 3. Parameter Regulasi dan Transaksi Pihak Terkait and <i>Compliance Update</i> 4. Penyampaian Kasus Hukum 5. Penyampaian Anti <i>Money Laundering</i>
4.	6 Mei 2014	1. <i>Treasury & Capital Market</i> 2. Portofolio Nasional 3. Portofolio & Produk Program SEMM 4. Portofolio Anak Perusahaan 5. Parameter Regulasi dan Transaksi Pihak Terkait and <i>Compliance Update</i> 6. Penyampaian Kasus Hukum 7. Penyampaian Anti <i>Money Laundering</i>
5.	17 Juni 2014	1. <i>Treasury & Capital Market</i> 2. Portofolio Nasional 3. <i>Stress Test</i> 4. Parameter Regulasi dan Transaksi Pihak Terkait and <i>Compliance Update</i> 5. Penyampaian Kasus Hukum 6. Penyampaian Anti <i>Money Laundering</i>

Tata Kelola Perusahaan

No.	Tanggal	Agenda
6.	07 Agustus 2014	1. <i>Treasury & Capital Market</i> 2. Portofolio Nasional 3. Portofolio <i>Corporate Banking</i> 4. Parameter Regulasi dan Transaksi Pihak Terkait and <i>Compliance Update</i> 5. Penyampaian Kasus Hukum 6. Penyampaian Anti <i>Money Laundering</i>
7.	11 September 2014	1. <i>Treasury & Capital Market</i> 2. Portofolio Nasional 3. Portofolio & Produk Program SMEC 4. Portofolio Anak Perusahaan 5. Parameter Regulasi dan Transaksi Pihak Terkait and <i>Compliance Update</i> 6. Penyampaian Kasus Hukum 7. Penyampaian Anti <i>Money Laundering</i>
8.	16 Oktober 2014	1. <i>Treasury & Capital Market</i> 2. Dampak Suku Bunga Deposito terhadap Pendanaan 3. Portofolio Nasional 4. Portofolio SEMM 5. Parameter Regulasi dan Transaksi Pihak Terkait and <i>Compliance Update</i> 6. Penyampaian Kasus Hukum 7. Penyampaian Anti <i>Money Laundering</i>
9.	27 November 2014	1. <i>Treasury & Capital Market</i> 2. Portofolio Nasional 3. Portofolio ABF 4. Syariah 5. Parameter Regulasi dan Transaksi Pihak Terkait and <i>Compliance Update</i> 6. Penyampaian Anti <i>Money Laundering</i> 7. Litigasi

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2014

Kegiatan penting yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko, antara lain:

- a. Menerima penyampaian laporan Direktur Kepatuhan tentang status terakhir audit Bank Indonesia dan Unit Kepatuhan.
- b. Menelaah laporan Unit Hukum dan Unit Litigasi tentang status perkembangan kasus hukum dan litigasi.
- c. Mengkaji laporan dari Unit Risiko Integrasi, Unit *Treasury Capital Market* (TCM) dan Komite *Assets & Liabilities* (ALCO) sehubungan dengan pengelolaan risiko portofolio nasional, pengembangan *risk analytics*, risiko pasar dan likuiditas, pengelolaan *loan to deposit ratio* dan manajemen aset dan kewajiban.
- d. Menerima dan mengkaji laporan *Anti Money Laundering* (AML)/*Combating Financing of Terrorism* (CFT) yang mencakup pelaporan transaksi mencurigakan, pelaksanaan *e-learning*, inisiatif sistem teknologi, hasil audit SKAI dan lainnya.
- e. Mengevaluasi beberapa usulan (pembaruan) program produk.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.



Manggi T. Habir

Ketua, Komisaris Independen



Ernest Wong Yuen Weng

Anggota, Komisaris



Made Sukada

Anggota, Komisaris Independen



Angela Simatupang

Anggota, Pihak Independen



Yusuf Nawawi

Anggota, Pihak Independen

Tata Kelola Perusahaan

Komite Nominasi

Pembentukan Komite Nominasi diarahkan untuk membantu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan nominasi, identifikasi, rekomendasi dan suksesi Dewan Komisaris, Direksi termasuk Direktur Utama dan Pihak Independen.

Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris No. KSR-Kom.Corp.Sec-003 tanggal 05 Maret 2014 memutuskan melakukan pembubaran Komite Nominasi dan Remunerasi sekaligus membentuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi secara terpisah. Pengesahan pembentukan Komite Nominasi dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.DIR.Corp.Sec-004 tanggal 05 Maret 2014.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi

Komite Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi meliputi:

- a. Mengkaji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Mengidentifikasi, mengkaji dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Direktur Utama kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan.

- c. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris.
- d. Mengevaluasi dan merekomendasikan kandidat yang diusulkan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan bahwa Komite Nominasi telah menerima proposal tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Mengkaji dan mengevaluasi kandidat dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.
- f. Mengkaji ulang dan mengevaluasi kandidat berdasarkan persyaratan minimal dan kriteria lainnya dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang dianggap tepat, antara lain, pengetahuan perbankan dan keahlian kandidat yang diusulkan, kedalaman dan keluasan pengalaman profesional atau karakteristik latar belakang lainnya, independensi mereka, dan kebutuhan Dewan Komisaris/Direksi.
- g. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.
- h. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Danamon.

Wewenang Komite Nominasi

- a. Menggunakan jasa atas satu atau lebih perusahaan pencari untuk mengidentifikasi kandidat (termasuk untuk menyetujui biaya maupun persyaratan perusahaan pencari tersebut).
- b. Mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Danamon.

- c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan Suksesi Direksi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi, Komite Nominasi memiliki tanggung jawab dalam perencanaan suksesi Direksi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi terhadap pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi melalui *Talent Review Program*. Masing-masing anggota Direksi diwajibkan menyampaikan minimal 2 (dua) orang calon pengganti yang akan dievaluasi dan diidentifikasi kompetensi dan *skill gap*-nya. Calon-calon pengganti tersebut akan dikelompokkan dalam *talent inventory* untuk direkomendasikan kepada Komite Nominasi.

Susunan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Nominasi

Keanggotaan Komite Nominasi berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia.

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Anggota Komite Nominasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. No. KSR-Kom.Corp.Sec-015 tanggal 01 September 2014 dan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR-Corp.Sec.-015 tanggal 01 September 2014 yang efektif menjabat sejak tanggal 01 September 2014.

Independensi Komite Nominasi

Untuk menjunjung independensi dan obyektifitas, Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu J.B. Kristiadi dengan mayoritas keanggotaan adalah Komisaris Independen serta melarang anggota Direksi menjadi anggota Komite.

Profil Anggota Komite Nominasi

Profil anggota Komite Nominasi menjabarkan rincian nama dan jabatan anggota, periode jabatan, keahlian, kualifikasi dan riwayat pendidikan, serta pengalaman kerja, sebagai berikut:

Tata Kelola Perusahaan

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
J.B. Kristiadi	Ketua/Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	PhD dari Sorbonne University, Perancis tahun 1979.
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Komisaris Utama, Danamon, 2005-sekarang. - Anggota Dewan Komisaris, PT Citra Tubindo, 2009-sekarang. - Anggota Tim Penataan Kelembagaan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Menpan, 2011-sekarang. - Sekretaris, Tim Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai, 2010. - Staf Khusus, Menteri Keuangan, 2009-2011. - Guru Besar, Universitas Negeri Padjadjaran Bandung, 2007-sekarang. - Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan, 2005-2006. - Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003-2005. - Deputi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2001-2003. - Asisten Menko, Pengawasan Pembangunan, 1999-2001. - Ketua, Lembaga Administrasi (LAN) Negara RI, 1990-1998. - Direktur, Pembinaan Anggaran Departemen Keuangan RI, 1987-1990. - Komisaris, beberapa BUMN (PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, 1980-1989; PT Bank Dagang Negara, 1982-1991; PT Aneka Tambang, 1986; Bank BNI, 2005). - Direktur, Pembinaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Moneter, 1980-1987. 				
Ng Kee Choe	Anggota/ Komisaris Utama	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	Sarjana Kimia dari Universitas Singapura, tahun 1967
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Board of Directors</i>, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd., 2008-sekarang - <i>Chairman</i>, Tanah Merah Country Club, 2008-sekarang - Anggota, Temasek Advisory Panel Temasek Holdings (Private) Ltd., - <i>Chairman</i>, NTUC Income, 2005-2013 - <i>Vice chairman</i>, DBS Group Holdings, 1970-2003 - <i>Director</i>, Singapore Exchange Limited, 2003-2014 - Dianugerahi <i>Public Service Star</i> pada tahun 2001 dan <i>Meritorious Service Medal</i> pada tahun 2012 untuk kontribusi beliau pada pelayanan publik di Singapura 				
Made Sukada	Anggota/ Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	Master bidang Ekonomi dari University of Pittsburgh, USA, 1984
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2014-sekarang - Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010-2014. - Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata, Tbk, 2010-2014. - Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010. 				
Marta Jonatan	Anggota/ Pejabat Eksekutif	September 2014-sekarang	Human Resources Management	Sarjana Statistik IPB Bogor
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Human Resources Director</i>, Microsoft Indonesia, 2010-2014 - <i>Human Resources Director</i>, Barclays Indonesia, 2008-2010 - <i>Human Resources Head</i>, Citibank Philipina, 2006-2008 - <i>Head of Compensation & HR Services</i>, Citibank Jakarta, 1998-2006 - <i>Head of Reward</i>, United Tractors, 1992-1998 				

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi

- Rapat diadakan sesuai dengan kebutuhan Danamon setidaknya 2 (dua) kali setahun.
- Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi

Komite Nominasi melaksanakan 4 (empat) kali rapat selama tahun 2014. Tingkat kehadiran anggota mencapai 100% yang menunjukkan komitmen dari seluruh anggota Komite Nominasi.

Kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
J.B. Kristiadi	4	100%
Ng Kee Choe	4	100%
Made Sukada*)	2	100%
Marta Jonatan*)	2 **)	100%

Catatan:

*) Selalu menghadiri rapat Komite Nominasi sejak aktif menjabat.

***) 2 Rapat Komite sebelumnya dihadiri oleh Pejabat Eksekutif HR

Agenda Utama Rapat Komite Nominasi tahun 2014

No.	Tanggal	Agenda Utama
1.	05 Februari 2014	1. Tantiem 2. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan anak
2.	21 April 2014	1. Tantiem 2. Implementasi SG dan LTI
3.	17 Juni 2014	Rekomendasi penunjukan Komisaris Utama dan Direktur perusahaan anak
4.	28 Oktober 2014	Struktur Organisasi

Catatan:

Pada bagian ini Komite Nominasi merupakan bagian dari Komite Remunerasi

Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Nominasi tahun 2014

Kegiatan kerja penting Komite Nominasi, antara lain:

- Melakukan kajian atas komposisi Komite-Komite,
- Melakukan kajian atas komposisi Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan
- Melakukan kajian atas struktur organisasi perseroan secara keseluruhan
- Melakukan kajian *talent market mapping*
- Melakukan kajian atas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.



J.B. Kristiadi
Ketua, Komisaris Independen



Ng Kee Choe
Anggota, Komisaris



Made Sukada
Anggota, Komisaris Independen



Marta Jonatan
Anggota, Pejabat Eksekutif

Komite Remunerasi

Pembentukan Komite Remunerasi diarahkan untuk menjalankan fungsi pengawasan atas efektivitas kerangka dan kebijakan remunerasi serta struktur remunerasi Dewan Komisaris, Pihak Independen, Direksi dan Manajemen Senior tertentu.

Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris No. KSR-Kom.Corp.Sec-003 tanggal 05 Maret 2014 memutuskan melakukan pembubaran Komite Nominasi dan Remunerasi sekaligus membentuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi secara terpisah. Pengesahan pembentukan Komite Remunerasi dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.DIR.Corp.Sec-004 tanggal 05 Maret 2014.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi

Komite Remunerasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dikaji secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi meliputi:

- a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Struktur dan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan apabila perlu, untuk Manajemen Senior.
 - 2) Remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif yang akan diberikan berdasarkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan untuk Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

- 3) Remunerasi, termasuk gaji dan tunjangan Pihak Independen.
 - b. Mengevaluasi kinerja Direksi dan mengusulkan perbandingan obyektif kinerja Direksi dengan industri.
 - c. Menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Danamon.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi wajib memperhatikan kinerja keuangan Danamon, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran strategi jangka panjang Danamon.

Wewenang Komite Remunerasi

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, Manajemen Senior, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- b. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Melibatkan pihak independen untuk membantu tugasnya jika diperlukan.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Remunerasi

Keanggotaan Komite Remunerasi berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif atau seorang yang menduduki jabatan manajerial yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia.

Pengangkatan anggota Komite dilakukan setelah seluruh anggota dinilai memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Tata Kelola Perusahaan

Anggota Komite Remunerasi Danamon diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. No. KSR-Kom.Corp.Sec-015 tanggal 01 September 2014 dan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR-Corp.Sec.-015 tanggal 01 September 2014 yang efektif sejak tanggal 01 September 2014.

Independensi Komite Remunerasi

Untuk menjunjung independensi dan obyektivitas, Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu J.B. Kristiadi dengan mayoritas keanggotaan adalah Komisaris Independen. Selain itu anggota Direksi dilarang menjadi anggota di Komite Remunerasi.

Profil Anggota Komite Remunerasi

Profil anggota Komite Remunerasi menjabarkan rincian nama dan jabatan anggota, periode jabatan, keahlian, kualifikasi dan riwayat pendidikan, serta pengalaman kerja, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
J.B. Kristiadi	Ketua/ Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	PhD dari Sorbonne University, Perancis tahun 1979.
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Komisaris Utama, Danamon, 2005-sekarang. - Anggota Dewan Komisaris, PT Citra Tubindo, 2009-sekarang. - Anggota Tim Penataan Kelembagaan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Menpan, 2011-sekarang. - Sekretaris, Tim Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai, 2010. - Staf Khusus, Menteri Keuangan, 2009-2011. - Guru Besar, Universitas Negeri Padjadjaran Bandung, 2007-sekarang. - Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan, 2005-2006. - Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003-2005. - Deputi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2001-2003. - Asisten Menko, Pengawasan Pembangunan, 1999-2001. - Ketua, Lembaga Administrasi (LAN) Negara RI, 1990-1998. - Direktur, Pembinaan Anggaran Departemen Keuangan RI, 1987-1990. - Komisaris, beberapa BUMN (PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, 1980-1989; PT Bank Dagang Negara, 1982-1991; PT Aneka Tambang, 1986; Bank BNI, 2005). - Direktur, Pembinaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Moneter, 1980-1987. 				
Ng Kee Choe	Anggota/ Komisaris Utama	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	Sarjana Kimia dari Universitas Singapura, tahun 1967
Pengalaman Kerja				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Board of Directors</i>, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd., 2008-sekarang - <i>Chairman</i>, Tanah Merah Country Club, 2008-sekarang - Anggota, Temasek Advisory Panel Temasek Holdings (Private) Ltd., - <i>Chairman</i>, NTUC Income, 2005-2013 - <i>Vice chairman</i>, DBS Group Holdings, 1970-2003 - <i>Director</i>, Singapore Exchange Limited, 2003-2014 - Dianugerahi <i>Public Service Star</i> pada tahun 2001 dan <i>Meritorious Service Medal</i> pada tahun 2012 untuk kontribusi beliau pada pelayanan publik di Singapura 				

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Made Sukada	Anggota/ Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	Master bidang Ekonomi dari University of Pittsburgh, USA, 1984
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Pengawas ,Yayasan Danamon Peduli , 2014-sekarang - Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010-2014. - Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata, Tbk, 2010-2014. - Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010. 				
Marta Jonatan	Anggota/ Pejabat Eksekutif	September 2014-sekarang	Manajemen Sumber Daya Manusia	Sarjana Statistik IPB Bogor
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Human Resources Director</i>, Microsoft Indonesia, 2010-2014 - <i>Human Resources Director</i>, Barclays Indonesia, 2008-2010 - <i>Human Resources Head</i>, Citibank Philipina, 2006-2008 - <i>Head of Compensation & HR Services</i>, Citibank Jakarta, 1998-2006 - <i>Head of Reward</i>, United Tractors, 1992-1998 				

Masa Jabatan

Masa jabatan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Remunerasi

- a. Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon setidaknya 2 (dua) kali setahun.
- b. Korum rapat adalah 51% (lima puluh satu persen) termasuk kehadiran Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia atau perwakilan karyawan.
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- d. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- e. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- f. Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi

Komite Remunerasi melaksanakan 4 (empat) kali rapat selama tahun 2014. Tingkat kehadiran anggota mencapai 100% yang menunjukkan komitmen seluruh anggota Komite Remunerasi.

Tata Kelola Perusahaan

Kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
J.B. Kristiadi	4	100%
Ng Kee Choe	4	100%
Made Sukada*)	2	100%
Marta Jonatan*)	2**)	100%

Catatan:

*) Selalu menghadiri rapat Komite Remunerasi sejak aktif menjabat

***) 2 Rapat Komite sebelumnya dihadiri oleh Pejabat Eksekutif HR

Agenda Utama Rapat Komite Remunerasi Tahun 2014

No.	Tanggal	Agenda Utama
1.	05 Februari 2014	1. Tantiem 2. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak
2.	21 April 2014	1. Tantiem 2. <i>Implementation of SG and LTI (allocation)</i>
3.	17 Juni 2014	1. <i>Talent market mapping for BoD positions including appointment of Headhunter</i> 2. LTI & SG 3. <i>People dashboard for Bankwide and SEMM</i>
4.	28 Oktober 2014	Retention Program

Catatan:

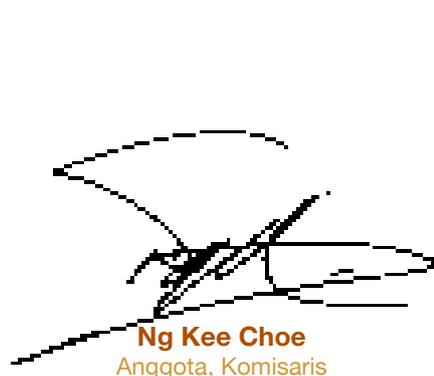
Pada bagian ini Komite Remunerasi merupakan bagian dari Komite Nominasi

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Remunerasi tahun 2014

Kegiatan kerja Komite Remunerasi secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- Melakukan kajian atas pemberian LTI & SG
- Memberikan rekomendasi atas remunerasi Dewan Komisaris/Direksi/Dewan Pengawas Syariah/Komite Audit
- Melakukan kajian atas struktur organisasi perseroan secara keseluruhan
- Melakukan kajian *talent market mapping*
- Melakukan kajian atas skema insentif

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.



Ng Kee Choe
Anggota, Komisaris



J.B. Kristiadi
Ketua, Komisaris Independen



Marta Jonatan
Anggota, Pejabat Eksekutif



Made Sukada
Anggota, Komisaris Independen

Komite Tata Kelola (Corporate Governance)

Komite Tata Kelola membantu Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap efektivitas struktur, kebijakan dan sumber daya tata kelola guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komite ini dibentuk berdasarkan keputusan sirkuler resolusi Dewan Komisaris No. KEP: KOM-Corp.Sec.021 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Tata Kelola

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola meliputi:

- Mengevaluasi secara berkala struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan tata kelola Danamon.
- Mengkaji prinsip-prinsip tata kelola Danamon dan bila diperlukan merekomendasikan usulan perbaikan kepada Dewan Komisaris.
- Mengawasi pelaksanaan tata kelola dan merekomendasikan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam rangka perbaikan.
- Menelaah laporan tata kelola yang dipublikasikan oleh Danamon untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut.
- Melaporkan kegiatan komite kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Tata Kelola, meliputi:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Danamon yang diperlukan.

- Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
- Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan, Keahlian, Dasar Hukum Penunjukan dan Independensi Komite Tata Kelola

Keanggotaan Komite Tata Kelola berjumlah 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Komisaris. Susunan anggota Komite ini telah memenuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite serta persyaratan independensi anggota Komite.

Masing-masing anggota memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Komite, dan masing-masing memiliki integritas, akhlak dan moral luhur yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Anggota Komite Tata Kelola Danamon diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., yaitu No.KSR-Kom.Corp.Sec-018 tanggal 30 Maret 2011 dan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR-Corp.Sec.-006 tanggal 30 Maret 2011 yang kemudian disesuaikan dengan keputusan Dewan Komisaris No.KSR-Kom.Corp.Sec-015 tanggal 1 September 2014 dan Surat Keputusan Direksi yang efektif menjabat sejak tanggal 1 September 2014.

Untuk menjunjung independensi dan obyektifitas, Komite Tata Kelola diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Made Sukada dan melarang anggota Direksi menjadi anggota di Komite Tata Kelola.

Tata Kelola Perusahaan

Profil Anggota Komite Tata Kelola

Profil anggota Komite Tata Kelola menjabarkan rincian nama dan jabatan anggota, periode jabatan, keahlian, kualifikasi dan riwayat pendidikan, serta pengalaman kerja masing-masing anggota, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Made Sukada	Ketua/ Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	Master bidang Ekonomi dari University of Pittsburgh, USA, 1984
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2014-sekarang - Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010-2014. - Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata, Tbk, 2010-2014. - Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010. 				
Gan Chee Yen	Anggota/ Komisaris	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	Sarjana jurusan Akuntansi dari National University di Singapura
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini menjabat sebagai CEO Fullerton Financial Holdings (Internasional) Pte. Ltd., abak perusahaan Temasek Holdings (Pte.) Ltd., 2012. - <i>Co-Chief Investment Officer & Senior Managing Director, Special Project</i> di Temasek Internasional Pte. Ltd., 2011-sekarang. - <i>Co-Chief Investment Officer dan Head of China</i>, 2010. - <i>Co-Chief Investment Officer</i>, Temasek Internasional Pte. Ltd., 2007. - <i>Senior Managing Director</i>, Investment, Temasek Internasional Pte. Ltd., 2005. - <i>Managing Director</i>, Finance Temasek International Pte. Ltd., 2003. - Direktur Keuangan Singapore Technologies Pte Ltd., 1996. - Manajer Senior Keuangan di Singapore Technologies Marine Ltd pada tahun 1988 selama 8 tahun. - Sebagai akuntan, Showa Leasing (S) Pte Ltd pada September 1986. - Auditor di Pricewaterhouse Coopers pada Mei 1984. 				
Manggi T. Habir	Anggota/ Komisaris Independen	September 2014-sekarang	Keuangan Manajemen Risiko	Master in Business Administration, University of Michigan, 1979 Master in Public Administration, Harvard University, 2002
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)				
<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen, Danamon, 2005-sekarang. - Ketua Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2006-sekarang. - Komisaris Utama, PT Asuransi Adira Dinamika, 2013-sekarang. - Direktur, Standard & Poors's, Singapore, 2002-2005. - Direktur Utama, PT Pefindo, 1998-2001. - Direktur Riset, PT Bahana Securities, 1995-1998. - Koresponden bisnis dan ekonomi, Far Eastern Economic Review, 1982-1985. - Menjabat beberapa posisi utama, Citibank N.A. Jakarta, 1985-1991. 				

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.

Rapat Komite Tata Kelola

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola

- Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata kelola yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite

Komite Tata Kelola melaksanakan 4 (empat) kali rapat selama tahun 2014, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Made Sukada*)	2	100%
Manggi T Habir	4	100%
Gan Chee Yen*)	2	100%

Catatan:

*) Selalu menghadiri rapat Komite Tata Kelola sejak aktif menjabat

Agenda Utama Rapat Komite Tata Kelola tahun 2014

No.	Tanggal	Agenda Utama
1.	03 Februari 2014	Hasil Self Assessment GCG RUPS dan Agenda RUPS
2.	06 Mei 2014	Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite Dewan Komisaris
3.	28 Oktober 2014	Update GCG terkait Peraturan OJK
4.	09 Desember 2014	1. RUPSLB 2. Jadwal dan Agenda Rapat Komite Tata Kelola

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Tata Kelola tahun 2014

Kegiatan penting Komite Tata Kelola selama tahun 2014, meliputi:

- Mengkaji agenda dan materi RUPS Tahunan 2014
- Mengkaji kelengkapan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon tahun 2013 untuk memastikan kepatuhan dan tingkat keterbukaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar tata kelola yang berlaku serta mendiskusikan perbaikan-perbaikan terhadap Laporan Tahunan 2014 Danamon
- Menerima dan mempelajari Laporan Manajemen tentang:
 - Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Danamon
 - Timeline* pelaksanaan dan agenda RUPS
 - Timeline* pembayaran deviden
 - Timeline* penyusunan Laporan Tahunan Danamon

Tata Kelola Perusahaan

- Pelaksanaan *self assessment* tata kelola Danamon
- Pemenuhan kriteria penilaian *Annual Report Award (ARA)*
- Penyempurnaan menuju tata kelola ASEAN CG Score Card
- Pelaksanaan penyusunan *Sustainability Report* Danamon dengan menerapkan standar *Global Reporting Initiative*
- Penggunaan jasa pihak independen dalam melakukan *assessment* atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Danamon
- Program peningkatan pelaksanaan pelatihan untuk anggota Dewan Komisaris Danamon.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.



Made Sukada

Ketua, Komisaris Independen



Manggi T. Habir

Anggota, Komisaris Independen



Gan Chee Yen

Anggota, Komisaris

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan Danamon serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar Danamon yang berpedoman pada seluruh peraturan yang berlaku.

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan organisasi, tugas dan tanggung jawab, independensi Direktur Utama, keterbukaan, etika kerja, pembentukan unit-unit, rapat dan pelaksanaan rapat. Pedoman dan tata tertib kerja senantiasa dikaji secara berkala.

Etika Kerja Direksi

- a) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Danamon maupun anak perusahaan.
- b) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- d) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud oleh poin c di atas apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan Danamon, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak

perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

- e) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Danamon dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- f) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- g) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Proyek bersifat khusus;
 - 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - 3) Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- h) Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Danamon, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Danamon.
- i) Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

Keterbukaan Direksi

- a. Terkait dengan laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Laporan Tahunan, Direksi wajib mengungkapkan:
 - Kepemilikan saham baik pada Danamon maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar

Tata Kelola Perusahaan

- negeri;
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/ atau pemegang saham pengendali Danamon;
 - Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Danamon;
 - Jabatan di perusahaan lain.
- b. Mengungkapkan kebijakan Danamon yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan dan mengelola Danamon sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Danamon.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Danamon, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Menjalankan program-program tanggung jawab sosial Danamon.
- f. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
- g. Memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui

Rapat Umum Pemegang Saham.

- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Direksi

- a) Direksi mewakili Danamon di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Danamon dengan pihak lain dan pihak lain dengan Danamon serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Danamon.
- b) Direksi berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
 1. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau perbankan lain yang menyerupai, atau menimbulkan timbulnya pinjaman uang kepada pihak terkait, atau yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 2. Mengikat Danamon sebagai penjamin atau penanggung utang atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain yang merupakan pihak terkait atau dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 3. Mendirikan perusahaan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan deviden saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perusahaan lain, dengan tidak mengurangi

persetujuan instansi yang berwenang.

4. Meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Danamon) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
5. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Danamon dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris
6. Mengalihkan atau mengoperkan atau melepaskan hak Danamon untuk menagih piutang Danamon yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris
7. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/ menjaminkan, kekayaan Danamon, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Danamon.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Penetapan komposisi Direksi Danamon dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi. Danamon memberikan kesempatan yang sama kepada

semua orang, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Direksi dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

Jumlah, Komposisi, Kriteria, Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Direksi Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Anggota Direksi

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan RUPS Tahunan 2014 telah dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan penetapan salah satu Direksi sebagai Direktur Independen untuk periode 2014-2017. Direksi Danamon per Desember 2014 beranggotakan 9 (sembilan) orang dengan mayoritas berkewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari kalangan profesional dan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, serta telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi antara lain mempunyai ahlak moral dan integritas yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank.

Tata Kelola Perusahaan

Susunan Direksi Danamon sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI)	Pengangkatan	Jumlah Periode Pengangkatan	Domisili
1	Henry Ho Hon Cheong	Direktur Utama	29 April 2010	24 Juli 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017	3 x	Indonesia
2	Muliadi Rahardja	Direktur	31 Agustus 1999	21 Desember 1999	1999-2002 2002-2005 2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	6 x	Indonesia
3	Vera Eve Lim	Direktur	22 Mei 2006	26 Juni 2006	2006-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017	4 x	Indonesia
4	Herry Hykmanto	Direktur	3 April 2008	13 Mei 2008	2008-2011 2011-2014 2014-2017	3 x	Indonesia
5	Kanchan Keshav Nijasura	Direktur	3 April 2008	19 Juni 2008	2008-2011 2011-2014 2014-2017	3 x	Indonesia
6	Fransiska Oei Lan Siem	Direktur	25 Mei 2009	11 Juni 2009	2009-2011 2011-2014 2014-2017	3 x	Indonesia
7	Pradip Chhadva	Direktur	29 April 2010	18 Maret 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017	3 x	Indonesia
8	Michellina Laksmi Triwardhany	Direktur	29 April 2010	27 Mei 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017	3 x	Indonesia
9	Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	29 April 2010	24 Juni 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017	3 x	Indonesia

Catatan:

-Khoe Minhari Handikusuma telah mengundurkan diri efektif tanggal 31 Oktober 2014

-Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat, Fransiska Oei Lan Siem ditetapkan sebagai Direktur Independen dalam RUPS Tahunan tanggal 07 Mei 2014

Rencana Perubahan Susunan Direksi

Pada awal Januari 2015, Danamon telah menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 27 Februari 2015. Adapun, agenda RUPSLB adalah perubahan Anggaran Dasar mengenai nomenklatur jabatan Wakil Direktur Utama dan perubahan komposisi Direksi terkait dengan pencalonan Sng Seow Wah sebagai Direktur Utama menggantikan Henry Ho Hon Cheong yang akan memasuki masa pensiun dan Muliadi Rahardja sebagai Wakil Direktur Utama. Pencalonan Sng Seow Wah dan Muliadi Rahardja telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan masing-masing per tanggal 20 November dan 12 Desember 2014.

Bilamana disetujui oleh RUPSLB maka susunan Direksi Danamon akan menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Posisi
1	Sng Seow Wah	Direktur Utama
2	Muliadi Rahardja	Wakil Direktur Utama
3	Vera Eve Lim	Direktur
4	Herry Hykmanto	Direktur
5	Kanchan Keshav Nijasure	Direktur
6	Fransiska Oei Lan Siem	Direktur
7	Pradip Chhadva	Direktur
8	Michellina Laksmi Triwardhany	Direktur
9	Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur

Masa Jabatan Direktur Independen

Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen, maka Danamon harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

Seorang Direktur Independen wajib:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Danamon paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direktur Danamon;
- Tidak bekerja rangkap sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain;
- Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Danamon selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
- Ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Masing-masing anggota Direksi memiliki peran dan wewenang yang diatur dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi tentang Pembagian Tugas dan Wewenang anggota Direksi, No. KSR-DIR.Corp.Sec 008 tanggal 03 Desember 2014, sebagai berikut:

Anggota Direksi	Tugas dan Tanggung Jawab
Henry Ho Hon Cheong Direktur Utama	Sebagai Direktur Utama dan <i>Wholesale Banking</i> , bertanggung jawab atas seluruh tugas dan wewenang Direksi serta secara langsung mengawasi bidang tugas Audit Internal; PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Adira Quantum Multi Finance, PT Asuransi Adira Dinamika dan <i>wholesale banking</i> .
Muliadi Rahardja Direktur	Sebagai Direktur <i>Operation</i> , SME dan <i>Micro Business</i> , membawahi bidang-bidang tugas <i>Operation</i> ; <i>Corporate Real Estate Management</i> ; <i>Regional Chief Officer</i> , Usaha Kecil dan Menengah (UKM); <i>Micro Business Banking</i> . Tugas utamanya adalah membina, mengembangkan dan mengawasi operasional di tingkat cabang dan wilayah, operasional dari sentra proses di tingkat pusat. Selain itu, bertanggung jawab terhadap <i>Regional Corporate Officer</i> dan <i>Corporate Real Estate Management</i> serta perkembangan atas keseluruhan bisnis UKM dan Perbankan Mikro.

Tata Kelola Perusahaan

Anggota Direksi	Tugas dan Tanggung Jawab
Vera Eve Lim Direktur	<p>Sebagai Direktur Keuangan, bertanggung jawab atas bidang tugas <i>Financial Planning and Control</i> dan Transformasi Manajemen.</p> <p>Bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Danamon, memonitor penyajian laporan keuangan guna memastikan kepatuhan dengan standar keuangan dan akuntansi serta peraturan yang diterapkan. Berperan sebagai mitra bisnis dalam menciptakan nilai tambah melalui pelaporan dan analisis kinerja strategi dan operasional dari masing-masing bisnis. Selain itu, juga memberikan informasi terkini tentang kompetisi dan arahan strategis usaha, memimpin dan mengkoordinasi aksi korporasi Danamon dan <i>Group</i>.</p>
Herry Hykmanto Direktur	<p>Direktur Syariah, membawahi bidang tugas Syariah <i>Banking</i>.</p> <p>Bertanggung jawab penuh untuk pengembangan dan penerapan strategi Unit Usaha Syariah Danamon.</p>
Kanchan Keshav Nijasure Direktur	<p>Direktur Teknologi Informasi, membawahi bidang tugas Teknologi Informasi.</p> <p>Bertanggung jawab menyelaraskan visi dan strategi TI bank dengan strategi bisnis serta membangun platform TI.</p>
Fransiska Oei Lan Siem Direktur	<p>Direktur Kepatuhan, membawahi bidang-bidang tugas Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan, UKPN, Hukum, Litigasi, dan <i>Public Affairs</i>.</p> <p>Bertanggung jawab atas kepatuhan Danamon terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun penerapan <i>Anti Money Laundering</i> dan <i>Counter Terrorism Financing</i>. Selain itu, juga bertanggung jawab terhadap masalah hukum, litigasi, <i>public affairs</i> serta <i>corporate secretary office</i>.</p>
Pradip Chhadva Direktur	<p>Direktur <i>Treasury dan Capital Markets</i>, membawahi bidang-bidang tugas <i>Treasury Capital Market, Financial Institution, dan Transaction Banking</i>.</p> <p>Bertanggung jawab memformulasikan strategi dan memastikan eksekusi dan pencapaian target bisnisnya. Selain itu, juga bertanggung jawab atas manajemen secara optimal dan hati-hati atas neraca Danamon dan manajemen likuiditas, manajemen risiko suku bunga dan valuta asing termasuk merencanakan dan melaksanakan pendanaan Danamon serta pengembangan dan penerapan strategy dan produk <i>cash management</i>, produk dan layanan <i>trade finance</i> dan jasa <i>custodial bank</i>.</p>
Michellina Laksmi Triwardhany Direktur	<p>Direktur <i>Consumer Banking</i>, membawahi bidang-bidang tugas <i>Retail & Consumer Banking; Credit Card; Consumer Mass Market</i>.</p> <p>Bertanggung jawab memformulasikan strategi dan memastikan eksekusi serta pencapaian target bisnis. Selain itu, juga bertanggung jawab terhadap progres yang optimal dari <i>Retail Banking</i> dan transformasi kantor cabang.</p>
Satinder Pal Singh Ahluwalia Direktur	<p>Direktur <i>Integrated Risk</i>, membawahi bidang tugas <i>Integrated Risk</i>.</p> <p>Bertanggung jawab memastikan bahwa grup bisnis memahami dan mengelola risiko. Selain itu bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan strategi risiko, ukuran dan <i>underwriting standard</i> untuk seluruh grup bisnis.</p>

Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbaharui setiap tahun. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik yang diakomodasi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Anggota Direksi

Direksi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Henry Ho Hon Cheong Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Muliadi Rahardja Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Vera Eve Lim Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Herry Hykmanto Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Kanchan Keshav Nijasure Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Fransiska Oei Lan Siem Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Pradip Chhadva Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Michellina Laksmi Triwardhany Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Satinder Pal Singh Ahluwalia Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Direksi wajib mengungkapkan jabatan atau posisi lainnya yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbarui setiap tahun. Tidak termasuk rangkap jabatan bagi Direksi yang memiliki tanggung jawab pengawasan pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional dan menjadi Dewan Komisaris pada anak perusahaan. Seluruh anggota Direksi Danamon tidak memiliki jabatan rangkap yang dilarang sesuai peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bank Umum.

Tata Kelola Perusahaan

Daftar Jabatan Anggota Direksi Danamon di Anak Perusahaan

Nama	Jabatan di Danamon	Jabatan di Perusahaan Anak
Henry Ho Hon Cheong	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Muliadi Rahardja	Direktur	Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Vera Eve Lim	Direktur	Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Herry Hykmanto	Direktur	Nihil
Kanchan Keshav Nijasure	Direktur	Nihil
Fransiska Oei Lan Siem	Direktur	Nihil
Pradip Chhadva	Direktur	Nihil
Michellina Laksmi Triwardhany	Direktur	Wakil Komisaris Utama PT Asuransi Adira Dinamika
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur	Komisaris PT Adira Quantum Multifinance

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi pada Danamon, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lain sebagian besar tidak mencapai 5% dari modal disetor. Berikut ini adalah daftar kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung anggota Direksi:

Pemegang Saham	Bank Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Henry Ho Hon Cheong Direktur Utama	- Jumlah saham yang dimiliki 2.161.500 saham	-	-	-	- Persentase kepemilikan: 0,02% - Jenis Saham: Saham Seri B
Muliadi Rahardja Direktur	- Jumlah saham yang dimiliki 6.405.515 saham	- Bank Central Asia, Tbk, Jumlah Saham yang dimiliki 25.000 - Bank Rakyat Indonesia, Jumlah Saham yang dimiliki 50.000 - Bank Mandiri (Persero), Jumlah Saham yang dimiliki 25.000	-	-	- Persentase kepemilikan saham Danamon: 0,07% - Jenis Saham: Saham Seri B
Vera Eve Lim Direktur	- Jumlah saham yang dimiliki 5.020.500 saham	-	-	-	- Persentase kepemilikan: 0,05% - Jenis Saham: saham seri B
Herry Hykmanto Direktur	- Jumlah saham yang dimiliki 502.256 saham	-	-	-	- Persentase kepemilikan: 0,01% - Jenis Saham: saham seri B

Pemegang Saham	Bank Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Kanchan Keshav Nijasure Direktur	- Jumlah saham Yang dimiliki 1.187.866 saham	-	-	-	- Persentase kepemilikan: 0,01% - Jenis saham: saham seri B
Fransiska Oei Lan Siem Direktur	- Jumlah saham yang dimiliki 1.234.730 saham	-	-	-	- Persentase kepemilikan: 0,01% - Jenis Saham: saham seri B
Pradip Chhadva Direktur	-	-	-	-	-
Michellina Laksmi Triwardhany Direktur	- Jumlah saham yang dimiliki 617.000 saham	-	-	-	- Persentase kepemilikan saham Danamon: 0,01% - Jenis saham Danamon: saham seri B
Satinder Pal Singh Ahluwalia Direktur	-	-	-	-	-

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

- Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Danamon.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Undangan dan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan.
- Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut untuk mengetuai rapat Direksi.
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaaan pendapat tersebut.
- Risalah rapat disimpan dan didistribusikan kepada masing-masing anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan

- k) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- l) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Danamon menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2014, telah dilakukan 39 kali rapat Direksi. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat Direksi dilakukan dengan musyawarah dan mufakat serta tidak terdapat *dissenting opinion*. Direksi telah menyelenggarakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam setiap bulan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan minimal rapat Direksi. Seluruh hasil keputusan rapat didokumentasikan dalam notulen rapat.

Tingkat Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat

Nama	Kehadiran dalam Rapat Direksi (39 kali)	
	Jumlah kehadiran	Tingkat kehadiran
Henry Ho Hon Cheong	35	90%
Muliadi Rahardja	35	90%
Vera Eve Lim	34	87%
Herry Hykmanto	32	82%
Kanchan Keshav Nijasure	35	90%
Fransiska Oei Lan Siem	35	90%
Pradip Chhadva	27	69%
Michellina Laksmi Triwardhany	34	87%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	34	87%

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2014. Seluruh hasil keputusan didokumentasikan dalam notulen rapat-rapat terkait

Tingkat Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Gabungan

Nama	Kehadiran dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris (6 kali)	
	Jumlah kehadiran	Tingkat kehadiran
Henry Ho Hon Cheong	6	100%
Muliadi Rahardja	6	100%
Vera Eve Lim	6	100%
Herry Hykmanto	6	100%
Kanchan Keshav Nijasure	6	100%
Fransiska Oei Lan Siem	6	100%
Pradip Chhadva	6	100%
Michellina Laksmi Triwardhany	6	100%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	5	83%

Agenda Utama dan Hasil Rapat Direksi 2014

No.	Tanggal	Agenda Utama
1.	8 Januari 2014	1. <i>Indonesia Economic Outlook</i> 2014 2. <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) & Pendanaan 3. Laporan Keuangan <i>unaudited</i> 2013 4. RUPS & <i>Strategic Meeting</i> dengan Dewan Komisaris 5. <i>Sub Registry License</i>
2.	22 Januari 2014	1. <i>Sub Registry License</i> 2. Hasil Audit Eksternal 2013 3. <i>Key Performances Indicator (KPI) Measurements & Results</i> 2013 4. Lain-lain: - Komposisi Komite Audit - RUPS- <i>Long Term Compensation plan</i> - Pengunduran diri Ali Yong sebagai Direktur
3.	29 Januari 2014	1. Proyek <i>Drangonfly</i> 2. Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Operasional 3. Informasi mengenai Rapat Dewan Komisaris 4. RUPS 5. <i>Dividend payout ratio</i> 2013 6. Update Regulasi Bursa
4.	12 Februari 2014	1. Proyek <i>Drangonfly</i> 2. Hasil Kinerja Keuangan January 2014 3. Portofolio Anak Perusahaan
5.	19 Februari 2014	1. Skema insentif penjualan 2. Update Regulasi CAR 3. BoC <i>Strategic meeting</i>
6.	26 Februari 2014	1. Update Manajemen Risiko 2. <i>Stress Test</i> 2014 3. Revisi <i>Risk Appetite Statement</i> 4. <i>Job evaluation Committee's Final report</i> 5. <i>Sub Registry update</i> 6. Proyek <i>Drangonfly</i> 7. Update kasus litigasi 8. Skema TD <i>reward</i>
7.	12 Maret 2014	1. Update Audit Internal 2. Hasil Kinerja Keuangan Februari 2014 3. Analisa Saham Danamon 2013 4. Promosi Senior Manajemen
8.	19 Maret 2014	1. SEMM <i>Update-Credit Processing Improvement</i> 2. Review Anak Perusahaan
9.	26 Maret 2014	1. Update Manajemen Risiko 2. <i>Opex Reduction Initiative</i> 2014 3. Kajian pasar global 4. Penunjukan Kepala Divisi SDM
10	2 April 2014	1. <i>Cost reduction</i> 2. Proyek <i>Dragonfly</i> 3. Proyek Pegasus 4. Negosiasi Perjanjian Kerja Bersama
11	16 April 2014	1. Analisa perbandingan Bank 2013 2. Restrukturisasi Modal 3. <i>Cost review</i> 4. Update kasus Litigasi 5. Update <i>Risk profile</i> 6. <i>Property Management, NPAT & BOPO</i>
12	23 April 2014	1. Update Manajemen Risiko 2. Update Manajemen Risiko Operasional 3. Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris 4. <i>Cost update</i> 5. <i>Asset Securitization</i>

Tata Kelola Perusahaan

No.	Tanggal	Agenda Utama
13	29 April 2014	1. <i>Briefing</i> oleh CEO
14	30 April 2014	1. Strategi Manajemen Risiko Q1 2014 2. Perjanjian Kerja Bersama 3. <i>Update</i> Audit Internal 4. <i>update</i> FATCA 5. Rasio <i>dividend payout</i> Perusahaan Anak
15	06 Mei 2014	1. <i>Update</i> Manajemen Risiko 2. <i>Update</i> Manajemen Risiko Operasional 3. <i>Update</i> kasus Litigasi
16	13 Mei 2014	1. April 2014 <i>Financial Performance</i> 2. Penunjukan <i>provider</i> asuransi kesehatan
17	28 Mei 2014	1. <i>Update</i> Manajemen Risiko 2. <i>Update</i> Manajemen Risiko Operasional 3. <i>Update</i> kasus Litigasi 4. AMEX 5. Penunjukan Direktur Anak Perusahaan
18	04 Juni 2014	1. Hasil <i>Stress Test</i> 2014 2. AMEX 3. Premi Asuransi <i>Car Ownership Program</i> 4. Agenda Rapat Dewan Komisaris 5. Proyek inisiatif dan evaluasi <i>Line of Business</i> 6. Tugas dan Tanggungjawab Direksi
19	11 Juni 2014	1. Kinerja Keuangan Mei 2014 2. <i>Cost Review</i> 3. <i>Long term incentive</i> (LTI)
20	18 Juni 2014	1. Analisa perbandingan bank-bank Q1 2014 2. Dampak dari peraturan baru OJK tentang asuransi kendaraan 3. <i>Budget</i> IT Capex
21	25 Juni 2014	1. <i>Update</i> Manajemen Risiko 2. Revisi rencana bisnis bank 2014 ke OJK
22	18 Juli 2014	1. Kinerja keuangan Juni 2014 2. <i>Update</i> Audit Internal 3. Peraturan perbankan mengenai kepemilikan bank oleh pihak asing
23	23 Juli 2014	1. <i>Update</i> Manajemen Risiko 2. Gedung baru kantor pusat Danamon 3. Likuiditas
24	13 Agustus 2014	1. Kinerja Keuangan July 2014 2. Program transformasi bisnis 3. <i>Update</i> anak perusahaan
25	20 Agustus 2014	1. Sekuritisasi aset 2. <i>Communication strategic plan</i>
26	27 Agustus 2014	1. <i>Update</i> Manajemen Risiko Operasional 2. <i>Update</i> Manajemen Risiko 3. <i>IT Strategic plan</i> 2014-2018
27	10 September 2014	1. Analisa Perbandingan bank-bank 2. 2014-2015 <i>financial direction</i> 3. <i>Mobile banking</i> 4. Pengunduran diri Minhari Handikusuma sebagai Direktur
28	17 September 2014	1. Kinerja Keuangan Agustus 2014 2. Asumsi makro dan perencanaan budget 3. <i>Performance Appraisal Results</i> dan <i>Promotion</i> proposal tengah tahunan 2014
29	24 September 2014	1. <i>Update</i> Manajemen Risiko 2. <i>Update</i> Kasus Litigasi
30	1 Oktober 2014	1. <i>Preliminary review budget</i> IT dan CREM 2015 2. Proyek Merdeka 3. Penyelesaian kasus litigasi

No.	Tanggal	Agenda Utama
31	7 Oktober 2014	1. <i>Preliminary review budget</i> 2. <i>Property/Real estate management</i>
32	15 Oktober 2014	1. Skema kerjasama keuangan <i>Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)</i> 2. <i>Preliminary review budget</i> 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
33	22 Oktober 2014	<i>Review budget Bank 2015</i>
34	29 Oktober 2014	1. <i>Update Manajemen Risiko</i> 2. <i>2014 Opex outlook reduction</i> 3. <i>Review budget 2015</i>
35	05 November 2014	1. Kinerja Keuangan Oktober 2014 2. <i>Update Kasus Litigasi</i>
36	12 November 2014	1. <i>Update Audit Internal</i> 2. Laporan LPS 3. Lain-lain: - <i>XLBR dan Syariah business unit reporting</i> - <i>Stress test NPL</i>
37	17 November 2014	1. Rencana bisnis 2015 2. Proyek merdeka 3. <i>Update penjualan aset</i>
38	26 November 2014	1. <i>Update Manajemen Risiko dan Update Manajemen Risiko Operational</i> 2. <i>Update Stress Test</i> 3. <i>Update Final Budget 2015</i> 4. <i>Update Syariah</i>
39	3 Desember 2014	1. Proyek Pegasus 2. <i>Update Sistem Informasi Debitur</i>
40	9 Desember 2014	1. Kinerja keuangan November 2014 2. <i>IT Project Cost for Business Transformation</i>

Kehadiran Anggota Direksi dalam RUPS Tahunan

Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan 2014. Seluruh anggota Direksi hadir pada penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tahun 2014

Direksi Danamon telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berfokus pada hal-hal berikut:

- Menjalankan bisnis sesuai dengan *Risk Appetite Statement* dan strategi bisnis yang telah ditetapkan.
- Memastikan struktur pendanaan yang kuat dengan fokus pada peningkatan Tabungan dan Giro.
- Pengelolaan LDR sesuai dengan dinamika bisnis dan pasar dengan tetap memenuhi batasan LDR yang ditetapkan regulator.
- Menjalankan bisnis Danamon dengan biaya operasional yang efisien.
- Melakukan transformasi bisnis yang bertujuan untuk menyempurnakan model bisnis dan operasional yang lebih efisien dan efektif.
- Kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku dan tindak lanjut temuan Audit Eksternal.
- Peningkatan pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan evaluasi terhadap hasil *Self Assessment Good Corporate Governance*.
- Pemantauan program-program kepedulian sosial yang dilakukan melalui Yayasan Danamon Peduli.

Tata Kelola Perusahaan

Prosedur Pelaksanaan, Kriteria, dan Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Anggota Direksi

a. Penilaian secara Individual

Penilaian terhadap masing-masing anggota Direksi dilakukan berdasarkan target pencapaian (*goal setting*) dan KPI (*Key Performance Indicator*) yang sudah disepakati bersama pada saat awal tahun sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. KPI (*Key Performance Indicator*) masing-masing anggota Direksi mengacu pada 4 (empat) kriteria penilaian, yaitu: *Financial*, *People*, *Process* dan *Customer*. Pembobotan kriteria penilaian berbeda antara satu direktur dengan direktur lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yang dilakukan oleh Direktur Utama.

b. Penilaian secara Kolektif

Penilaian terhadap Kinerja Direksi secara keseluruhan dilakukan oleh Komite Nominasi. Penilaian Komite Nominasi mengacu pada kriteria yang terkait dengan kinerja keuangan, pemenuhan cadangan, kewajaran, dengan *peer group*, signifikansi hasil audit, kepatuhan terhadap peraturan, dan pertimbangan sasaran serta strategi jangka panjang Danamon.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengelolaan Danamon sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan pengelolaan Danamon dilakukan untuk kepentingan Danamon dan sesuai dengan maksud dan tujuan Danamon.
- Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada regulator.
- Pertumbuhan bisnis dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang baik.
- Tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat, terbaru dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lainnya.

Opini Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri perbankan yang terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang melamban, likuiditas pasar yang sangat ketat, serta permintaan komoditas ekspor utama Indonesia yang menurun signifikan di pasar global. Di tengah berbagai sentimen negatif yang diakibatkan oleh situasi global dan domestik yang kurang mendukung tersebut, kami sangat menghargai dan puas dengan kinerja Direksi yang senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian di semua aspek dalam menjalankan operasional dan bisnis perusahaan selama tahun 2014. Pendekatan dan kebijakan yang diambil oleh Direksi ini tentunya akan memperkuat kemampuan dan kesiapan Danamon dalam mengembangkan bisnisnya pada saat yang lebih tepat di tahun-tahun mendatang.

Total portofolio kredit tumbuh menjadi Rp 139 triliun dimana Direksi memprioritaskan kualitas kredit yang tercermin dari rasio *non performing loan* yang relatif terkendali dan rendah. Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga tumbuh menjadi Rp118 triliun dengan rasio tabungan dan giro terhadap total dana pihak ketiga (*CASA Ratio*) yang lebih baik di tingkat 49%. Manajemen juga berhasil melakukan pengelolaan rasio total pinjaman terhadap total pendanaan (*loan to deposit ratio*) yang ideal dan seimbang di angka 92,6% dengan tetap memperhatikan dinamika pasar serta kepatuhan terhadap regulasi.

Laba setelah pajak di tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun lalu menjadi Rp2,6 triliun. Dewan Komisaris menyadari beratnya tantangan yang dihadapi, dan kami sangat mengapresiasi inisiatif pengelolaan biaya yang lebih efisien dan bijaksana yang telah dilakukan oleh Direksi di tengah penurunan margin yang dialami perusahaan. Hal ini mencerminkan kebijaksanaan serta cepat tanggapnya Direksi dalam menghadapi situasi yang ada. Kami juga sangat mendukung dan menghargai inisiatif transformasi model bisnis yang tengah dilakukan oleh Direksi dan berkeyakinan bahwa inisiatif ini akan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perusahaan. Terkait dengan permodalan, kami berpendapat bahwa rasio kecukupan modal Danamon sangat memadai dimana hal ini tidak terlepas dari perencanaan dan pengelolaan permodalan yang sangat baik oleh Direksi.

Tata kelola perusahaan merupakan bagian yang sangat esensial dalam menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan nilai perusahaan. Sehubungan dengan hal ini, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi dan sangat bangga atas praktek tata kelola perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi selama tahun 2014. Hal ini tercermin dari penghargaan yang diterima oleh Danamon sebagai *Best Company for Corporate Governance* berdasarkan hasil penilaian Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dengan menggunakan acuan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*. Selain itu, Danamon juga meraih juara satu *Annual Report Award* yang merupakan penghargaan Laporan Tahunan paling bergengsi di Indonesia.

Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan Remunerasi Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Danamon dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, *industry comparison*, dan kinerja Danamon. Rekomendasi Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Proses penetapan Remunerasi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut:



Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi menerima paket remunerasi yang dibayarkan secara berkala, terdiri dari Gaji, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kendaraan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti, dan Tantiem.

Remunerasi dan Fasilitas lain Anggota Direksi (dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	2014		2013		2012		2011		2010	
		Nominal	Orang								
1	Gaji dan Fasilitas	54.256	9	58.423	11	32.703	12	33.301	12	35.411	11
2	Tantiem *	33.481	9	54.563	11	36.960	12	32.066	12	34.731	11
3	LTCP *	-		18.800		29.498		28.005		22.838	
4	Tunjangan lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, Asuransi kesehatan, lainnya)										
	a. dapat dimiliki	3.315	9	3.587	11	3.664	12	3.739	12	3.600	11
	b. tidak dapat dimiliki	6.505	9	6.824	11	7.134	12	7.363	12	7.200	11

Catatan:

Sejak 1 Januari 2013 sistem penggajian telah menggunakan sistem bruto

* akrual

Remunerasi Anggota Direksi Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	2014	2013	2012	2011	2010
Di atas 2 miliar	9	11	11	12	11
Di atas 1 miliar sampai dengan 2 miliar	-	-	-	-	-
Di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar	-	-	-	-	-
Di bawah 500 juta	-	-	-	-	-

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Program pengenalan bagi Direksi baru dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai Danamon, kode etik, struktur organisasi, *lines of business*, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan-peraturan perbankan. Program orientasi tersebut dilakukan melalui pemberian *On-Boarding Pack* dan pemahaman singkat oleh unit bisnis dan unit pendukung lainnya secara tatap muka. Selama tahun 2014 tidak ada anggota Direksi baru.

Program Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Direksi

Danamon memberi kesempatan kepada anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, *workshop*, dan *conference* dalam mengembangkan kompetensi, profesionalisme dan wawasan secara berkesinambungan.

Selama tahun 2014, anggota Direksi telah mengikuti pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* sebagaimana berikut:

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Henry Ho Hon Cheong	RMB Future	ABC Bank China	China	25 April 2014
	Global Financial Services Investor Conference	DB	USA	27-29 Mei 2014
	Emerging Markets Institute Workshop	INSEAD	Jakarta	2 Desember 2014
Muliadi Rahardja	Executive Compensation Seminar	Tower Watson	Jakarta	19 Februari 2014
	IBM Leadership Forum Ind	IBM	Jakarta	24 April 2014
Vera Eve Lim	Bank Capital Under Basel Conference	Marcus Evans	Singapore	21 Januari 2014
	Asian Financial Congress (AFS) 2014	IDC Financial Insights	Singapore	27 Februari 2014
	17th Annual Credit Suisse Asian Investment Conference	Credit Suisse	Hong Kong	26-17 Maret 2014
	CLSA Asean Forum	CLSA	Bangkok	8-9 Mei 2014
	CEO/CFO Forum: Future of Finance Profession	ACCA & British Chamber of Commerce Indonesia	Jakarta	10 Juni 2014
	Refreshment of Certification in Banking Risk & Regulation	The Risk Forum School of Finance	Jakarta	15 Agustus 2014
	Investor Summit & Capital Market Expo 2014	OJK & IDX	Jakarta	17 September 2014
RiskMinds Asia 2014	KPMG	Singapura	18-19 November 2014	

Tata Kelola Perusahaan

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Herry Hykmanto	<i>Basel 3 & The Basel Regulatory Framework</i>	BSMR	Jakarta	10 & 11 Februari 2014
	<i>4th Indonesia Trade & Commodity Finance Conference</i>	GTR	Jakarta	24 April 2014
	Seminar Asbisindo-IBEX (Indonesia Banking Expo)2014	ASBISINDO	Jakarta	28 Agustus 2014
	<i>ICC Banking Commission ; Trade Finance Growth Engine For smes</i>	ICC	Istanbul, Turki	3-6 November 2014
	<i>The 3rd Islamic Banking Seminar</i>	OJK-ASBISINDO	Bandung	2 Desember 2014
Kanchan Keshav Nijasure	<i>Refreshment of Certification in Banking Risk & Regulation</i>	<i>The Risk Forum School of Finance</i>	Jakarta	15 Agustus 2014
Fransiska Oei Lan Siem	<i>Danamon Sustainability Workshop</i>	Internal	Jakarta	13 Januari 2014
	<i>OJK Launch of the Corporate Governance RoadMap Corporate Governance</i>	OJK	Jakarta	4 Februari 2014
	<i>FATCA Implementation Assistance Legal Workshop</i>	Internal	Jakarta	18 Februari 2014
	<i>Legal Workshop</i>	Internal	Jakarta	8 April 2014
	<i>OJK-FKDKP Seminar Governance, Risk, Compliance Forum 2014</i>	OJK-FKDKP	Jakarta	15 April 2014
	<i>OJK-Forum Group Discussion, Kejahatan Perbankan Berbasis TI (Cyber Crime)</i>	OJK	Jakarta	13 Mei 2014
	<i>OJK-Forum Group Discussion, GCG Terintegrasi</i>	OJK	Jakarta	20 Mei 2014
	<i>BI-Signing & Sustainability Report Seminar</i>	BI	Jakarta	26 Mei 2014
	<i>Refreshment of Certification in Banking Risk & Regulation</i>	<i>The Risk Forum School of Finance</i>	Jakarta	15 Agustus 2014
	<i>IDX, Halal Bihalal & Workshop "Economic Outlook Pasca Pemilu 2014"</i>	IDX	Jakarta	18 Agustus 2014
	<i>PERBANAS, Moderator IBEX 2014</i>	Perbanas	Jakarta	29 Agustus 2014
	<i>FKDKP, Seminar "Peraturan OJK-Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan"</i>	FKDKP	Jakarta	11 September 2014
	<i>OJK, Risk Governance Summit 2014</i>	OJK	Jakarta	18 November 2014
	<i>OJK, Moderator & Seminar "Literasi Keuangan Perempuan & UMKM"</i>	OJK	Bali	25 November 2014

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Pradip Chhadva	Indonesia <i>Macro Outlook</i> 2014	Bank of America Merrill Lynch	Jakarta	24 Maret 2014
	Indonesia <i>Trade & Commodity Finance Conference</i>	ICC	Jakarta	24 April 2014
	FFH <i>Treasury and Capital Markets Conference</i>	Fullerton	Singapura	2-3 Juli 2014
	<i>Sibos Conference</i>	SWIFT	USA	29 September-2 Oktober 2014
	Barclays Asia Forum 2014	Barclays Hong Kong	Hong Kong	5-6 November 2014
Michellina Laksmi Triwardhany	Manchester United <i>Partner Conference</i> in Manchester	Manchester United	Manchester	13-17 Maret 2014
	BAIN <i>Digital Leaders Summit</i>	BAIN	Singapura	21 Maret 2014
	<i>Refreshment of Certification in Banking Risk & Regulation</i>	<i>The Risk Forum School of Finance</i>	Jakarta	15 Agustus 2014
	Manulife IVEY <i>Leadership Program</i>	Manulife	Singapura	13-14 Oktober 2014
Satinder Pal Singh Ahluwalia	OJK-FKDKP Seminar <i>Governance, Risk, Compliance</i> Forum 2014	OJK-FKDKP	Jakarta	15 April 2014
	<i>Integrated Risk Management Conference</i>	FFH	Singapura	3-4 Juli 2014
	<i>Refreshment of Certification in Banking Risk & Regulation</i>	<i>The Risk Forum School of Finance</i>	Jakarta	15 Agustus 2014
	<i>International Seminar-"Befriending with the Boom-Bust Cycle</i>	LPS	Jakarta	23 September 2014

Suksesi Direksi

Suksesi Direksi dilakukan melalui identifikasi terhadap pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi melalui *Talent Review* Program. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan minimal 2 (dua) orang calon pengganti untuk dievaluasi dan diidentifikasi kompetensi dan *skill gap*-nya kemudian disiapkan program pengembangan yang sesuai. Calon-calon pengganti tersebut akan dikelompokkan dalam *talent inventory* untuk direkomendasikan kepada Komite Nominasi.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Danamon membentuk 8 (delapan) Komite yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh Direksi dalam mengambil

keputusan. Komite-komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Sumber Daya Manusia
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite *Assets & Liabilities*
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite *Fraud*
6. Komite Kepatuhan
7. Komite Manajemen Risiko Operasional
8. Komite Manajemen Modal

Komite Sumber Daya Manusia

Struktur dan Keanggotaan Komite

Diketahui oleh Direktur Sumber Daya Manusia yang beranggotakan:

1. Direktur Utama & *Wholesale Banking*
2. Direktur Keuangan
3. Direktur *Operation*, SME dan *Micro Business*

Tata Kelola Perusahaan

4. Direktur *Consumer Banking*
5. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

Tugas dan tanggung jawab Komite

1. Tugas utama Komite SDM adalah memberikan arahan strategi di bidang Sumber Daya Manusia, membuat kebijakan umum di bidang Sumber Daya Manusia termasuk perubahan-perubahannya, antara lain bidang-bidang sebagai berikut:
 - Ketenagakerjaan
 - Kompensasi dan tunjangan karyawan
 - Manajemen Penilaian Kerja
 - Manajemen Talenta
 - Struktur Organisasi dan jenjang kepangkatan
 - Pelatihan dan pengembangan
 - Pengembangan budaya perusahaan
 - Pengembangan iklim kerja yang baik
 - Pengembangan hubungan karyawan dan Danamon
 - Penyelarasan kebijaksanaan dan sinergi sumber daya manusia dengan anak perusahaan
 - Penunjukan pejabat eksekutif dan perencanaan penerus
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Direksi
3. Menyampaikan risalah rapat kepada Direksi

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite

Anggota Direksi	Kehadiran Rapat Komite SDM (5 kali rapat)	Tingkat Kehadiran
Henry Ho Hon Cheong	5	100%
Muliadi Rahardja	5	100%
Vera Eve Lim	5	100%
Michellina Laksmi Triwardhany	5	100%

Pelaksanaan Kerja Komite Sumber Daya Manusia 2014

Sepanjang tahun 2014, Komite Sumber Daya Manusia mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang mencakup:

1. Evaluasi kerja
2. Arahan untuk penilaian kinerja akhir tahun 2013, kenaikan gaji dan bonus
3. Pengkajian program pajak karyawan
4. Pengkajian asuransi kesehatan
5. Implementasi program tunjangan hidup
6. Pengkajian mengenai cuti bersama dalam rangka hari Raya Idul Fitri
7. Pengkajian anggaran SDM

Komite Manajemen Risiko

Struktur dan Keanggotaan Komite

Diketuai oleh Direktur *Integrated Risk* yang beranggotakan:

1. Direktur Utama & *Wholesale Banking*
2. Direktur Kepatuhan
3. Direktur *Operation, SME & Micro Business*
4. Direktur *Consumer Banking*
5. Direktur Keuangan
6. Direktur *Treasury & Capital Market*
7. Direktur Teknologi Informasi
8. Direktur Sumber Daya Manusia

Tugas dan tanggung jawab Komite

1. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.
2. Menetapkan rencana, arahan, kebijakan dan strategi manajemen risiko Danamon dan anak perusahaan.
3. Memastikan seluruh kegiatan Danamon sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
4. Menetapkan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

5. Menentukan metodologi manajemen risiko yang paling sesuai untuk pengelolaan risiko, menentukan pembentukan cadangan melalui kebijakan untuk mengakomodasi potensi risiko yang *inherent* dan memastikan ketersediaan prosedur pemulihan dari bencana.
6. Memantau pengembangan kebijakan dan strategi risiko dan merekomendasikan kepada Direksi untuk persetujuan atas keseluruhan strategi, kebijakan inti, proses dan sistem manajemen risiko.
7. Mengkaji berbagai portofolio kredit, *market & liquidity*, operasional dan risiko yang signifikan serta melaporkannya kepada Direksi melalui profil risiko dan eksposur risiko Bank secara berkala.
8. Mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko dan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang sejalan dengan perubahan-perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi tingkat kecukupan modal Danamon, tingkat modal anak perusahaan serta profil risikonya.
9. Mengevaluasi struktur organisasi risiko di Danamon dan anak perusahaan untuk memastikan bahwa proses-proses pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite

Anggota Direksi	Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko (12 kali rapat)	Tingkat Kehadiran
Henry Ho Hon Cheong	9	75%
Muliadi Rahardja	11	92%
Vera Eve Lim	8	67%
Herry Hykmanto	11	92%
Kanchan Keshav Nijasure	10	83%
Fransiska Oei Lan Siem	10	83%
Pradip Chhadva	9	75%
Michellina Laksmi Triwardhany	11	92%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	10	83%

Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Risiko 2014

Sepanjang tahun 2014, Komite Manajemen Risiko mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang mencakup:

1. Pembahasan rutin:
 - *Headlines*
 - Portofolio (tingkat bank, *wholesale*, ritel dan *micro business*)
 - Risiko operasional, pasar dan likuiditas
 - Portofolio per unit bisnis
 - Peringkat kredit
 - Konsentrasi portofolio unit bisnis dan industri
 - Obligasi
 - *Watch list* debitur
 - *Dashboard* risiko
2. Pembahasan khusus: perbaikan sistem dokumentasi DSP untuk mempercepat perbaikan kualitas kredit.

Komite Assets & Liabilities

Struktur dan Keanggotaan Komite

Diketaui oleh Direktur *Treasury* dan *Capital Market* yang beranggotakan:

1. Direktur Utama & *Wholesale Banking*
2. Direktur *Consumer Banking*
3. Direktur Keuangan
4. Direktur *Integrated Risk*
5. Direktur Operation, SME & *Micro Business*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Menetapkan ruang lingkup kerja Komite, prosedur rapat, proses kerjanya dan membentuk sub-komite untuk mendukung komite.
2. Menentukan kebijakan dan petunjuk tentang likuiditas, risiko bunga, dan manajemen permodalan di Bank dan anak perusahaannya yang merefleksikan kecukupan likuiditas dan modal, pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Melakukan evaluasi kondisi pasar dan pengaruhnya terhadap kondisi likuiditas Bank, NII, dan permodalan serta menyetujui tindakan paling tepat.
4. Melakukan evaluasi komposisi pendanaan dan menyetujui setiap perubahan dalam strategi dan alternative pendanaan termasuk institusional/struktural pendanaan baru.
5. Melakukan *review* tentang strategi likuiditas, suku bunga dan permodalan yang diajukan oleh TCM, sekaligus memonitor implementasinya, dengan setiap bulannya melakukan evaluasi hal-hal berikut ini:
 - Indikator peringatan dini
 - Pergerakan terkini komponen kunci dari neraca
 - Posisi dan proyeksi likuiditas
 - Analisa deposito
 - Memonitor kebijakan pendanaan darurat (CFP)
 - Update tentang *professional funding*
 - Pembahasan FTP
 - Evaluasi aktifitas AFS
 - Pembahasan limit, target dan indikator risiko pasar
 - Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ALCO
6. Secara berkala, melakukan evaluasi dan menyetujui hal-hal berikut ini:
 - Kebijakan tentang likuiditas, risiko suku bunga pada neraca dan FTP
 - Kebijakan pendanaan darurat
 - Asumsi untuk *stress test* likuiditas
 - Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris semua limit/target/pemicu termasuk AFS yang terkait dengan neraca. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memberi persetujuan untuk limit yang ditetapkan oleh ALCO.
 - Perhitungan *core* untuk suku bunga dan likuiditas
 - Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris semua rencana tindakan koreksi jika terjadi pelampauan limit/pemicu yang terkait dengan neraca.

Rapat Komite *Assets & Liabilities*

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite

Anggota Direksi	Kehadiran Rapat Komite <i>Assets & Liabilities</i> (11 kali rapat)	Tingkat Kehadiran
Henry Ho Hon Cheong	8	73%
Muliadi Rahardja	9	82%
Vera Eve Lim	8	73%
Pradip Chhadva	10	91%
Michellina Laksmi Triwardhany	7	64%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	8	73%

Pelaksanaan Kerja Komite *Assets & Liabilities* 2014

Sepanjang tahun 2014, Komite *Assets & Liabilities* mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang mencakup:

1. Pengelolaan LDR
2. Pengelolaan FTP
3. Kajian batas risiko pasar
4. Manajemen likuiditas USD/IDR
5. Pengelolaan neraca
6. Pengelolaan Pendanaan Profesional
7. Kajian AFS dan MTM
8. CFP *monitoring*
9. *Economic* dan *market review*
10. *Outlook review*
2. Membuat kebijakan IT seperti kebijakan keamanan dan kebijakan manajemen risiko IT.
3. Memastikan agar proyek IT dan rencana strategis IT sejalan dan memastikan prioritasnya.
4. Secara berkala mengkaji indikator tingkat layanan system produksi kelompok termasuk keefektifan kebijakan keamanan, menanggulangi jika terdapat persoalan dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan.
5. Mengkaji dan menyetujui investasi CAPEX dalam konteks strategi, *blueprint*, prioritas dan *roadmap* IT kelompok. Mendefinisikan dan mengimplementasikan persetujuan panduan CAPEX, PAM dan OPEX IT sehingga konsisten dengan kebijakan pengadaan.
6. Memantau perkembangan proyek inti IT Kelompok dengan arahan masing-masing Komite Pengarah Proyek Teknologi Informasi, menanggulangi setiap permasalahan dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan-perbaikan tersebut akan diimplementasikan oleh tim proyek.
7. Mengkaji keefektifan Rencana Mitigasi Risiko atas pelaksanaan investasi IT beserta memastikan kontribusi investasi terhadap bisnis kelompok.

Komite Pengarah Teknologi Informasi Struktur dan Keanggotaan Komite

Diketuai oleh Direktur Teknologi Informasi yang beranggotakan:

1. Direktur Utama & *Wholesale Banking*
2. Direktur Keuangan
3. Direktur *Operation*, *SME & Micro Business*
4. Direktur *Consumer Banking*

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Sehubungan dengan rencana strategis bisnis kelompok, secara berkala mengkaji strategi IT kelompok, termasuk *roadmap* bersamaan dengan sumber daya dan keuangan yang dipersyaratkan. Mengevaluasi dan menyetujui perubahan-perubahan di bidang ini sesuai dengan kebutuhan Kelompok.

Tata Kelola Perusahaan

8. Memastikan alokasi sumber IT yang tepat dan baik. Jika diperlukan untuk menggunakan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan implementasi proyek, KPTI harus memastikan adanya kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan proses memilih dan menunjuk pihak ketiga tersebut.
9. Mengkaji secara rutin manfaat yang diberikan oleh proyek-proyek IT Kelompok kepada berbagai unit bisnis dan fungsi pendukung.
10. Mengkaji secara rutin OPEX dan CAPEX IT kelompok.
11. Mendefinisikan dan mengimplementasikan inisiatif IT termasuk juga Manajemen untuk sistem Informasi yang diperlukan guna mendukung bisnis kelompok.
12. Melakukan penilaian diri sendiri paling tidak setahun sekali untuk menentukan apakah KPTI berfungsi efektif.
13. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilimpahkan oleh Direksi dari waktu ke waktu.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite

Anggota Direksi	Kehadiran Rapat Pengarah Teknologi Informasi (3 kali rapat)	Tingkat Kehadiran
Henry Ho Hon Cheong	3	100%
Muliadi Rahardja	3	100%
Vera Eve Lim	2	67%
Herry Hykmanto	2	67%
Kanchan Keshav Nijasure	3	100%
Fransiska Oei Lan Siem	1	33%
Pradip Chhadva	2	67%
Michellina Laksmi Triwardhany	2	67%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	3	100%

Pelaksanaan Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi 2014

Sepanjang tahun 2014, Komite Pengarah Teknologi Informasi mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang mencakup:

1. Persetujuan Proyek *Rule Based Engine*
2. Persetujuan Proyek *Wholesale Internet Banking*
3. Persetujuan Proyek *Bankwide Middleware*

Komite *Fraud*

Danamon memiliki Komite *Fraud* di tingkat Pusat dan Regional. Di tingkat pusat, Komite *Fraud* menangani pelanggaran dengan nominal di atas Rp1 miliar, termasuk risiko operasional yang material bagi Danamon. Komite *Fraud* tingkat regional menangani *fraud* dengan nominal Rp10 juta sampai dengan Rp1 miliar. Komposisi Komite *Fraud* tingkat Pusat dan Regional adalah sebagai berikut:

Komite Fraud Kantor Pusat

Diketuai oleh Direktur Kepatuhan yang beranggotakan:

1. Direktur *Integrated Risk*
2. Direktur *Operation, SME & Micro Business*
3. Kepala Divisi SKAI
4. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
5. Kepala *Fraud Investigation* unit
6. Direktur/Kepala *Line of Business* terkait

Komite Fraud Regional

Diketuai oleh *Regional Corporate Officer* dibantu dengan seorang Sekretaris yakni Kepala Sumber Daya Manusia Regional yang beranggotakan:

1. *Regional transaction Service Head*
2. *Regional transaction Service Manager*
3. *Regional Segment Head* terkait

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Memutuskan sanksi bagi setiap pekerja Danamon yang melakukan atau terlibat dalam *fraud* dengan memperhatikan peraturan Danamon, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta Kode Etik dan Nilai Budaya Danamon dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Menelaah proses kerja dan kontrol yang ada untuk mengambil langkah-langkah preventif maupun perbaikan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya *fraud*.

Rapat Komite Fraud

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite

Anggota Direksi	Kehadiran Rapat Komite <i>Fraud</i> (6 kali rapat)	Tingkat Kehadiran
Muliadi Rahardja	6	100%
Herry Hykmanto	1	17%
Fransiska Oei Lan Siem	6	100%
Michellina Laksmi Triwardhany	3	50%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	6	100%

Pelaksanaan Kerja Komite Fraud 2014

Sepanjang tahun 2014, Komite *Fraud* mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang mencakup:

1. Pengambilan keputusan sanksi terhadap kasus-kasus *fraud* yang terjadi dalam tahun 2014.
2. Memastikan sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan berlaku.

Komite Kepatuhan

Struktur dan Keanggotaan Komite

Diketuai oleh Direktur Kepatuhan yang beranggotakan:

1. Direktur *Integrated Risk*
2. Kepala SKAI
3. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
4. Kepala UKPN

Tata Kelola Perusahaan

5. Kepala Manajemen Risiko Kredit
6. Kepala Manajemen Risiko Operasional dan *Fraud*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Mengkaji kerangka kepatuhan Danamon guna memantau tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkaji dan mengevaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lainnya yang terkait.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan memastikan ketaatan Danamon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Rapat Komite Kepatuhan

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite

Anggota Direksi	Kehadiran Rapat Komite Kepatuhan (2 kali rapat)	Tingkat Kehadiran
Fransiska Oei Lan Siem	2	100%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	2	100%

Pelaksanaan Kerja Komite Kepatuhan 2014

Sepanjang tahun 2014, Komite Kepatuhan telah melakukan pertemuan dengan pokok pembahasan antara lain:

1. Kajian pelaksanaan Perlindungan Konsumen
2. Permasalahan Sistem Informasi Debitur (SID) dan tindak lanjutnya
3. Pemenuhan FATCA
4. Penyempurnaan proses pengendalian internal.

Komite Manajemen Risiko Operasional

Struktur dan Keanggotaan Komite

Diketuai oleh Direktur *Integrated Risk* yang beranggotakan:

1. Direktur Utama & *Wholesale Banking*
2. Direktur *Operation, SME & Micro Business*
3. Direktur Keuangan
4. Direktur *Treasury & Capital Market*
5. Direktur *Consumer Banking*
6. Direktur Kepatuhan
7. Direktur Syariah
8. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Menyetujui kerangka kerja, strategi dan metodologi *Operational Risk Management* (ORM) untuk risiko operasional.
2. Menyetujui perangkat dan teknik operasional ORM secara umum.
3. Menyetujui tindakan yang diusulkan untuk memperbaiki kegagalan sistem operasional yang signifikan.

4. Memantau perkembangan proyek inti ORM dan *issue* yang berkaitan dengan kejadian yang mempunyai risiko operasional yang signifikan.
5. Memberikan masukan atas langkah penanganan suatu kejadian operasional kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko.
6. Mengkaji keefektifan pelaksanaan kerangka kerja ORM.
7. Menilai dampak yang berkaitan dengan reputasi dari risiko operasional yang teridentifikasi.
8. Mengkaji kerugian operasional yang signifikan dan analisa *trend* begitu pula faktor penyebab untuk menentukan potensi tindakan pencegahan
9. Memperbaharui/meng-*update* peraturan/keputusan dari Bank Indonesia atau peraturan lainnya yang berhubungan dengan *Risk Management* dan akibatnya.
10. Menyetujui keputusan yang bersifat *bankwide* berkaitan dengan *issues/kejadian* risiko operasional.

Rapat Komite Manajemen Risiko Operasional

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite

Anggota Direksi	Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko Operasional (5 kali rapat)	Tingkat Kehadiran
Henry Ho Hon Cheong	3	60%
Muliadi Rahardja	5	100%
Vera Eve Lim	4	80%
Herry Hykmanto	5	100%
Kanchan Keshav Nijasure	5	100%
Fransiska Oei Lan Siem	5	100%
Pradip Chhadva	4	80%
Michellina Laksmi Triwardhany	4	80%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	5	100%

Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Risiko Operasional 2014

Sepanjang tahun 2014, Komite Manajemen Risiko Operasional telah melakukan pertemuan dengan pokok pembahasan antara lain:

- *Policy Hierarchy Implementation*
- Penayangan Video Anti *Fraud* BDI
- *BCM Attestation Report*
- *Deviation Monitoring Report*
- *Counterfeit Case ATM Debit Card*
- Perbaikan dan Tindakan Korektif terkait Kasus *Fraud* di Semarang cabang Sultan Agung
- *Data Leakage Prevention*

Komite Manajemen Modal

Struktur dan Keanggotaan Komite

Diketuai oleh Direktur *Integrated Risk* dan Direktur Keuangan dibantu oleh seorang Sekretaris yakni Kepala Divisi *Financial Planning & Project* yang beranggotakan:

1. Direktur Utama & *Wholesale Banking*
2. Direktur *Treasury & Capital Market*
3. Direktur *Operation, SME & Micro Business*
4. Kepala Bidang *Risk Modelling & Quantative Technique*

Tata Kelola Perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan ICAAP dari Bank Indonesia. Komite juga harus menggerakkan Bank untuk mengimplementasi *best practices* yang terkait.
2. Memastikan bahwa kebijakan manajemen permodalan diperbaharui secara teratur dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Mengawasi penerapan *Risk Appetite Statement* yang telah disetujui Dewan Komisaris serta memonitor dan melaporkan kepatuhan terhadap limit/batas yang telah ditentukan.
4. Memastikan Bank memiliki proses dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan risiko yang material dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan modal, jika ada.
5. Memastikan Bank telah memiliki modal yang tidak hanya memadai untuk memenuhi ketentuan saat ini tetapi juga memenuhi kebutuhan modal berdasarkan perhitungan internal untuk memastikan kelangsungan kecukupan modal bank.
6. Memastikan bahwa posisi modal dilaporkan secara rutin kepada Direksi dan Dewan Komisaris sehingga dapat diambil tindakan apabila diperlukan.
7. Menetapkan proses yang diperlukan untuk mengukur kecukupan modal dan untuk membangun dan melakukan pembaharuan terhadap rencana permodalan Bank. Komite juga harus dapat mengidentifikasi potensi kekurangan modal sehingga rencana permodalan dapat diaktifkan sesuai persetujuan Dewan Komisaris.

Rapat Komite Manajemen Modal

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite

Anggota Direksi	Kehadiran Rapat Komite Manajemen Modal (3 kali rapat)	Tingkat Kehadiran
Henry Ho Hon Cheong	-	-
Muliadi Rahardja	2	67%
Vera Eve Lim	3	100%
Pradip Chhadva	3	100%
Satinder Pal Singh Ahluwalia	3	100%

Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Modal 2014

Sepanjang tahun 2014, Komite Manajemen Modal telah melakukan pertemuan dengan pokok pembahasan antara lain:

- Memastikan Bank memiliki modal yang tidak hanya memadai untuk memenuhi ketentuan saat ini tetapi juga memastikan kelangsungan kecukupan modal Bank berdasarkan perhitungan internal
- Mengawasi penerapan *Risk Appetite Statement*
- Dampak penerbitan peraturan-peraturan OJK terbaru yang terkait dengan permodalan Bank.

HUBUNGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi berpedoman pada kebijakan mengenai hubungan afiliasi dan transaksi afiliasi. Kebijakan ini memastikan bahwa proses transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar serta tidak merugikan kepentingan Danamon maupun pemegang saham minoritas.

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi disyaratkan untuk mengungkapkan setiap rencana transaksi afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya kepada Sekretaris Perusahaan. Rencana transaksi yang material akan dilakukan pengkajian oleh Direktur Kepatuhan dan selanjutnya dilaporkan kepada Komite Audit

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Bank yang terlibat dalam Transaksi Pihak Terafiliasi yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan nilai tertentu wajib melaporkan kepada *Corporate Secretary* dengan tembusan Direktur Kepatuhan. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi, Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Direksi Danamon tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, anggota Dewan Komisaris dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Terdapat 3 (tiga) Komisaris Non Independen yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali yaitu: Ng Kee Choe, Gan Chee Yen dan Ernest Wong Yuen Weng.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali telah diungkapkan dalam tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan GCG ini.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

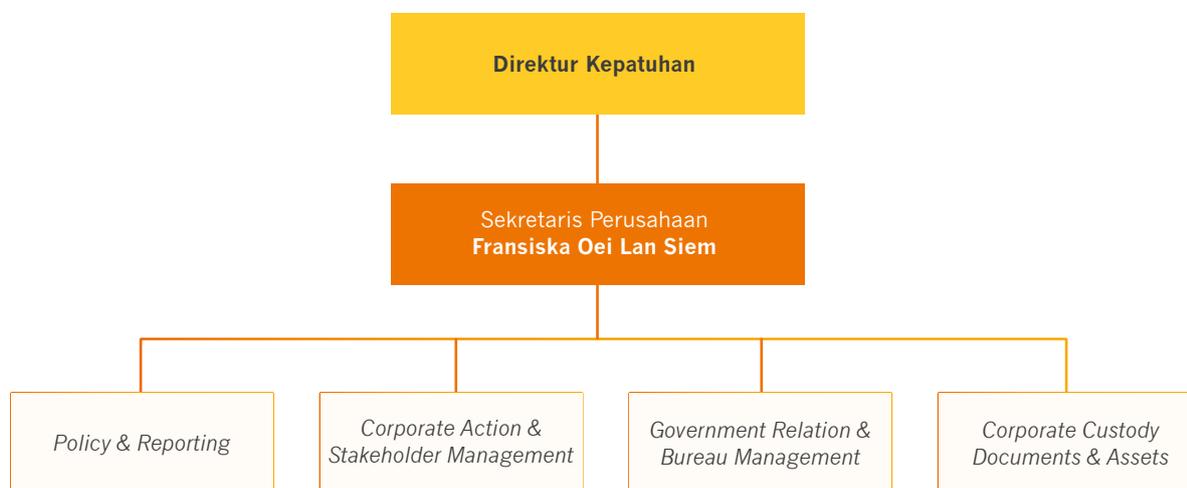
Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang baik antara Danamon dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memastikan terselenggaranya penyampaian informasi material Danamon secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi atas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tata kelola dan kepatuhan Danamon atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal, perbankan dan kegiatan sosial.

Sekretaris Perusahaan Danamon bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan keterbukaan informasi termasuk ketersediaan informasi pada situs *web*, penyampaian laporan ke OJK, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi, memantau dan memastikan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Danamon saat ini dijabat oleh Fransiska Oei Lan Siem sebagai salah satu Direktur Danamon dengan profil sebagai berikut:



Fransiska Oei Lan Siem. Warga negara Indonesia. 57 tahun. Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta, diangkat sebagai Direktur Danamon sejak bulan Mei 2009 dan diangkat kembali sebagai Direktur dalam RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2014. Fransiska memulai karirnya di PT Ficorinvest sebagai Kepala Legal (1982-1984). Bergabung di Citibank N.A. tahun 1984-1997 dan 1998-2000 dan menduduki berbagai posisi. Jabatan terakhirnya di Citibank N.A. adalah sebagai *Chief of Staff* dan Direktur Kepatuhan. Sejak Pebruari 2005 sampai dengan 2009, Fransiska diangkat sebagai Direktur di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Advisor Legal and Compliance BII (2004-2005) dan *Managing Director/Team Pengelola* BII (2000-2001). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri Tbk (2004-2005) dan sebagai Pendiri dan Senior Partner di LBAF Law Firm (2002-2004).

Fransiska Oei Lan Siem
Sekretaris Perusahaan

Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2014, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

- Danamon *Sustainability Workshop*
- OJK *Launch of the Corporate Governance Roadmap Corporate Governance*
- FATCA *Implementation Assistance*
- OJK-FKDKP *Seminar Governance, Risk, Compliance Forum 2014*
- OJK-Forum *Group Discussion, Kejahatan Perbankan Berbasis TI (Cyber Crime)*
- OJK-Forum *Group Discussion, GCG Terintegrasi*
- BI-*Signing & Sustainability Report Seminar*
- BSMR, *Refreshment*
- PERBANAS, Moderator *IBEX 2014*
- FKDKP, Seminar “Peraturan OJK-Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”
- OJK, *Risk Governance Summit 2014*
- OJK, Moderator & Seminar “Literasi Keuangan Perempuan & UMKM”

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2014, Sekretaris Perusahaan Danamon melakukan kegiatan, antara lain:

- Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin dan menyusun notula rapat terkait.
- Menyelenggarakan RUPS dan mengelola keterbukaan dan tata cara pembayaran dividen Danamon.
- Menyiapkan kebijakan pengganti terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan termasuk dalam hal ini kebijakan tentang transaksi afiliasi dan daftar pihak terkait.
- Menyiapkan rekomendasi perubahan atas panduan tata tertib kerja komite pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan.

- Mengkaji laman (*website*) Danamon dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Danamon.
- Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar keterbukaan Informasi Danamon

Danamon secara berkala menyampaikan informasi atau laporan dalam upaya memenuhi persyaratan keterbukaan informasi, antara lain:

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan
07 Januari 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Desember 2013	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
07 Januari 2014	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing jo Surat Bapepam & LK No.S-13264/B/2012 tanggal 14 November 2012 jo Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK
15 Januari 2014	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu-Bapak Ali Yong	Angka 1 Peraturan OJK Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	OJK & BEI
27 Januari 2014	Perubahan Susunan Komite Audit BDMN	Peraturan OJK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit	OJK & BEI
29 Januari 2014	Rencana Pelaksanaan <i>Public Expose</i> BDMN	Butir V Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
07 Februari 2014	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing jo Surat Bapepam & LK No.S-13264/B/2012 tanggal 14 November 2012 jo Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK
07 Februari 2014	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i>	Butir V Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI

Tata Kelola Perusahaan

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan
10 Februari 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Januari 2014	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
11 Februari 2014	Pengunduran Diri Anggota Direksi-Bp. Ali Yong	Peraturan OJK No.IX.J.1 tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar	OJK
13 Februari 2014	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (<i>audited</i>) per 31 Desember 2013	Peraturan OJK Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan OJK Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.	OJK
13 Februari 2014	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (<i>audited</i>) per 31 Desember 2013	Butir III.1.1.1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
14 Februari 2014	Penyampaian Hasil <i>Public Expose</i> BDMN	Butir V Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
19 Februari 2014	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu-Bapak Ali Yong	Angka 1 Peraturan OJK Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	OJK & BEI
25 Februari 2014	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi Seri II-A ke-13	Sarana Pelaporan Elektronik Emiten (E-Reporting) Form E029-Pembayaran Kupon	BEI
25 Februari 2014	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu-Bapak Ali Yong	Angka 1 Peraturan OJK Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	OJK & BEI
05 Maret 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Februari 2014	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
08 Maret 2014	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing jo Surat Bapepam & LK No.S-13264/B/2012 tanggal 14 November 2012 jo Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	OJK
10 Maret 2014	Tanggal Efektif Pengunduran Diri Anggota Direksi-Bp. Ali Yong	Peraturan OJK Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan OJK No.IX.J.1 perihal Pokok Pokok Anggaran Dasar	OJK
20 Maret 2014	Penyampaian Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") BDMN	Peraturan OJK No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik	OJK

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan
28 Maret 2014	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPST	Peraturan No. I-E butir IV.5 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004	BEI
		Peraturan OJK No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik	OJK
03 April 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Maret 2014	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
08 April 2014	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing jo Surat Bapepam & LK No.S-13264/B/2012 tanggal 14 November 2012 jo Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	OJK
14 April 2014	Penyampaian Iklan Panggilan RUPST	Butir VI.5 Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI
		Peraturan OJK No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik	OJK
15 April 2014	Penyampaian Laporan Tahunan 2013	Butir III.2. tentang Laporan Tahunan (Annual Report) Keputusan Direksi PT BEJ Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E terkait Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
		Peraturan OJK Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan.	OJK
15 April 2014	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd	Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.	BEI & OJK
17 April 2014	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Triwulanan I (<i>Unaudited</i>) per 31 Maret 2014 dan Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian BDMN dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014	Peraturan OJK No.X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Peraturan OJK Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.	OJK

Tata Kelola Perusahaan

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan
17 April 2014	Penyampaian <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan Interim yang tidak Diaudit per 31 Maret 2014 PT BDI	Surat Edaran Ketua Bapepam & LK No.SE-17/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Penggunaan <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan untuk semua jenis Industri di Pasar Modal Indonesia dan Peraturan OJK No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.	OJK
17 April 2014	Penyampaian Laporan Keuangan Interim BDMN dan anak perusahaan yang tidak Diaudit per 31 Maret 2014	Angka III.1.6.3 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Busa Jakarta No, Kep-306/BEJ/2007-2004 tanggal 19 Juli 2004.	BEI
05 Mei 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir April 2014	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
09 Mei 2014	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing jo Surat Bapepam & LK No.S-13264/B/2012 tanggal 14 November 2012 jo Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	OJK
2 Juni 2014	Keterbukaan Informasi tentang Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>) PT Bank Danamon Indonesia Tbk,	Peraturan Pencatatan Efek No.I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan Peraturan Pencatatan Efek No.I-E Lampiran Keputusan Dieksi PT BEJ No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2014 tentang Kewajiban Penyampaian Infomasi.	BEI
		Peraturan OJK No.IX.1.4. tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera Diumumkan kepada Publik.	OJK
02 Juni 2014	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Komite Audit BDMN	Memenuhi Peraturan OJK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.	OJK BEI
02 Juni 2014	Penyampaian Keterbukaan Informasi yang Perlu diketahui publik	Sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.	OJK BEI
05 Juni 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Mei 2014	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan
09 Juni 2014	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing jo Surat Bapepam & LK No.S-13264/B/2012 tanggal 14 November 2012 jo Surat Edaran No.SE-02/Bl/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	OJK
03 Juli 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Jun 2014	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
07 Juli 2014	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing jo Surat Bapepam & LK No.S-13264/B/2012 tanggal 14 November 2012 jo Surat Edaran No.SE-02/Bl/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	OJK
18 Juli 2014	Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang tidak diaudit per 30 Juni 2014 PT BDI Tbk, dan Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian BDMN dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014	Peraturan OJK No.X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Peraturan OJK Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.	OJK
18 Juli 2014	Penyampaian Laporan Keuangan Interim BDMN dan anak perusahaan yang tidak Diaudit per 30 Juni 2014 dan Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian BDMN dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014	Angka III.1.6.3 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Busea Jakarta No. Kep-306/BEJ/2007-2004 tanggal 19 Juli 2004.	BEI
18 Juli 2014	Penyampaian <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Yang Tidak Diaudit (<i>Unaudited</i>) per 30 Juni 2014 PT BDI Tbk,	Surat Edaran Ketua Bapepam & LK No.SE-17/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Penggunaan <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan untuk semua jenis Industri di Pasar Modal Indonesia dan Peraturan OJK No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.	OJK
11 Agustus 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Jun 2014	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI

Tata Kelola Perusahaan

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan
11 Agustus 2014	Laporan hasil pemeringkatan atas efek yang bersifat utang obligasi II seri B tahun 2010	Peraturan OJK (ex Bapepam & LK) Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan atas efek bersifat utang dan Peraturan Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi yang merupakan lampiran keputusan direksi PT BEJ Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	OJK BEI
15 Agustus 2014	Keputusan atas pengangkatan anggota Dewan komisaris PT Bank danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan")	Peraturan Nomor X.K.1 lampiran keputusan ketua Bapepam nomr kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik.	BEI OJK
3 September 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Jun 2014	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
3 September 2014	Perubahan Komposisi Komite Audit PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan")	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit	BEI OJK
9 September 2014	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing jo Surat Bapepam & LK No.S-13264/B/2012 tanggal 14 November 2012 jo Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	OJK
16 September 2014	Pengunduran diri anggota Direksi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan")	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (ex-Bapepam & LK) Nomor I.X.J.1 Jo Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.	OJK
17 September 2014	Pengunduran diri anggota Direksi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan")-Bp. Khoe Minhari Handikusuma	Peraturan OJK Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan OJK No.IX.J.1 perihal Pokok Pokok Anggaran Dasar	OJK
30 September 2014	Penyampaian Temasek Review	Memenuhi peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012, tanggal 18 Oktober 2012 tentang transparansi dan Publikasi laporan Bank pasal 22	OJK
02 Oktober 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir September 2014	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI
08 Oktober 2014	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing jo Surat Bapepam & LK No.S-13264/B/2012 tanggal 14 November 2012 jo Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	OJK

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan
17 Oktober 2014	Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang tidak diaudit per 30 September 2014 PT BDI Tbk, dan Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian BDMN dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2014	Peraturan OJK No.X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Peraturan OJK Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.	OJK
17 Oktober 2014	Penyampaian Laporan Keuangan Interim BDMN dan anak perusahaan yang tidak Diaudit per 30 September 2014 dan Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian BDMN dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2014	Angka III.I.6.3 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Busa Jakarta No, Kep-306/BEJ/2007-2004 tanggal 19 Juli 2004.	BEI
17 Oktober 2014	Penyampaian <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Yang Tidak Diaudit (<i>Unaudited</i>) per 30 September 2014 PT BDI Tbk,	Surat Edaran Ketua Bapepam & LK No.SE-17/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Penggunaan <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan untuk semua jenis Industri di Pasar Modal Indonesia dan Peraturan OJK No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.	OJK
28 Oktober 2014	Peyampaian Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui Publik.	Memenuhi Ketentuan dalam angka I Peraturan Nomor X.M.1 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.	OJK
30 Oktober 2014	Peyampaian Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui Publik.	Memenuhi Ketentuan dalam angka I Peraturan Nomor X.M.1 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.	OJK
04 November 2014	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Oktober 2014	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	OJK
10 November 2014	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing jo Surat Bapepam & LK No.S-13264/B/2012 tanggal 14 November 2012 jo Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	BEI

Tata Kelola Perusahaan

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan
12 November 2014	Peyampaian Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui Publik.	Memenuhi Ketentuan dalam angka 1 Peraturan Nomor X.M.1 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.	OJK & BEI
14 November 2014	Laporan hasil pemeringkatan atas efek yang bersifat utang obligasi II seri B tahun 2010	Peraturan OJK (ex Bapepam & LK) Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan atas efek bersifat utang dan Peraturan Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi yang merupakan lampiran keputusan direksi PT BEJ Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	OJK & BEI

FUNGSI KEPATUHAN

Danamon sebagai lembaga jasa keuangan perbankan dan menjadi bagian dari komunitas pada sektor jasa keuangan berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjaga dan menciptakan sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. Mematuhi berbagai kaidah perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan prinsip kehati-hatian melalui peningkatan peran dan fungsi kepatuhan merupakan salah satu wujud komitmen Danamon.

Fungsi Kepatuhan merupakan bagian penting dari struktur tata kelola dan *framework* pengelolaan risiko Danamon. Pelaksanaan fungsi kepatuhan meliputi tindakan untuk mewujudkan budaya kepatuhan, mengelola risiko kepatuhan, memastikan kebijakan dan kegiatan usaha Danamon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan komitmen Danamon kepada regulator.

Pengelolaan risiko kepatuhan secara umum dilakukan sesuai *Enterprise Risk Management Policy* Danamon dengan skema 3 (tiga) lini pertahanan, yang terdiri dari:

- Unit bisnis atau operasional sebagai pertahanan lini pertama merupakan garda depan yang memiliki peranan penting dalam melakukan identifikasi, kontrol dan mitigasi risiko dalam aktivitas bisnis/operasionalnya.

- Satuan Kerja Kepatuhan merupakan pertahanan lini kedua yang independen yang berfungsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Bank serta melakukan sosialisasi, koordinasi dan *advisory* sehingga aktivitas lini pertama dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Satuan Kerja Audit Internal merupakan lini ketiga yang melakukan fungsi pengawasan melalui proses audit untuk memastikan ketepatan, pengelolaan risiko kepatuhan yang dilakukan oleh lini pertama dan kedua.

Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

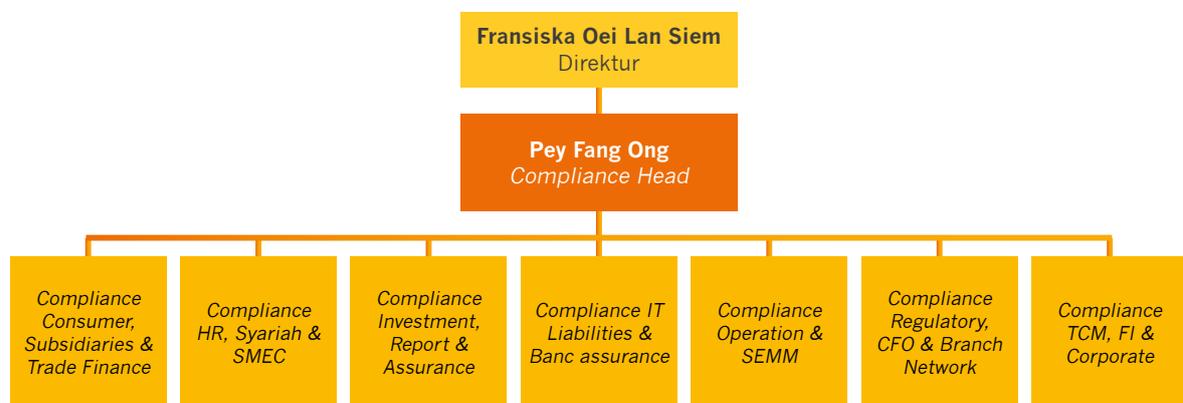
Dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan memiliki kewenangan untuk mencegah ditetapkannya suatu kebijakan dan/atau keputusan yang akan ditetapkan Direksi apabila terindikasi menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pencegahan dapat dilakukan pada saat dilakukan proses kajian, diskusi dan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang akan diambil Direksi.

Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk sebagai satuan kerja independen yang bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta memiliki akses dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Per 31 Desember 2014, Satuan Kerja Kepatuhan didukung oleh 21 orang staf (termasuk Kepala Satuan Kerja Kepatuhan) dengan mayoritas memiliki masa kerja di sektor perbankan di atas 5 tahun. Staf Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti sertifikasi risk management yang sesuai dengan persyaratan hirarki jabatan dengan level sertifikasinya (level 2 sampai dengan level 4).

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan



Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan 2014

Mewujudkan Budaya Kepatuhan

Budaya kepatuhan menjadi dasar etika kerja pada seluruh tingkatan organisasi di Danamon. Penguatan budaya kepatuhan dilakukan secara terus-menerus melalui sosialisasi dan informasi peraturan secara berkesinambungan, pelatihan kepatuhan melalui *e-learning*, fungsi konsultatif terkait kegiatan usaha Danamon serta pelaksanaan *self assessment* kepatuhan (*Compliance Regulatory Self Assessment*).

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses-proses tersebut dilakukan melalui kajian terhadap kebijakan dan aktivitas penghimpunan dana, penyediaan dana serta kegiatan jasa lainnya guna mendeteksi potensi risiko kepatuhan yang ada. Secara berkala dilakukan penilaian terhadap risiko kepatuhan dan kualitas penerapan manajemen risiko yang menjadi bagian dari penilaian risiko Bank yang dituangkan dalam Laporan Profil Risiko Bank.

Dalam upaya memitigasi dan mengendalikan potensi risiko kepatuhan yang ada, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan koordinasi dengan Unit-Unit Operasional terkait, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal melalui pembahasan-pembahasan. Pembahasan terkait risiko kepatuhan juga dilakukan melalui rapat Komite Kepatuhan.

Tata Kelola Perusahaan

Memastikan Kepatuhan dan Menjaga Komitmen

Sebagai salah satu upaya pencegahan, *review* atau kajian atas kebijakan/produk program dilakukan sebelum kebijakan/produk program dijalankan guna memastikan kebijakan maupun aktivitas usaha Danamon tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi dan memastikan tindak lanjut pengkinian kebijakan dan ketentuan internal telah disesuaikan dengan adanya perubahan ketentuan yang berlaku oleh unit kerja terkait juga dilakukan guna menjaga kepatuhan Danamon.

Di tahun 2014, terkait dengan pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen, Satuan Kerja Kepatuhan mendorong penerapan dan penyelarasan kebijakan, prosedur, dokumen pemasaran, perjanjian serta dokumen lainnya sehingga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Selain itu, sebagai salah satu upaya pemantauan kepatuhan terhadap peraturan tertentu di lapangan/unit kerja telah dilakukan uji petik (*sample pick*) atas aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan peraturan tersebut. Pemantauan secara berkala juga dilakukan terhadap kepatuhan pemenuhan *regulatory* parameter utama baik Bank (CAR, BMPK, GWM, NPL, PDN dan limit penyertaan) maupun anak perusahaan serta kewajiban pelaporan.

Danamon juga senantiasa melakukan pemantauan untuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator lainnya telah diselesaikan sesuai komitmen dan target yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap Regulasi Utama

Parameter	Persyaratan BI	Posisi Bank Per Desember 2014	Penjelasan
Rasio Kecukupan Modal (KPMM)	Min. 9% s/d <10% (BUKU 3)	18,17%	Terpenuhi
Giro Wajib Minimum (GWM)	Primer Rp Min. 8%	8,07%	Terpenuhi
	Primer USD Min. 8%	8,13%	Terpenuhi
	Sekunder Min. 8%	11,67%	
Kredit Bermasalah (NPL)	Maks. 5%	1,34%	Terpenuhi
Posisi Devisa Netto (PDN)	Maks. 20%	1,11%	Terpenuhi
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait	Maks. 10%	2,44%	Terpenuhi
Portofolio Penyertaan	Maks. 25%	6,01%	Terpenuhi

Tugas Lainnya

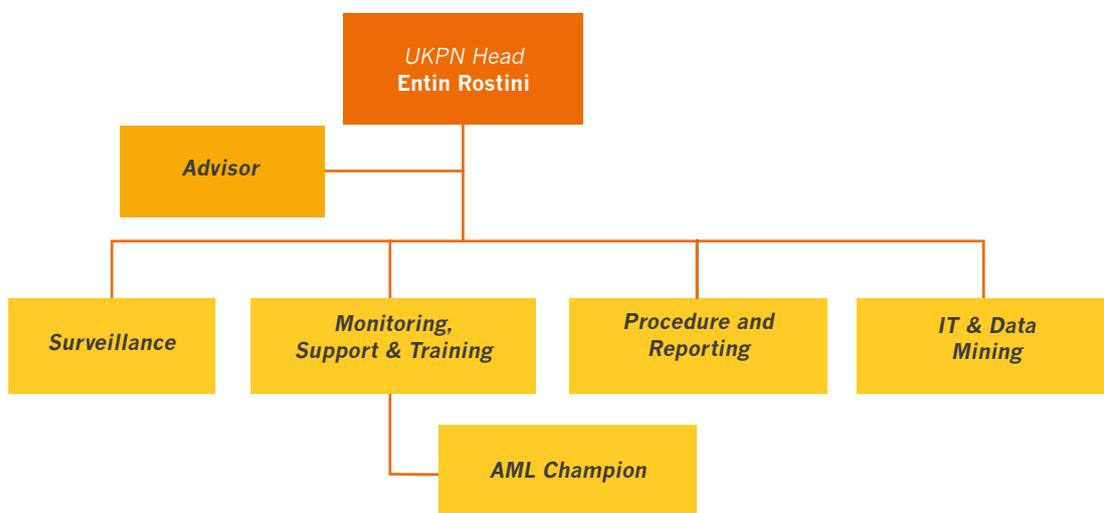
Dalam mendukung pelaksanaan kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan juga berperan aktif sebagai *liaison officer* untuk menjembatani hal-hal terkait kepatuhan Danamon baik bagi pihak internal maupun eksternal. Satuan Kerja Kepatuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian jasa konsultatif terkait pelaksanaan regulasi kepada unit-unit kerja. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi dalam pembahasan dan pengembangan aktivitas/produk baru, pemberian saran/rekomendasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Danamon.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Direksi dan Komisaris berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) agar senantiasa memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait.

Penerapan Program APU dan PPT dikoordinasikan oleh UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah) yang melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Struktur Organisasi UKPN



Danamon secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Program APU dan PPT, baik melalui pengawasan aktif dari manajemen, penyempurnaan kebijakan, pelaksanaan Branch Assessment, penyelenggaraan program pelatihan, penyempurnaan sistem informasi maupun inisiatif-inisiatif lainnya.

Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan Program APU dan PPT selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur

Sebagai upaya pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dan guna menyesuaikan ketentuan internal dengan regulasi maupun *best practices*, pada tahun 2014 telah dilakukan penyempurnaan maupun penerbitan beberapa ketentuan internal terkait APU dan PPT. Ketentuan internal tersebut antara lain mengenai Transaksi Keuangan Dari dan Ke Luar Negeri, Kewajiban keterbukaan informasi nasabah perorangan yang berkewarganegaraan AS, Penggunaan kode transaksi “tunai” dalam pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

2. Branch Assessment

Kegiatan kunjungan *Branch Assessment* (BA) dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan Program APU dan PPT di cabang dan selama tahun 2014 telah dilakukan *Branch Assessment* di 19 kota dengan 116 cabang. Bersamaan dengan kunjungan *Branch Assessment* juga dilakukan pelatihan kepada karyawan (khususnya *frontliners*) dengan total jumlah peserta 672 karyawan.

Tata Kelola Perusahaan

3. Pelatihan dan Sosialisasi

UKPN bersama dengan Danamon Corporate University (DCU) menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada para karyawan, antara lain melalui pelatihan yang bersifat *refreshment* dan pelatihan induksi bagi karyawan baru. Pada tahun 2014 ini selain menargetkan pelatihan untuk staff baru, Danamon juga menggiatkan karyawan di Kantor Pusat untuk turut berpartisipasi dalam pelatihan melalui metode *e-learning*.

Selama tahun 2014, 8.309 karyawan telah mendapatkan pelatihan di bidang APU dan PPT melalui metode *classroom* sebanyak 2.552 karyawan dan melalui metode *e-learning* sebanyak 5.757 karyawan.

4. Pemantauan atas Kelengkapan Data Nasabah

Pemantauan secara berkala atas kualitas dan kelengkapan data nasabah baru dan cabang wajib menindaklanjuti data nasabah yang tidak lengkap.

Pengkinian data nasabah dilakukan berdasarkan target pengkinian yang disusun dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko. Rencana dan hasil pengkinian data nasabah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tahun 2014, per Desember 2014 Bank telah melakukan pengkinian terhadap 11.712 CIF dari total jumlah target pengkinian data sebanyak 12.566 CIF (93,21%).

5. Screening, Pemantauan transaksi dan Pelaporan

Dalam penerimaan nasabah baru, Danamon melakukan proses screening antara lain terhadap OFAC List, Watchlist, Worldcheck dan Politically Exposed Persons. Proses screening juga dilakukan secara berkala atas nasabah existing.

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, Danamon telah didukung oleh sistem informasi yang dapat mengidentifikasi transaksi dan menyediakan laporan secara efektif. Secara berkelanjutan, Danamon menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Laporan Transaksi Keuangan Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) kepada regulator dan tindak lanjut permintaan data dari PPATK/KPK/BNN.

6. Sistem Informasi Manajemen

Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen meliputi pengembangan sistem pelaporan, fungsi *screening* dan *monitoring*, penambahan fitur FATCA, pengembangan sistem pencatatan data dan transaksi Walk In Customer dan database nasabah secara manual (SIPESAT)

7. Know Your Employee (KYE)

Penerapan *Know Your Employee* (KYE) dilakukan dalam proses penerimaan pegawai baru. Selain itu, penerapan KYE juga dilakukan terhadap aktivitas transaksi yang dilakukan karyawan melalui rekening gaji dan non gaji oleh masing-masing unit HR dan UKPN.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI)

Struktur dan Kedudukan SKAI

Audit Internal adalah fungsi independen yang melapor langsung kepada Presiden Direktur dan kepada Dewan komisaris melalui Komite Audit. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Danamon bertujuan memberikan keyakinan yang independen dan objektif serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham.

SKAI Danamon bertekad menjadi *business partner* yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya kontrol yang kuat

untuk mendukung Danamon beserta anak perusahaan mencapai tujuan jangka panjang dengan merujuk kepada Praktik terbaik Internasional. SKAI Danamon membantu manajemen mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Sesuai dengan *Internal Audit Charter* yang telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, SKAI Danamon memiliki akses yang tidak terbatas atas seluruh kegiatan, fungsi, catatan, properti dan personil dari Perseroan dan anak perusahaan. Ruang lingkup Audit Internal meliputi seluruh entitas audit di Danamon dan anak perusahaan.

Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian dan pengelolaan risiko, SKAI Danamon akan melaporkan temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan. Setiap bulan, ringkasan temuan audit dipresentasikan kepada Komite Audit dalam forum rapat Komite Audit yang juga dihadiri oleh perwakilan Direksi terkait. Risalah rapat Komite Audit disampaikan ke seluruh Direksi dan Komisaris. Selain itu, SKAI juga melaporkan kegiatan audit kepada Direktur Utama secara berkala.

Dalam melaksanakan fungsinya, SKAI Danamon sepenuhnya merujuk pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Audit* (IPPF) dari The Institute of Internal Auditors (IIA).

Pengangkatan, Pemberhentian dan Dasar Hukum Penunjukan Kepala SKAI

Merujuk kepada ketentuan SPFAIB dari Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam Internal Audit Charter yang ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disertai dengan alasan pengangkatan/pemberhentian.

SKAI Danamon dipimpin oleh Antony Kurniawan yang diangkat sejak tanggal 1 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. No Kep-Dir.Corp. Sec-011 tentang Penunjukan Kepala SKAI.



Antony Kurniawan
Kepala Satuan Kerja
Audit Internal

Antony Kurniawan Bsc, MSc memiliki gelar sarjana dari Iowa State University, Ames, Iowa, USA dan meraih gelar Master dari Columbia University, New York, USA. Beliau memiliki pengalaman berkarir di industri perbankan lebih dari 20 tahun, termasuk di dalamnya 14 tahun berkarir di Citigroup. Pengalaman audit selama 5 tahun sebagai Citigroup Regional Audit (di Singapura dan Pilipina dengan area liputan di 11 negara); dan pernah menjabat sebagai Operational Risk Management Head Danamon selama 3 tahun dan sebagai Mass Market Control & Fraud Head selama 2 tahun.

Beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal Danamon sejak tahun 2010.

Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organisasi SKAI Danamon



Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang SKAI

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Sesuai dengan *Internal Audit Charter* yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, SKAI memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Mengembangkan rencana audit tahunan dengan metodologi berbasis risiko, termasuk risiko dan pengendalian yang diidentifikasi oleh manajemen. Mengimplementasikan rencana tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas khusus;
- Meningkatkan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan sertifikasi profesional yang memadai serta pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas audit;
- Menyusun dan menyampaikan laporan ke OJK, berupa: Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit semesteran, Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha, serta Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank serta perbaikannya;
- Menetapkan proses tindak lanjut untuk memonitor dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif; dan

- Melakukan investigasi terhadap indikasi *fraud* di dalam bank termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain serta melaporkan hasilnya kepada manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Wewenang SKAI

Sesuai dengan *Internal Audit Charter*, SKAI memiliki kewenangan, antara lain:

- Akses yang tidak terbatas ke semua aktifitas, fungsi, catatan, kekayaan dan personal dari Danamon dan anak perusahaan;
- Memiliki akses penuh ke Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
- Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup pekerjaan dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit; dan
- Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui.

Metodologi Audit Internal

Dalam pelaksanaan Audit Internal, SKAI telah menerapkan Audit Internal berbasis Risiko (Risk based Internal Audit). Penerapan Audit Internal Berbasis Risiko dimulai dari perencanaan program audit internal secara komprehensif dimana pelaksanaan Audit Internal dilakukan berdasarkan prioritas atas entitas-entitas yang dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi. Untuk menunjang hal itu, SKAI telah memanfaatkan Teknologi Informasi terkini di bidang Audit

Internal yang mampu melakukan asesmen risiko (*Risk Assessment*) baik secara makro maupun secara mikro (*Macro Risk Assessment* dan *Micro Risk Assessment*) terhadap entitas-entitas yang ada di Bank. Berdasarkan *Macro Risk assessment* yang dikombinasikan dengan *Audit Framework*, SKAI menyusun Rencana Audit tahunan, dimana dalam proses tersebut ditetapkan entitas-entitas yang akan diaudit, jadwal pelaksanaan audit serta staff dan *logistic* yang dibutuhkan. Kemudian, dengan menggunakan *Micro Risk Assessment*, dilakukan ekstraksi data yang diperoleh dari *Core Banking System* untuk menentukan pengambilan sampel.

Fokus Internal Audit Tahun 2014

SKAI telah memfokuskan kegiatan Audit, sebagai berikut:

1. Melanjutkan audit pada entitas berisiko tinggi dan entitas yang mempunyai jaringan cabang yang luas serta cabang-cabang anak perusahaan;
2. Meningkatkan dan memperluas fungsi analitik, serta kapasitas infrastruktur dan keahlian di bidang analitik;
3. Meningkatkan kualitas audit dengan cara meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan, seminar maupun sertifikasi profesional;

4. Meningkatkan dan menyempurnakan metodologi audit yang berbasis risiko, melanjutkan proses *quality assurance* serta mempelajari praktik-praktik terbaik audit internal di industri perbankan sebagai pembandingan.

Kegiatan SKAI Danamon pada Tahun 2014 Pelaksanaan Audit

Selama tahun 2014, SKAI Danamon telah melaksanakan audit atas 746 entitas audit (103% dari rencana audit tahun 2014) yang mencakup:

1. 61 entitas audit di Kantor Pusat, yang meliputi aspek perkreditan, bisnis, produk, operasional, *support* dan Teknologi Informasi serta termasuk kantor pusat group Adira.
2. 275 entitas audit cabang dan wilayah, yang meliputi Kantor Pelayanan Wilayah, *Unsecured Personal Loan Region*, cabang konvensional, cabang Syariah, cabang Syariah Gadai (Solusi Emas Syariah) dan cabang group Adira.
3. 410 entitas Danamon Simpan Pinjam yang terdiri atas 61 *Cluster Self Employed Mass Market* (SEMM), 310 Unit SEMM, dan 39 *Collateral Document Custody* (CDC).

Rencana & Realisasi Pemeriksaan Audit per 31 Desember 2014

Kegiatan Audit	Rencana Audit 2014	Realisasi Audit 2014			Total Realisasi
		Jan-Jun	Jul-Des		
I. Audit Rutin					
a. Total Audit Kantor Pusat (Incl. Adira Group)	65	38	23	61	94%
b. Audit Cabang:					
· Cabang Konvensional (termasuk cabang Adira Group)	267	154	121	275	103%
· <i>Self Employed Mass Market</i>	394	220	190	410	104%
Total Audit Cabang	661	374	311	685	104%
Total Audit Rutin	726	412	334	746	103%
II. Audit Investigasi					
Total Audit Investigasi		8	39	47	

Tata Kelola Perusahaan

Fungsi Konsultasi SKAI

1. Memenuhi permintaan unit bisnis sebagai pihak independen untuk melakukan *Pre & Post Implementation Review* terhadap penggunaan Teknologi Informasi yang terkini terkait dengan produk *electronic banking* yang baru diterbitkan.
2. Melakukan sosialisasi *issue-issue* terbaru kepada pimpinan bisnis dan operasional di Kantor Wilayah.

Penilaian Lembaga Independen

Sesuai dengan Ketentuan PBI No.1/6/PBI/1999 & 9/15/PBI/2007 aktivitas SKAI akan direview oleh Lembaga Independen setiap 3 tahun sekali dengan menggunakan tolok ukur ketentuan SPFAIB dari Bank Indonesia. Di samping menggunakan tolok ukur SPFAIB yang diwajibkan oleh BI, aktivitas SKAI juga dibandingkan dengan standar IPPF (*International Professional Practices Framework*) dari lembaga IIA (The Institute of Internal Audit) serta dibandingkan juga dengan praktek-praktek terbaik Audit Internal (*leading practices*) dari industri keuangan dan perbankan secara global. Dengan demikian, pelaksanaan *review* kualitas SKAI setiap tiga tahun tidak hanya dilakukan untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia tetapi juga untuk memastikan standar kualitas audit internal yang memadai baik secara nasional maupun internasional.

Hasil Penilaian Lembaga Independen atas Efektivitas dan Cakupan Audit Internal

Hasil penilaian lembaga eksternal (*Quality Assurance Review*) terhadap efektivitas pelaksanaan dan cakupan audit yang dilakukan oleh SKAI Danamon dalam 3 (tiga) periode penilaian (2004-2012) adalah sebagai berikut:

Periode	Lembaga Independen	Hasil Quality Assurance Review
2009-2012	Pricewaterhouse Coopers Indonesia Advisory Sesuai Surat No EngAdv/2012000312/Jun/12/GMM/ZWZ tanggal 13 Mei 2012	Generally Conforms
2006-2009	Ernst and Young Sesuai surat PSS-35562/02 tanggal 4 Mei 2009	Generally Conforms
2004-2006	Ernst and Young Sesuai surat No EYAS-1647/02 tanggal 27 Jun 2006	Generally Conforms

Jumlah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk menjaga standarisasi kualitas sumber daya manusia, SKAI Danamon bersama-sama dengan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyusun *Competency Matrix* baik untuk tingkat auditor maupun tingkat *Team Leader*. Di dalam *Competency Matrix* ini tercantum peta jalan (*roadmap*) bagi setiap auditor dan *Team Leader* dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tingkatan.

Berbagai pelatihan, pengembangan diri dan sertifikasi audit juga telah dilakukan pada tahun 2014, Rata-rata pelatihan (*Soft Skill & Technical Skill*) setiap auditor sampai dengan Desember 2014 adalah 6 hari kerja dengan jumlah karyawan 189 orang.

Sertifikasi Internasional dan Nasional

Auditor yang telah mendapatkan gelar Sertifikasi Internasional & Nasional, sebagai berikut:

Gelar Internasional	Jumlah Auditor
<i>Certified Internal Auditor (CIA)</i>	5
<i>Certification in Risk Management Assurance (CRMA)</i>	2
<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	6
<i>Certified Information System Security Professional (CISSP)</i>	1
<i>Certified Information System Manager (CISM)</i>	1
<i>Certified in the Governance of Enterprise IT</i>	1
<i>Financial Risk Manager</i>	2
<i>Certified Ethical Hacker (CEH)</i>	1
<i>Principal Certified Lotus Professional (PCPL)</i>	1
<i>IBM CAAD (Certified Advanced Application Development)</i>	1

Gelar Nasional	Jumlah Auditor
<i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	81
<i>Risk Management Certification (SMR), Level I</i>	95
<i>Risk Management Certification (SMR), Level II</i>	42
<i>Risk Management Certification (SMR), Level III</i>	6
<i>Risk Management Certification (SMR), Level IV</i>	3

Pelaksanaan Training Tahun 2014

Di bawah ini adalah pelatihan, seminar dan *workshop* yang diikuti oleh staff SKAI:

No	Pelatihan/Seminar/Workshop	Tanggal	Jumlah Peserta
International Training			
1	DLA 3, Insead, Singapore	20-25 April 2014	1
Domestic Training			
1	Sosialisasi <i>Report Writing</i> , Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Roll Out KPW & HO	Januari-April 2014	93
2	Sosialisasi TeamMate R.10.1, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Roll Out KPW & HO	Januari-April 2014	87
3	<i>Credit Risk Management 1</i> , Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	3 Maret 2014	12
4	<i>Credit Risk Management 2</i> , Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	3-4 Juni 2014	3
5	DLA 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	23-26 Juni 2014	4
6	DLA 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	Maret-Juni 2014	3
7	Excel, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Plaza Kuningan	14 & 16 Mei 2014	22
8	IDEA, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Plaza Kuningan	20 Juni 2014	11
9	<i>Market Liquidity Risk Management 1</i> , Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	April-Mei 2014	2
10	<i>Market Liquidity Risk Management 2</i> , Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	April-Mei 2014	3

Tata Kelola Perusahaan

No	Pelatihan/Seminar/Workshop	Tanggal	Jumlah Peserta
11	Motivasi, Plat AB, Yogyakarta	7 Maret 2014	179
12	National Workshop SKAI, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Yogyakarta	6-8 Maret 2014	179
13	Operational Risk Management 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	26 Februari 2014	1
14	Operational Risk Management 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	27 Februari 2014	3
15	Operational Risk Management 3, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	28 Februari 2014	2
16	Pensiun, Mitra Insan Cemerlang, Malang	13-15 Juni 2014	11
17	Risk Management 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	23 Juni 2014	6
18	Risk Management 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	24 Juni 2014	9
19	Sertifikasi Management Resiko 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	Mei-Juni 2014	9
20	Sertifikasi Management Resiko 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	13-14 Mei 2014	1
21	Sosialisasi QA, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Roll Out KPW & HO	Maret-Juni 2014	51
22	Team Building, Hanindo, Yogyakarta	7 Maret 2014	179
20	Sertifikasi Management Resiko 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	13-14 Mei 2014	1
21	Sosialisasi QA, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Roll Out KPW & HO	Maret-Juni 2014	51
22	Team Building, Hanindo, Yogyakarta	7 Maret 2014	179
23	Sosialisasi IPPF, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Roll Out KPW & HO	Agustus-Sep 2014	22
24	DLA 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	1-4 Juli 2014	2
25	DLA 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	15-19 September 2014	1
26	Market Liquidity Risk Management 1 & 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	14-15 Juli 2014	1
27	Risk Management 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	1 September 2014	4
28	Risk Management 2 & 3, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	2 September 2014	9
29	Operational Risk Management 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	23 September 2014	4
30	Influencer, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	17-18 Juli 2014	1
31	Crusial Conservation, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	21-22 Juli 2014	1
32	Fraud & QA for Supervisor, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	6 Agustus 2014	5
33	Effective Communication Skill, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	13 Agustus 2014	5

No	Pelatihan/Seminar/Workshop	Tanggal	Jumlah Peserta
34	7 Habits, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	3-5 Sep 2014	3
35	Danamon Caring Leader, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	8-9 September 2014	2
36	Sertifikasi Management Resiko 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi	Agustus-September 2014	3
37	Analisa Credit, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Plaza Kuningan	25-26 September 2014	18
38	IDEA vs. 9, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Plaza Kuningan	11 & 14 Agustus 2014	11

Rencana Kegiatan Audit Tahun 2015

Sejalan dengan perkembangan bisnis Danamon, SKAI secara terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas *internal audit*, memperkuat fungsi audit melalui berbagai kegiatan serta akan melaksanakan audit terhadap 654 entitas audit mencakup 57 entitas audit Kantor Pusat, 13 entitas audit di Kantor Wilayah, 344 Danamon Simpan Pinjam (DSP-SEMM), dan 240 entitas cabang.

AKUNTAN PERSEROAN/EKSTERNAL AUDITOR

Penunjukan dan Nilai Jasa Akuntan Perseroan

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah mendapat persetujuan RUPS tanggal 7 Mei 2014, yang memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Pelaksanaan audit laporan keuangan Bank dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. KSR-KOM.Corp.Sec-008 tanggal 24 Maret 2014 yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) dengan biaya jasa audit sebesar Rp 4.112.800.000.

Jasa Lain Selain Audit Keuangan

Di tahun 2014, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) tidak memberikan jasa lain selain jasa audit kepada Danamon.

Periode Audit

Akuntan Publik Drs. Hari Purwantono dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) telah melakukan audit laporan keuangan tahunan Bank sebanyak 3 (tiga) periode.

Tata Kelola Perusahaan

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan dan biaya jasa audit yang dikeluarkan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan (Perorangan)	Biaya Audit
2014	Purwanto, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwanto	Rp4,112 miliar
2013	Purwanto, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwanto	Rp3,880 miliar
2012	Purwanto, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwanto	USD400.000
2011	KPMG Siddharta & Widjaja	Dra. Tohana Widjaja, CPA	USD495.000
2010	KPMG Siddharta & Widjaja	Kusumaningsih Angkawijaya, CPA	USD495.000
2009	KPMG Siddharta & Widjaja	Kusumaningsih Angkawijaya, CPA	USD414.700

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit secara fokus mengkaji efektivitas pelaksanaan audit eksternal Bank serta mengevaluasi kualitas proses audit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku dan independensi auditor eksternal tetap terjaga. Di samping itu, Komite Audit membantu memastikan pelaksanaan audit tidak menemui hambatan dan seluruh temuan audit ditindaklanjuti oleh manajemen.

Evaluasi pelaksanaan proses audit eksternal dilakukan melalui pertemuan secara rutin antara Komite Audit dan Kantor Akuntan Publik untuk membahas seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik.

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan Bank dan Anak Perusahaan, Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) telah melakukan fungsinya, antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standard Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan memastikan kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi Yang Berlaku di Indonesia.
2. Mengkomunikasikan hasil temuan audit kepada audit komite, manajemen dan OJK
3. Menjaga independensi selama melakukan penugasan.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan OJK

Selama periode pelaksanaan audit tahun 2014, Danamon menjalin komunikasi terbuka dan memberikan informasi serta data yang lengkap kepada auditor eksternal untuk kepentingan pemeriksaan. Komunikasi dan kerjasama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi terbaru, termasuk perkembangan perpajakan sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar. Saran-saran perbaikan yang diterima dari Auditor Independen juga telah menjadi perhatian Direksi Danamon untuk ditindaklanjuti.

MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Pembahasan dibawah ini merupakan penjelasan singkat mengenai sistem manajemen risiko, jenis risiko dan pengelolaannya serta efektivitas sistem manajemen risiko. Uraian lengkap tentang manajemen risiko diungkapkan secara tersendiri pada laporan tahunan mengenai Tinjauan Operasional-Manajemen Risiko.

Sistem Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko Danamon pada umumnya dilakukan dengan pendekatan holistik terhadap risiko-risiko yang dihadapi Bank. Pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan risiko dilakukan dengan menerapkan prinsip Pendekatan Pertahanan Tiga Lapis. Unit bisnis merupakan pertahanan tingkat pertama yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol dan memitigasi risiko. Sedangkan *Integrated Risk Management Group* dan Satuan Kerja Kepatuhan adalah unit kunci dalam memberikan pertahanan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. Sebagai pertahanan tingkat ketiga adalah Audit Internal yang memastikan unit-unit bisnis maupun pendukung telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya.

Sejalan dengan praktik di industri perbankan dan sesuai Kerangka Manajemen Risiko pada Basel II, Danamon memiliki fungsi Risiko Terintegrasi yang terpusat dan independen dari semua lini bisnis. Fungsi Risiko Terintegrasi mencakup pengelolaan seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan Bank, antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Pengelolaan risiko-risiko ini berada di bawah koordinasi Direktur Bidang Risiko Terintegrasi, dan didukung penuh oleh para manajer risiko yang berpengalaman.

Danamon memiliki *Enterprise Risk Management Policy* yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko Bank dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris serta dikaji secara berkala.

Danamon menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) yang menguraikan tingkat dan karakteristik risiko yang mampu diterima dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab dari para *stakeholders*. Selain itu, pengembangan kapabilitas dari sumber daya manusia manajemen risiko terus dilakukan melalui pelatihan serta sosialisasi standar dan prosedur pengelolaan risiko.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Danamon mengelola risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank dan anak perusahaan, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan serta Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

Pengelolaan risiko di Danamon diuraikan sebagai berikut:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian kredit, *origination* dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.

Danamon memiliki Kebijakan Risiko Kredit yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan risiko kredit bagi lini bisnis dan perusahaan anak dalam menjalankan aktivitas perkreditan. Kewenangan persetujuan kredit diberikan kepada Komite Kredit yang mana masing-masing anggota komite dipilih berdasarkan kualitas, pengalaman dan kebutuhan bisnis. Dalam melaksanakan wewenang persetujuan kredit wajib mematuhi *four eyes principle* yang didasarkan analisa seksama dan didokumentasikan secara baik. Kelayakan nasabah dievaluasi untuk menetapkan batasan kredit. Batas kredit untuk

Tata Kelola Perusahaan

industri dan produk juga ditetapkan untuk memastikan diversifikasi risiko kredit yang luas dan menghindari terjadinya risiko konsentrasi. Bank memantau secara ketat perkembangan portfolio kredit Danamon dan anak perusahaan termasuk batasan maksimum pemberian kredit.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar timbul akibat pergerakan faktor pasar seperti suku bunga dan nilai tukar pada portofolio yang dimiliki Bank baik dari sisi *Asset*, maupun dari sisi *Liabilities*, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.

Risiko Pasar dikelola oleh divisi *Market & Liquidity Risk Management* yang merupakan fungsi independen untuk mengukur, memonitor dan melakukan kontrol terhadap nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Bank.

Penerapan pengelolaan Risiko Pasar mencakup pengelolaan risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga, sebagai berikut:

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar timbul dari adanya posisi neraca dan komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) di sisi aset maupun liabilitas yang timbul akibat transaksi mata uang asing. Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, pembatasan posisi secara internal telah ditentukan di bawah limit pembatasan regulator sebesar 20%.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi yang mengandung risiko tingkat suku

bunga. Bank mengelola risiko suku bunga di Neraca dengan menggunakan metode *Earning at Risk* (EAR), analisis *repricing gap*, dan *Economic Value of Equity* (EVE). *Trading Book* dikelola melalui pengukuran posisi dan pengukuran yang lebih sensitif terhadap risiko seperti PV01 dan MAT limit.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Pengelolaan risiko likuiditas untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stress dapat dipenuhi.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Analisis kesenjangan likuiditas memberikan pandangan terhadap ketidaksesuaian arus kas masuk dengan arus kas keluar pada waktu tertentu. Kondisi ini dikelola secara terpusat oleh Tresuri yang mempunyai akses dan otorisasi secara langsung ke *interbank market*, nasabah besar (institusional) dan professional market yang lainnya, dalam upaya membantu aktivitas utama bisnis Bank di pengumpulan dana dan pemberian kredit.

Untuk melengkapi kerangka kerja, risiko likuiditas diukur dan dikelola pada kondisi normal (*business-as-usual*) dan kejadian kondisi stress. Dengan demikian, Maximum *Cummulative Outflow* (MCO) juga diperkirakan pada kondisi stress dan didukung dengan rencana pendanaan darurat likuiditas (LCP) untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) merupakan forum manajemen senior tertinggi dalam memonitor status likuiditas Bank, yang bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Bank yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku serta menyetujui kerangka limit, mempertimbangkan posisi struktural neraca Bank, serta asumsi yang digunakan untuk pengukuran risiko.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang timbul dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional dilakukan secara terpadu melalui optimalisasi fungsi bisnis dan pendukung dengan melakukan identifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko operasional atas aktivitas produk, proses, jasa, organisasi dan sistem informasinya melalui *Risk Event Table*, *Risk Control Self Assessment (RCSA)* dan *Key Risk Indicator (KRI)*.

Dalam mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi akibat tindakan *Fraud* yang dilakukan baik oleh karyawan internal bank ataupun oleh pihak eksternal, Bank telah membuat kerangka kerja strategi anti *fraud* yang tertuang dalam "*Fraud Management Policy and Framework*" yang sudah diberlakukan secara nasional. Kerangka kerja dan strategi ini sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka kerja ORM, Danamon juga menerapkan *Business Continuity Management (BCM)* untuk mengantisipasi dampak risiko,

apapun penyebabnya, termasuk risiko operasional ekstrim yang jarang terjadi namun berdampak besar, seperti isu negatif tentang likuiditas, pemberitaan negatif tentang Bank, gangguan sistem, bencana alam, dan lain-lain.

Danamon mengadopsi standar kerangka kerja BCM dari *Good Practice Guideline (GPG) Business Continuity Institute (BCI)*, United Kingdom (UK) dan mengacu kepada ISO 22301: *BCMS (Business Continuity Management System)*.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risiko kepatuhan dikelola oleh fungsi kepatuhan yang merupakan salah satu komponen *Integrated Risk Management* Bank. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko melalui kajian atas kebijakan, penyediaan dana dan penghimpunan dana serta aktivitas lainnya. Pengelolaan risiko kepatuhan juga dilakukan terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan baik yang berpotensi denda maupun reputasi.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Pengelolaan risiko hukum dilakukan melalui proses identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko hukum pada lini bisnis, produk, proses dan teknologi informasi yang berdampak pada posisi keuangan maupun reputasi Danamon.

Risiko Hukum Bank berada di bawah koordinasi Divisi Hukum dan dipimpin oleh *General Legal Counsel*. Tim pengelola Risiko Hukum di Divisi

Tata Kelola Perusahaan

Hukum bekerja sama dengan beberapa unit kerja terkait antara lain *Litigation Unit* dan *Bank Access Center*. Secara konsolidasi, tim pengelola Risiko Hukum juga bekerja sama dengan tim pengelola risiko hukum di anak perusahaan Bank.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan secara terintegrasi melalui pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon pemberitaan negatif serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada *stakeholder*. Secara konsolidasi, tim pengelola Risiko Reputasi Bank bekerja sama dengan tim pengelola risiko di anak-anak perusahaan Bank.

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko strategik antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Risiko strategik terkait dengan beberapa bidang: rencana bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan risiko melalui komite-komite:

1. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)

Dengan kewenangan tertinggi pada tingkat Dewan Komisaris, komite ini berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko, eksposur risiko dan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi.

2. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab untuk mengelola risiko keseluruhan Bank dan anak perusahaan dengan melakukan pengembangan strategi risiko, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan.

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi dilakukan terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem, sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan, prosedur, dan limit. Pada tahun 2014, penilaian efektivitas manajemen risiko Bank dan Anak Perusahaan adalah *acceptable* (memadai) dengan tingkat risiko 2 (*low to moderate*).

Direksi dan manajemen senior juga bertanggung jawab menentukan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan memastikan bahwa *Risk Management Framework* telah mencakup kebijakan secara rinci yang mengatur batasan prinsip kehati-hatian secara luas terhadap kegiatan Bank. Danamon juga melakukan *Stress Test* yang merupakan salah satu metode pengukuran risiko dengan memperkirakan potensi kerugian ekonomi Bank berdasarkan kondisi pasar yang abnormal untuk memastikan sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko. *Stress test* dilakukan setidaknya setiap tahun atau ketika timbul peristiwa yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap portofolio Bank dan skenario *stress test* dari regulator.

Berdasarkan tingkat *severity*, faktor-faktor ekonomi makro, skenario *stress test* didefinisikan menjadi tiga kategori: *Mild*, *Moderate*, dan *Severe*. Selain skenario yang dibuat berdasarkan kejadian historis, Danamon juga mempertimbangkan kejadian yang berdampak buruk secara hipotesis dengan bantuan tim ekonom Danamon.

Pencapaian *Integrated Risk* Sepanjang 2014

Sepanjang tahun 2014, berikut adalah pencapaian dalam penerapan Manajemen Risiko.

1. Menjadi salah satu dari 3 bank lain pilihan OJK dan Bank Indonesia sebagai acuan dalam Manajemen Risiko Konsolidasi dengan anak perusahaan.
2. Mengembangkan secara berkesinambungan Sekolah Manajemen Risiko (*Risk Management School*), yang telah dinobatkan sebagai *The Best Bank* dengan Pendidikan Manajemen Risiko oleh Business Review pada tahun 2012 dan Melakukan *roll out* Sekolah Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja Bank
3. Berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 22301:2012-*Business Continuity Management Sytem* (BCMS) lewat 2014 *Surveillance Audit* tanpa *unconformity item*. Catatan: Danamon merupakan Perusahaan pertama di Indonesia & Bank pertama di Asia Tenggara yang bersertifikat ISO 22301:2012-BCMS.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Kredit Kepada Pihak Terkait dan Kredit Berskala Besar per 31 Desember 2014

No.	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Rp Juta)
1.	Pihak terkait	Anak Perusahaan dan Manajemen Inti	769.442,83
2.	Grup/Debitur terbesar	25 Group	12.481.304,56

Selama tahun 2014, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK kepada Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkait baik Individual maupun Kelompok Peminjam. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Danamon mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dalam rangka mengurangi Risiko Konsentrasi, Danamon membatasi konsentrasi pinjaman pada individu, kelompok atau sektor industri. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan anak perusahaan dilakukan secara *arms length* dan sesuai dengan persyaratan komersial normal serta disetujui oleh Dewan Komisaris. Tata cara proses persetujuan dan pelaksanaannya diatur pada kebijakan Transaksi Pihak Terkait No. KepDir-Corp.Sec-015.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian Internal di Danamon dan Anak Perusahaan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi *Asset* dan *Liabilities*, dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara *off site* dan *on site* oleh setiap unit pengendalian internal di setiap Divisi Danamon dan Anak Perusahaan yang disebut Unit *Quality Assurance*.

Pengendalian internal mencakup kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi, yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Danamon dan Anak Perusahaan. Pendekatan yang dilakukan untuk mengukur, memantau dan mengendalikan risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

Tata Kelola Perusahaan

Kerangka kerja Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal di Danamon mengadopsi prinsip pertahanan yang berlapis yang disebut *Three Lines of Defense* yang tertera seperti diagram di bawah ini:

Danamon *Three Lines of Defense*



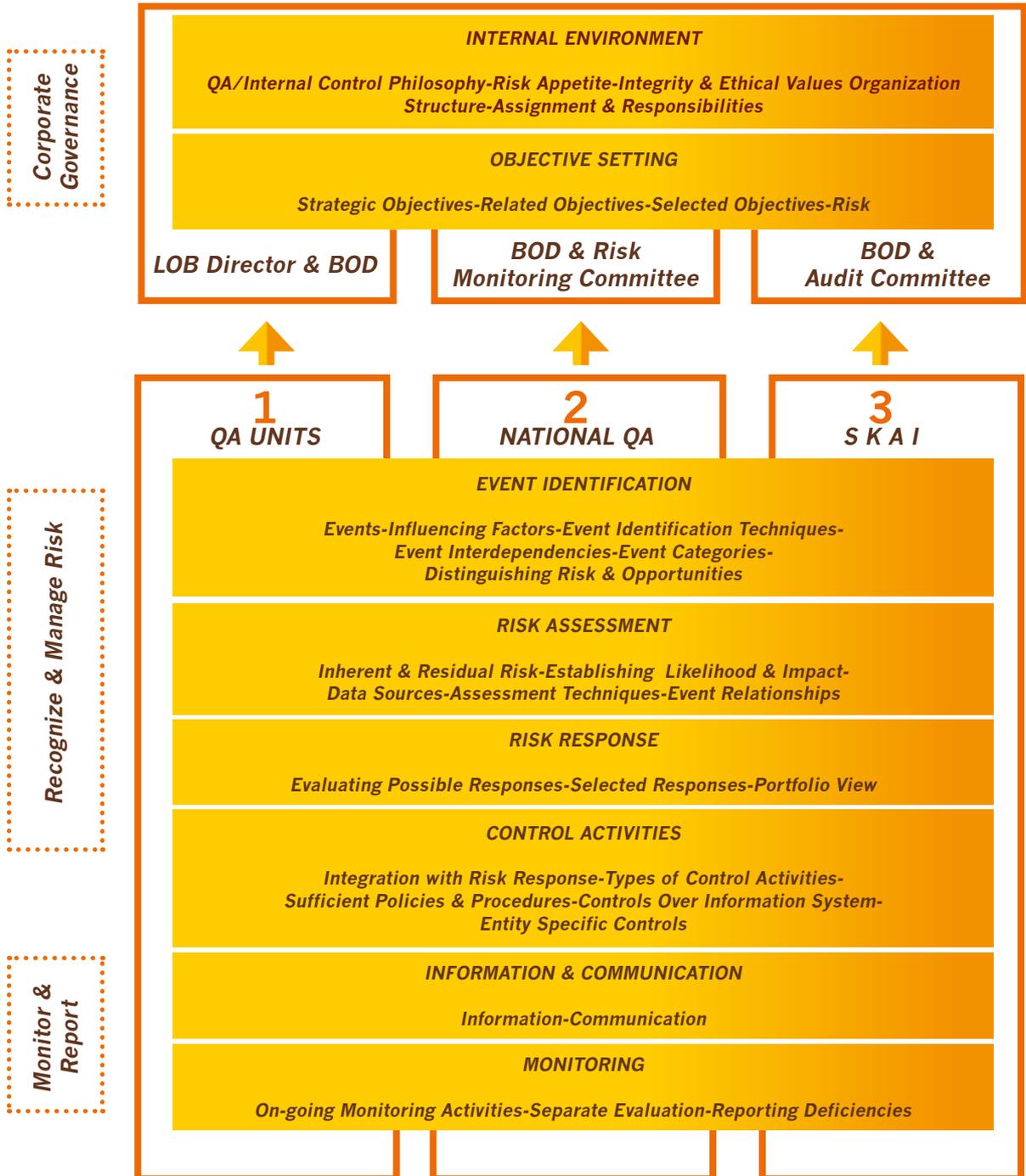
Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

Seluruh unit *Quality Assurance* sebagai pelaksana pengendalian internal di Danamon dan Perusahaan memiliki standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada Kebijakan *Quality Assurance* yang dimiliki Danamon yang dibuat dengan mengadopsi teori COSO dan BIS *Principles on Internal Control Practises*.

Danamon memiliki struktur organisasi yang dibuat dengan baik dan sesuai bagi pengelolaan *quality assurance*. Hal ini didasarkan kepada filosofi bahwa semua fungsi bisnis wajib bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan *quality assurance* dimasing-masing unit bisnis.

Filosofi di atas menjadi dasar penyusunan struktur kerangka kerja QA Danamon melalui penggabungan antara pendekatan Tiga Tingkatan Pertahanan dengan kerangka kerja Pengendalian Internal/ERM berdasarkan COSO seperti gambar di bawah ini:

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Intern sesuai COSO



Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh unit *Quality Assurance* sampai dengan tahun 2014, sudah mencakup divisi-divisi, anak perusahaan dan fungsi pendukung. Divisi-divisi yang berhubungan langsung dengan transaksi nasabah memiliki frekuensi pemeriksaan yang tinggi, sedangkan divisi-divisi kantor pusat, *review* pengendalian internal secara formal hanya dilakukan satu kali setahun.

Program *awareness* mengenai pengendalian internal terhadap unit kerja juga rutin dilakukan oleh unit QA. Pada prinsipnya pengendalian internal bukan hanya merupakan tugas unit Pengendalian Internal (*Quality Assurance*), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan tingkat efektivitas pengendalian internal Danamon, melalui evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistem.

Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu dasar manajemen untuk menetapkan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Evaluasi terhadap tingkat efektivitas sistem pengendalian intern digambarkan melalui *rating audit* yang menjadi dasar dilakukannya perbaikan-perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian kebijakan/prosedur/sistem.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan lengkap mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah dijabarkan dalam Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Uraian singkat kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Topik	Kebijakan	Kegiatan	Dampak Keuangan & Sertifikasi
A.	Lingkungan Hidup	Kebijakan Keberlanjutan poin 1-7 yang meliputi, antara lain, integrasi keberlanjutan dalam bidang lingkungan, pengendalian dampak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Program lingkungan hidup yang berhubungan dengan lingkungan Bank beroperasi Kegiatan Bulan Kepedulian Lingkungan (BKL) dilakukan pada bulan Mei-September 2014 dengan tema "Bersatu untuk Menyelamatkan Lingkungan Demi Masa Depan Bumi yang Lebih Baik." <i>Run and Walk for Recycling</i> yang diikuti oleh karyawan Danamon dan Adira yaitu kegiatan berolahraga lari dan jalan kaki sambil mengambil sampah non organik yang selanjutnya diproses daur ulang Menghitung pengurangan emisi karbon yang dihasilkan dari program pengurangan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Total dana BKL 2014 adalah Rp4.580.548.524,- Saat ini Danamon belum memiliki sertifikasi dalam bidang lingkungan
		Kebijakan, Konsep dan Kerangka Kerja Operasional Yayasan Danamon Peduli dapat dilihat pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di laporan ini.		
		Memo no.B 1/1/ PROC/EM/211 perihal <i>socialisasi video conference</i> dan perjalanan dinas 2012.		

No.	Topik	Kebijakan	Kegiatan	Dampak Keuangan & Sertifikasi
		Memo no.B 58/PA/0614/IMEA perihal Danamon <i>Recycled Paper Initiatives</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mengawal proses 3R (reduce-recycle-reuse) limbah kertas di beberapa kantor pusat Danamon dan Adira Menggunakan recycled paper sebagai bahan baku pengganti kertas untuk collateral perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Dana Yayasan Danamon Peduli untuk Pasar SEJAHTERA 2014 Rp2.711.972.956,- Dana Yayasan Danamon Peduli untuk Pelestarian Ikon Regional tahun 2014 Rp441.007.757,-
B.	Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Keberlanjutan poin 1,2,5,6,7 yang meliputi antara lain integrasi keberlanjutan dalam bidang sosial dan budaya, pengelolaan dampak sosial secara langsung dan tidak langsung. 	Perbaikan sarana dan prasarana sosial	<ul style="list-style-type: none"> Dana Yayasan Danamon Peduli untuk Cepat Tanggap Bencana tahun 2014 Rp261.169.707,-
		<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan, Konsep dan Kerangka Kerja Operasional Yayasan Danamon Peduli dapat dilihat dalam Bab Tanggung Jawab Perusahaan 	<p>Revitalisasi pasar tradisional melalui program Pasar SEJAHTERA</p> <p>Pelestarian Ikon Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Bank Sampah Pembangunan sarana fisik <p>Pengembangan sosial dan kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan dan peningkatan kapasitas Dukungan kepada Majelis Taklim Memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Pasar di level Pemda <p>Pemberdayaan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pembentukan koperasi Memfasilitasi pendirian Payment Point Online Banking yang dikelola oleh warga Marunda dan untuk melayani kebutuhan pembayaran tagihan rutin bulanan warga sekitar Menjalankan Program "Dana Bergulir Sejuta Berdaya" yang bekerja sama dengan Al-Azhar Peduli Umat <p>Cepat Tanggap Bencana</p> <p>Yayasan Danamon Peduli memberikan bantuan langsung kepada pada korban bencana serta menjalin kerjasama dengan organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Al Azhar Peduli Ummat.</p>	

Tata Kelola Perusahaan

No.	Topik	Kebijakan	Kegiatan	Dampak Keuangan & Sertifikasi
C.	Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	<p>Kebijakan Keberlanjutan poin 1, 2, 5, 7, yang meliputi, antara lain, integrasi keberlanjutan dalam proses bisnis dan kebijakan internal, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karyawan, melibatkan karyawan dalam pelaksanaan rencana strategis keselamatan, kesehatan dan keamanan lingkungan kerja bidang sosial dan budaya, pengelolaan dampak sosial secara langsung dan tidak langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep. 10/PHUSK-PKKAD/PKB/1/2013 perihal Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama, Memo no B.7800-HRKP-1213 perihal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2013 Danamon <i>Business Continuity Management</i> (BCM) Policy Ver 2.0/Mar13 Danamon BCM <i>Standard & Principle</i> Ver 1.0/Mar13 	<p>Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Danamon memiliki hubungan yang baik dengan Serikat Pekerja, dan secara berkala perbulan dilakukan pertemuan antara Pengurus Inti Serikat Pekerja Danamon dengan Para Direksi Danamon. Perjanjian Kerja Bersama dirundingkan setiap 2 tahun. Evaluasi Kinerja (<i>performance appraisal</i>) dilaksanakan dua kali dalam setahun. Karyawan memiliki fasilitas asuransi kesehatan. <p>* Keterangan lebih lengkap tentang kegiatan ketenagakerjaan dapat dilihat pada bagian Sumber Daya Manusia dalam laporan ini.</p> <p>Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Health Talk</i>, berupa seminar atau diskusi bagi para karyawan dengan topik yang relevan dengan kesehatan karyawan (seperti gula darah, kolesterol, makanan sehat, penyakit kronis, tulang kropos). Danamon <i>Health Fair</i>, bekerja sama dengan Medicillin serta mendatangkan para penyedia jasa bidang kesehatan untuk layanan terhadap karyawan. Rubrik kesehatan <i>online</i> yang menyediakan informasi kesehatan di lingkungan kerja seperti pentingnya melakukan peregangan (<i>stretching</i>) secara berkala pada saat karyawan bekerja. Menyediakan ruang laktasi sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan di kantor dengan fasilitas yang higienis dan nyaman. Menyediakan pedometer sebagai sarana untuk membantu karyawan mencapai program "Jalan 10.000 Langkah Sehari" untuk tetap menjaga kebugaran. Mengadakan Donor Darah di 80an kota secara serentak dengan melibatkan 2.900 karyawan. Memfasilitasi terbentuknya klub olahraga dan kesenian karyawan seperti futsal, bulutangkis, bolavoli, bolabasket, tenis meja, senam/aerobics, bersepeda, mendaki gunung, <i>bowling</i>, lari, band, nyanyi. Penyelenggaraan Danamon <i>Festival Band</i> dan <i>Choir</i> Antar Wilayah yang melibatkan perwakilan karyawan dari seluruh wilayah di Indonesia. Untuk menumbuhkan kembangkan mental karyawan melalui kesenian. <p>Keselamatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan prosedur dan sumber daya tanggap darurat (bencana alam, kebakaran, huru-hara), termasuk pembentukan Pusat Komando baik tingkat Korporasi maupun Wilayah/Regional untuk Danamon dan Anak Perusahaan. Melaksanakan latihan evakuasi secara berkala. Mensosialisasikan prosedur keselamatan kepada karyawan secara terus menerus, antara lain dengan <i>e-mail blast</i>. Memperhatikan aspek K3L pada setiap gedung yang dibangun atau ditempati Danamon. Memastikan rasio kepadatan (<i>density ratio</i>) jumlah karyawan dalam ruangan memenuhi standar yang berlaku. Memastikan sistem penerangan (<i>lighting</i>), pendingin udara dan sirkulasi udara berjalan dengan baik. Membentuk klub baru bagi Karyawan yang suka terlibat kepedulian bencana banjir. <p>* Keterangan lebih lengkap mengenai Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dapat dilihat pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di laporan ini.</p>	<p>Pada tahun 2014 berhasil mempertahankan perpanjangan Sertifikasi ISO 22301:2012-<i>Business Continuity Management System</i> yang didapatkan di tahun 2013, setelah melalui audit pemeliharaan sertifikasi (<i>surveillance audit</i>) oleh British Standards Institution Group.</p>

No.	Topik	Kebijakan	Kegiatan	Dampak Keuangan & Sertifikasi
D.	Tanggung Jawab Kepada Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Keberlanjutan poin 1, 2, 5 yang meliputi antara lain, integrasi keberlanjutan dalam setiap proses dan aktivitas bisnis, membantu pelaku usaha untuk menjadi mapan dan berkembang, untuk memungkinkan konsumen mengembangkan kesejahteraannya. Kep DIR-DAC-001/21 Februari 2012 mengenai Penunjukan Unit Kerja Terkait dengan Sentralisasi Penanganan Pengaduan Nasabah dan Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Unit Kerja Tersebut. 	<p>Tanggung jawab tentang informasi produk</p> <ul style="list-style-type: none"> Edukasi Nasabah Danamon melaksanakan kegiatan literasi keuangan bersamaan dengan kegiatan temu nasabah dan calon nasabah secara rutin yang diselenggarakan oleh masing-masing unit bisnis setiap tahun dengan pengalokasian waktu khusus melalui penyampaian materi edukasi perbankan di setiap pertemuan. Selama tahun 2014, jumlah peserta yang teredukasi dari kegiatan literasi keuangan sebanyak 349.764 orang dengan kelompok peserta ibu-ibu rumah tangga, pengusaha mikro dan UKM, pelajar/ mahasiswa, pekerja pemula, pasangan muda dan komunitas pasar yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan total dana yang dialokasikan sebesar Rp3.807.526.037 (tiga milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah). Selain itu, Danamon juga menyediakan informasi edukasi melalui situs web Danamon dan akun media sosial. Training Frontliners Untuk memastikan bahwa <i>frontliners</i> memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai produk dan jasa, pada tahun 2014, Danamon melalui kegiatan Consumer Service Quality, telah melakukan training <i>frontliners</i> retail banking, operations, UKM, serta <i>Danamon Access Center</i> di seluruh Indonesia. <p>Penanggulangan Pengaduan Konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> Danamon memiliki Unit Layanan Nasabah Danamon atau Danamon Access Center (DAC) yang merupakan unit layanan nasabah 24 jam yang bertugas membantu nasabah mendapatkan informasi atas transaksi maupun rekening. Informasi Penanganan Pengaduan Nasabah selama tahun 2014 dapat dilihat pada pada Laporan Tahunan ini. <p>* Keterangan lebih lengkap mengenai kegiatan Tanggung Jawab kepada Konsumen dapat dilihat pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di laporan ini.</p>	Biaya yang dikeluarkan untuk edukasi perbankan selama tahun 2014 sebesar sekitar Rp3.807.526.036
E.	Value chain dan hubungan dengan Vendor	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pengadaan Danamon Kebijakan Kredit Danamon Kebijakan Keberlanjutan poin 6.3 yang meliputi antara lain pentingnya pengelolaan dampak tidak langsung terhadap lingkungan dan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam proses seleksi vendor, termasuk suplier dan kontrator, seleksi selalu dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pengadaan. <i>Value chain</i> yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang berasal dari kegiatan usaha para pelanggan Danamon, dimana risiko lingkungan dan sosial merupakan bagian yang terintegrasi dari keseluruhan proses kredit, seperti tercantum dalam kebijakan kredit Danamon. 	

Tata Kelola Perusahaan

Laporan Keberlanjutan

Danamon juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan secara terpisah yang disusun berdasarkan *Global Reporting Initiatives*, yang disertifikasi oleh *National Center for Sustainability Reporting (NCSR)*, termasuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Informasi lengkap termasuk Sumbangan/pemberian dana kegiatan sosial dapat dilihat dalam Laporan Keberlanjutan.

Kebijakan Keberlanjutan (*Sustainability Policy*) Danamon

1. Visi dan Misi

- 1.1 Danamon meyakini bahwa keberlanjutan sejati meliputi integrasi dalam bidang lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi dalam setiap proses bisnis utama kami. Kami berusaha untuk melaksanakan kebijakan ini dalam kegiatan usaha secara internal dan eksternal.
- 1.2 Adalah kebijakan kami untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Kami berkomitmen untuk mengendalikan dampak lingkungan yang signifikan yang terkait dengan kegiatan kami.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Kebijakan ini mencakup seluruh kegiatan operasional Danamon, meliputi kegiatan usaha dari anak perusahaan kami dan seluruh aktivitas bisnis dan operasional.

3. Keterlibatan dalam Perubahan Iklim

- 3.1 Perubahan iklim dapat berakibat buruk pada perekonomian Indonesia, komunitas para pelaku bisnis, para pelanggan dan juga bisnis kami. Danamon memiliki komitmen dalam upaya memerangi perubahan iklim.
- 3.2 Kami terus-menerus mengajak para pemangku kepentingan untuk lebih memahami betapa pentingnya upaya memerangi perubahan iklim.

4. Kepatuhan pada Lingkungan

- 4.1 Danamon berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan terkait lingkungan serta menerapkan praktik terbaik dimanapun Bank dan anak perusahaan kami beroperasi.

5. Pengelolaan Dampak Langsung pada Lingkungan dan Sosial

- 5.1 Kami berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya proaktif untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial akibat dari operasional kami.
- 5.2 Sebagai sebuah bank, kami memainkan peran yang jelas dan positif dalam masyarakat Indonesia. Tugas dan tujuan kami sebagai perantara keuangan adalah membantu pelaku usaha untuk menjadi mapan dan berkembang, untuk memungkinkan konsumen mengembangkan kesejahteraan mereka. Tujuan kami adalah untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas, aman dan jasa keuangan dikelola secara efisien. Kami percaya bahwa ini semua ini akan memungkinkan kami untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang berkesinambungan.
- 5.3 Danamon terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, kompetensi karyawan, perkembangan usaha, pasar, portofolio produk, keterampilan, manajemen dan kepercayaan kami. Karyawan kami adalah kekuatan dibalik setiap upaya perbaikan ini. Semangat dan tingkat inovasi, efisiensi dan profesionalisme karyawan kami berdampak langsung terhadap kinerja Danamon. Dengan demikian, karyawan adalah aset kami yang terutama. Kami terus berupaya untuk menemukan, mengembangkan dan mempertahankan personil terbaik yang ada.

6. Pengelolaan Dampak Tidak Langsung Terhadap Lingkungan dan Sosial

- 6.1 Danamon mengakui bahwa setiap keputusan yang kami ambil mengenai pembiayaan yang kami salurkan akan mempengaruhi manusia dan lingkungan. Dampak terbesar yang kami miliki pada lingkungan dan masyarakat adalah melalui kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu, kami terus mengembangkan standar dan pedekatan lingkungan dan sosial. Kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki dampak luas demi kebaikan bersama dan mencegah penyaluran dana untuk kegiatan usaha yang mungkin memiliki dampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Bersama-sama dengan pelanggan dan para pemangku kepentingan, kami terus memastikan bahwa roda perekonomian yang kami dukung dapat memberikan dampak yang baik untuk manusia dan bumi.

- 6.2 Danamon mempertimbangkan kinerja lingkungan para pemasok dan kontraktor, serta dampak lingkungan dari produk dan jasa yang disediakan pada saat proses pengadaan.
- 6.3 Danamon menyadari pentingnya pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang berasal dari kegiatan usaha para pelanggan kami. Di Danamon, manajemen risiko lingkungan dan sosial merupakan bagian yang terintegrasi dari keseluruhan proses kredit, seperti yang tercantum dalam kebijakan kredit kami.
- 6.4 Danamon mendedikasikan sumber daya yang cukup untuk mencegah, mendeteksi dan memitigasi semua jenis kecurangan dan penyalahgunaan keuangan. Untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kami dilakukan sesuai dengan standar etika tertinggi, Danamon selalu berupaya untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan penuh terhadap Undang-Undang tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

7. Melibatkan Pemangku Kepentingan dan Pelaporan

- 7.1 Kami terus mengembangkan standar dan pendekatan kami terhadap lingkungan dan sosial. Kami bekerjasama dengan pelanggan dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perekonomian yang kami dukung memberikan dampak yang baik untuk manusia dan lingkungan.
- 7.2 Inisiatif-inisiatif Danamon terkait pengelolaan dampak tidak langsung kami terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:
- Melalui program kemasyarakatan dan Yayasan Danamon Peduli, kami bermitra dengan organisasi-organisasi terpilih yang secara aktif turut serta dalam upaya perlestarian lingkungan.
 - Melibatkan karyawan dalam pelaksanaan rencana strategis keselamatan, kesehatan dan keamanan lingkungan kerja serta memberikan dukungan praktis agar karyawan dapat turut mengendalikan dampak lingkungan mereka secara individual.
 - Melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman mereka tentang dampak lingkungan, baik dampak langsung maupun tidak langsung dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan terkait.
 - Danamon berkomitmen untuk:
 - o melaporkan kepada publik mengenai kinerja keberlanjutan kami secara tahunan.
 - o menerapkan panduan pelaporan keberlanjutan *Global Reporting Initiatives (GRI)* serta panduan tambahan untuk sektor jasa keuangan.

8. Tata Kelola

- 8.1 Akuntabilitas dari Kebijakan Keberlanjutan ini dijamin melalui pendekatan-pendekatan berikut ini:
- Dewan Komisaris mengawasi peran manajemen dalam memastikan bahwa komitmen keberlanjutan Danamon dilaksanakan dan dipertahankan di seluruh organisasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
 - Dewan Direksi bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan keberlanjutan organisasi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh.
 - Masing-masing Kepala Divisi, departmen pendukung, fungsi-fungsi terkait dan seluruh karyawan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan ini.
 - Komite Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap Kebijakan Keberlanjutan ini.

9. Pelaksanaan Proses dan Tinjauan Kebijakan

- 9.1 Kami akan melaksanakan langkah-langkah untuk menerapkan dan akan mengkaji ulang kebijakan ini secara berkelanjutan.

Tata Kelola Perusahaan

Danamon Sustainability Report Card

DANAMON Sustainability Pillars	Commitments	2013 Progress	2014 Progress
Customer Satisfaction	Mempertahankan dan mengembangkan indeks nilai kepuasan nasabah di seluruh area yang relevan.	Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia (MRI), Danamon mampu meraih ranking 5 besar di antara seluruh bank di Indonesia dalam survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM), sebuah perbaikan dibandingkan tahun 2012 dimana Danamon hanya berada di ranking 8.	Mempertahankan peringkat 5 besar di antara seluruh bank di Indonesia dalam survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM). Meraih 9 penghargaan MarkPlus WOW Service Excellence Award 2014 berdasarkan survey yang dilakukan MarkPlus Insight dan Marketeers di 17 kota dengan 17.000 responden mengenai kualitas pelayanan.
	Fair and inclusive banking	Pada tahun 2013, Danamon menyediakan lebih dari 2.927 sesi pendidikan keuangan untuk nasabah dan masyarakat umum, khususnya UMKM.	Danamon memasang target jumlah peserta yang tereduksi dari kegiatan literasi keuangan untuk tahun 2014 ini adalah sebanyak 350.107 orang dengan kelompok peserta adalah sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> • Ibu-ibu rumah tangga, • Pengusaha mikro dan UKM, • Pelajar/mahasiswa, • Pekerja pemula, • Komunitas pasar, • Pasangan muda.
A Healthy Bank	Healthy growth in market and financial performance	ROE sebesar 14,5% ROA sebesar 2,5% Pendapatan total Rp18,5 triliun Pinjaman ke rasio deposito sebesar 95,1% NPAT sebesar Rp4 triliun (reported) NPL sebesar 1,9%	ROE sebesar 8,6% ROA sebesar 1,4% Pendapatan total Rp17,6 triliun Pinjaman ke rasio deposito sebesar 92,6% NPAT sebesar Rp2,6 triliun (reported) NPL sebesar 2,3%
Improving and Learning from the best	Mengimplementasikan standar nasional dan internasional di sektor perbankan dan panduan lainnya yang relevan.	Menerima sertifikasi ISO 22301: 2012-BCMS, sebuah pengakuan internasional untuk lembaga yang menunjukkan <i>excellence</i> dalam pengembangan terus-menerus dan implementasi sistem manajemen bisnis yang berkelanjutan. Dengan pencapaian ini, Danamon telah menjadi perusahaan pertama di Indonesia dan bank pertama di Asia Tenggara yang menerima sertifikasi ini dari Grup British Standard Institution (BSI) Indonesia.	Tidak ada sertifikasi ISO baru untuk tahun 2014.
Governance and Compliance	Mematuhi hukum dan regulasi	Dianugerahi "Best Overall" di "ASEAN Corporate Governance Scorecard" dari Indonesian Institute of Corporate Directorship (IICD).	Mendapat penghargaan Juara 1 Annual Report Award 2013 dalam kategori Private Keuangan Listed
	Mekanisme kontrol internal yang kokoh	Pengembangan dan implementasi praktik-praktik terbaik secara terus-menerus dalam anti pencucian uang/kontra pembiayaan terorisme. Terlibat dalam Penilaian Cabang, dimana 91 cabang di 32 kota dinilai perihal prosedur kontrol internal di tahun 2013. Per Desember 2013, 10.993 karyawan telah menerima pelatihan anti pencucian uang/kontra pembiayaan terorisme.	Terus menerapkan sosialisasi internal melalui modul E-Learning Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
	Supplier Relationship	Mengembangkan kebijakan pengadaan baru yang mempertimbangkan tanggung jawab pemasok terhadap permasalahan perburuhan, lingkungan dan masyarakat setempat.	Menerapkan kebijakan pengadaan atau <i>procurement policy</i> baru dimana terdapat ketentuan mengenai <i>supplier/vendor</i> dimana <i>supplier/vendor</i> yang ditunjuk Danamon wajib mematuhi seluruh peraturan mengenai lingkungan dan memahami dampak operasional mereka terhadap lingkungan.

DANAMON Sustainability Pillars	Commitments	2013 Progress	2014 Progress
<i>Employee satisfaction and creating a rewarding working experience</i>	Menjadi <i>employer of choice</i>	134.073 <i>man-days</i> pelatihan karyawan. Pelatihan dan kursus kemampuan managerial, kemampuan teknis, kursus penyegaran kembali, kursus HAM dan banyak lagi.	175,059 <i>man-days</i> pelatihan karyawan. Danamon Corporate University melaksanakan program D4D (Danamon for Danamon) dimana karyawan Danamon bersukarela dalam penyebaran wawasan dan ilmu sebagai fasilitator pelajaran.
	Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman	Menyelenggarakan <i>Health Talk</i> (Diskusi Kesehatan), yaitu Seminar untuk Insan Danamon dengan berbagai topik seperti diabetes, kolesterol, makanan sehat dan penyakit kronis. Mengadakan <i>Health Fair</i> (Pameran Kesehatan), yaitu memfasilitasi provider layanan medis untuk mendidik Insan Danamon tentang pentingnya hidup sehat.	Menyelenggarakan berbagai seminar mengenai kesehatan melalui program D'Club <i>Health Talk</i> yang menampilkan pakar-pakar kesehatan. Medicilin, produk asuransi kesehatan Adira Insurance, mengadakan kontes " <i>I want to be Fit</i> " dimana karyawan dengan tingkat kesehatan fisik terbaik mendapatkan hadiah berupa paket wisata dan lain-lain.
<i>Wise Energy Usage</i>	Mengurangi pemakaian listrik	Mulai berinisiatif mengganti bohlam dan signage di gedung Danamon dengan solusi penerangan LED yang hemat energi.	<i>Corporate Real Estate Management</i> (CREM) menggelar kontes 'Danamon Go Saving' dimana gedung atau cabang Danamon yang berhasil mengurangi konsumsi listrik terbanyak dibandingkan tahun lalu mendapatkan insentif.
<i>Waste Management</i>	Mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah melalui program <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> .	Di tahun 2013, Yayasan Danamon Peduli telah mengelola program daur ulang limbah di 7 pasar tradisional yang berlokasi di 5 daerah, yaitu Kota dan Kabupaten Probolinggo (Jawa Timur), Kota Payakumbuh (Sumatera Barat), Kabupaten Sragen dan Kota Pekalongan (Jawa Tengah). Total 518.249 ton limbah dikonversikan menjadi kompos. Di tahun sebelumnya, 2012, hanya 116.718 ton saja limbah yang dikonversikan menjadi kompos. Terjadi peningkatan luar biasa.	Pada tahun 2014, Yayasan Danamon Peduli berhasil mengumpulkan 3.103 kg sampah non-organik dari gedung dan cabang Danamon serta Adira di seluruh Jakarta untuk kebutuhan daur ulang.
	Mengurangi konsumsi kertas	Pada tahun 2013, ada dua kali lipat peningkatan dalam penggunaan <i>e-Statement</i> . Sebelum <i>e-Statement</i> diperkenalkan pada tahun 2011, dalam setahun Danamon menggunakan lebih dari 34.500.000 lembar kertas untuk print transaksi perbankan dan tagihan.	Memulai inisiatif <i>Recycled Paper</i> , dimana Danamon Peduli mengumpulkan sampah kertas dari operasional Danamon yang kemudian diolah menjadi kertas daur ulang oleh nasabah SME Banking Danamon. Kertas daur ulang ini kemudian dijadikan bahan dasar materi komunikasi korporasi Danamon. Divisi <i>Procurement</i> memasang target pengurangan konsumsi kertas sebesar 30%. Kartu ucapan (hari libur keagamaan) dan laporan tahunan versi cetak akan digantikan dengan <i>e-media</i> . Kami mengurangi penyetakan Laporan Tahunan pada tahun 2014. Menjelang akhir tahun 2014, Danamon emluncurkan <i>Mobile Banking Application</i> yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan melalui <i>smartphone</i> , sehingga mengurangi penggunaan kertas yang pada umumnya digunakan untuk transaksi dalam cabang maupun ATM (receipt).

Tata Kelola Perusahaan

DANAMON Sustainability Pillars	Commitments	2013 Progress	2014 Progress
Climate Change	Mengurangi emisi karbon	Pada tahun 2013, program lingkungan Yayasan Danamon Peduli, Bulan Kepedulian LingkunganKu (BKL) melibatkan 2.073 unit dan cabang dengan total 14.792 karyawan yang menjadi relawan dan dana sebesar Rp4,85 miliar.	Dari Januari hingga Juli 2014, Yayasan Danamon Peduli telah menyalurkan dana sebesar Rp 4,5 miliar untuk rangkaian kegiatan Bulan Kepedulian LingkunganKu di seluruh Indonesia yang melibatkan relawan karyawan Danamon dan Adira sebanyak 6.627 orang dan telah dilakukan penanaman lebih dari 3.000 pohon.
	Implementasi Prinsip-prinsip Bangunan Hijau untuk kantor-kantor Danamon	Mulai pembangunan kantor pusat Danamon yang baru, yang menggunakan konsep bangunan hijau, di antaranya termasuk menggunakan kaca jendela dengan kilap ganda (<i>Low E Double Glazing</i>) yang bisa menyerap panas dan dengan demikian bisa mengurangi penggunaan AC dan juga bisa memakai sistem <i>energy</i> penerangan yang rendah, alat pemelihara air buangan, tempat parkir sepeda, ruang hijau yang luas, termasuk dua <i>Sky Garden</i> di atas gedung.	<i>Topping off</i> gedung Menara Danamon yang menggunakan konsep <i>Green Building</i> .
Environment Conservation	Berinvestasi pada program-program konservasi lingkungan	Total investasi konservasi lingkungan di tahun 2012 berjumlah Rp4,85 miliar.	Total investasi konservasi lingkungan di tahun 2014 berjumlah Rp4,58 miliar.
Community Welfare	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro dan UKM	Di tahun 2013, Danamon mencatatkan pertumbuhan 12% di segmen usaha mikro dan UKM, pinjaman yang dikeluarkan adalah 30% dari total pinjaman Danamon.	Di tahun 2014, Danamon mencatatkan kontribusi kredit kepada segmen usaha mikro dan UKM sebesar 28% dari total pinjaman Danamon.
	Mendukung pertumbuhan UKM	Pinjaman Danamon kepada UKM tumbuh 18% menjadi Rp21 triliun.	Pinjaman Danamon kepada UKM tumbuh 9% menjadi Rp20 triliun
Investasi sosial perusahaan melalui Yayasan Danamon Peduli dan rekanan lain.	Menaikkan cakupan jumlah potensial penerima manfaat menjadi melekat perbankan.	Yayasan Danamon Peduli telah berinvestasi total Rp 12,8 miliar untuk Pengembangan masyarakat di tahun 2013.	Tahun 2014 Danamon Peduli menyiapkan anggaran kegiatan sebesar Rp 13,5 miliar antara lain meliputi kegiatan Pasar Sejahtera, Cepat Tanggap Bencana, Pelestarian Ikon Regional.
Access to banking for all	Menyapa lebih banyak orang di seluruh Nusantara, termasuk mereka yang hidup di pedesaan dan daerah terpencil	Kami meluncurkan layanan SMS Banking, yang berekspansi ke orang-orang yang tinggal jauh dari jaringan fisik.	Danamon bersama OJK melakukan berbagai kegiatan literasi keuangan khususnya di wilayah Indonesia timur, diantaranya melaksanakan Pameran Industri Keuangan di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

PERMASALAHAN HUKUM DAN PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ANAK PERUSAHAAN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon dan Anak Perusahaan selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan.

Permasalahan Hukum Yang Melibatkan Danamon

Perkara Yang Dihadapi Bank	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Bank
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	105	20	103 perkara perdata menang, 2 perkara kalah dengan nilai 5.2 % dari total nilai klaim perkara yang diselesaikan
Dalam proses penyelesaian	666	57	Nihil

Catatan:

Perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan. Rekapitulasi total perkara selama tahun 2014 sesuai data per Desember 2014.

Permasalahan Hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris & Direksi	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Bank
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Nihil
Dalam proses penyelesaian	-	-	Nihil

Permasalahan Hukum yang melibatkan Anak Perusahaan

Perkara Hukum Melibatkan PT Adira Dinamika Multi Finance	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Nihil
Dalam proses penyelesaian	43	2	Nihil

Perkara Hukum Melibatkan PT Asuransi Adira Dinamika	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Nihil
Dalam proses penyelesaian	4	-	Nihil

Perkara Hukum Melibatkan PT Adira Quantum Multifinance	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Nihil
Dalam proses penyelesaian	-	-	Nihil

Tata Kelola Perusahaan

Perkara-Perkara Penting Yang Dihadapi Danamon

- a. Perkara Terkait Yayasan Dharmais, Dakab dan Supersemar
 Pada tanggal 11 Pebruari 2009, Yayasan Dharmais, Yayasan Dakab dan Yayasan Supersemar menggugat Danamon melalui Pengadilan Negeri terkait pinjaman subordinasi. Pada tanggal 6 Februari 2014, Danamon menerima pemberitahuan resmi dari pengadilan atas putusan Mahkamah Agung RI yang memutuskan untuk menolak permohonan kasasi tersebut. Putusan telah berkekuatan hukum tetap dimenangkan oleh Danamon.
- b. Perkara Terkait PT Danamon Internasional
 Pada tanggal 10 November 2011, PT Danamon Internasional menggugat Danamon melalui Pengadilan Negeri terkait perkara Modal Pinjaman. Perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 12 Januari 2015, Bank telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang pada intinya memutuskan pihak Bank wajib membayar kepada PT. Danamon Internasional sebesar Rp285,9 miliar. Terkait dengan hal tersebut, Bank berencana akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas.
- c. Perkara Terkait Danamon Usaha Gedung
 Pada tanggal 12 Desember 2012, Danamon Usaha Gedung (DUG) melayangkan tuntutan melalui *International Chamber of Commerce-Asia Office* dengan referensi perkara No. 19136/CYK (Perkara) terhadap

Danamon. Sidang pemeriksaan perkara telah dilaksanakan di Jakarta pada akhir Oktober 2013. Pada tanggal 11 Maret 2014, telah dikeluarkan Putusan ICC No: 19136/CYK tanggal 5 Maret 2014 yang diterima oleh Danamon melalui ABNR Law Firm. Dalam putusan arbitrase tersebut maka Danamon diharuskan membayar sejumlah uang untuk penggantian pembayaran pajak DUG kepada kantor pajak. Saat ini para pihak (DUG dan Danamon) telah menandatangani perjanjian perdamaian pada tanggal 26 November 2014, maka dengan demikian perkara antara DUG dan Danamon tersebut telah selesai.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Sepanjang 2014, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Danamon dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Danamon yang mempengaruhi kondisi Danamon secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Tabel berikut menjelaskan rincian penyimpangan internal di Danamon selama 2014:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang melibatkan					
	Manajemen		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Total internal fraud	-	-	28	42	-	-
Telah diselesaikan	-	-	28	42	-	-
Dalam proses internal	-	-	-	-	-	-
Proses Pending	-	-	-	-	-	-
Ditindak lanjuti melalui Tindakan Hukum	-	-	4	5	-	-

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Kondisi keuangan dan non-keuangan diungkapkan secara berkala melalui media massa, paparan publik dan melalui forum *analyst briefing* serta situs *web*. Laporan mengenai kondisi keuangan maupun non keuangan disusun dan disampaikan kepada regulator dan instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan mengenai kondisi keuangan antara lain Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Tahunan dan laporan non keuangan antara lain laporan Tata Kelola Perusahaan, informasi mengenai Produk/Jasa, Jaringan Kantor, serta informasi non keuangan lainnya.

Berikut beberapa laporan dan informasi yang telah diungkapkan yang dapat diakses melalui situs *web* Danamon (www.danamon.co.id):

Jenis Informasi	Penerbitan	Pelaporan	Isi	Akses	
				Website	IDX
Informasi Keuangan					
1. Laporan Keuangan Konsolidasian	Kuartalan	OJK	Laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup peraturan Bapepam	√	√
2. Laporan Keuangan Publikasi	Kuartalan	Publik melalui Koran, BI, BEI, OJK	Ringkasan kinerja keuangan sesuai persyaratan BI	√	√
3. Presentasi Analisis	Kuartalan	Publik (4x dalam 1 tahun); IDX, BI untuk tahunan	Informasi keuangan dan non keuangan utama	√	-
4. <i>Newsletter</i>	Kuartalan	Publik, Bursa, BI	Informasi keuangan dan non keuangan dengan penjelasan	√	-
5. Laporan Tahunan	Tahunan	Publik, Penyusun kebijakan, Investor, bank lain, lembaga penilai	Informasi keuangan dan non keuangan, segmen usaha, informasi produk, profit	√	√

Tata Kelola Perusahaan

Jenis Informasi	Penerbitan	Pelaporan	Isi	Akses	
				Website	IDX
Informasi Non Keuangan					
1. Laporan Tata Kelola	Tahunan	Pemegang Saham, OJK, YLKI, Lembaga Pemerintah, Asosiasi Bank, Lembaga Penelitian, Majalah Ekonomi dan Keuangan	Informasi mengenai pelaksanaan tata kelola Danamon dan hasil penilaian tata kelola	√	-
2. Laporan <i>Sustainability</i>	Tahunan	Publik, investor, pemangku kepentingan	Laporan mengenai kebijakan dan program-program keberlanjutan	√	-
3. Jaringan Kantor	-	-	Informasi mengenai kantor cabang	√	-
4. Produk/Jasa	-	-	Informasi mengenai produk dan jasa yang dipasarkan	√	-
5. Kepengurusan dan Kepemilikan	-	-	Informasi mengenai manajemen, struktur kepemilikan	√	-

OPSI SAHAM

Opsi Saham merupakan penawaran opsi membeli saham yang ditujukan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif. Penawaran saham atau opsi diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi yang telah diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar Danamon. Selama tahun 2014, Danamon tidak memiliki program pemberian opsi saham kepada Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Danamon memberikan Program Kompensasi Jangka Panjang ("LTCP") kepada Direksi dan karyawan Bank dan Anak Perusahaan yang memenuhi persyaratan. Program ini merupakan bagian dari Strategi Jumlah Kompensasi Bank dan Anak Perusahaan, dengan tujuan mengkaitkan kinerja Bank dan Anak Perusahaan secara keseluruhan dengan kompensasi yang diterima oleh karyawan dan Direksi, serta untuk menjaga pertumbuhan Bank dan Anak Perusahaan yang berkesinambungan.

Program ini terdiri dari program kas dan program saham, dimana karyawan yang memenuhi persyaratan akan menerima sejumlah uang tunai yang telah ditetapkan sebelumnya dan langsung digunakan untuk membeli saham Bank. Saham dibeli atas nama masing-masing karyawan untuk ditahan dan ditempatkan dalam kustodian independen. Saham akan diserahkan setelah masa tunggu 3 (tiga) atau 6 (enam) tahun selesai. Tanggal pemberian kompensasi dari program ini adalah 1 Juli 2010.

Bank telah menyiapkan Program Insentif Jangka Panjang ("LTIP"), yang merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang telah jatuh tempo tahun 2013. Program insentif jangka panjang ini, yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi, akan diberikan kepada Direksi dan karyawan yang memenuhi syarat, telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Rencana program LTIP yang semula akan diluncurkan pada tahun 2014, diputuskan akan dipertimbangkan kembali pelaksanaannya.

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Pelaksanaan *Buy Back* merujuk pada peraturan OJK No. XI.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua OJK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 dan No. 2/POJK.04/2013, dimana emiten diberi keleluasaan untuk melakukan pembelian saham kembali tanpa melalui RUPS dengan jangka waktu pengalihan terbatas. Selama tahun 2014, tidak ada kegiatan Danamon untuk melakukan pembelian kembali baik saham maupun obligasi.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Hak karyawan diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau gaji, sebagai bentuk imbalan dari Danamon atau pemberi kerja kepada karyawan. Gaji ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Ilustrasi rasio perbandingan gaji dapat dilihat di tabel berikut, yang meliputi kompensasi per bulan untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap di Danamon.

Rasio Perbandingan Gaji	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Karyawan Tertinggi-Karyawan Terendah	220.8 x	230.8 x	80.4 x	81.8 x	79.7 x	80 x
Direktur Tertinggi-Direktur Terendah	4.9 x	5.0 x	4.1 x	3.7 x	3.6 x	3.2 x
Komisaris Tertinggi-Komisaris Terendah	1.5 x	1.4 x	1.5 x	1.5 x	1.5 x	1.5 x
Direktur Tertinggi-Karyawan Tertinggi	2.5 x	2.8 x	3.9 x	3.4 x	2.4 x	3.4 x

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Danamon memiliki kebijakan mengenai Transaksi dengan Pihak Terafiliasi, Pihak Terkait dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP: DIR-Corp.Sec.-015 tanggal 30 Desember 2013. Kebijakan tersebut disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.
- Sebagai dasar untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dijalankan sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi, Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini dituangkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan internal dan prosedur operasional Bank.

Selama tahun 2014, tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nihil					

Tata Kelola Perusahaan

RENCANA STRATEGIS BANK

Untuk memperkokoh posisi Danamon di Industri perbankan nasional, Danamon merumuskan arah kebijakan utama melalui peningkatan peran bank yang mengutamakan pertumbuhan pada pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah, pengelolaan likuiditas yang lebih optimal, peningkatan produktifitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui transformasi bisnis, serta peningkatan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

Rencana Jangka Pendek

Dalam satu tahun ke depan, Danamon telah menetapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil.

Perkreditan

Danamon akan meningkatkan penetrasi pasar pada segmen *mass market*, melanjutkan investasi dan menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Fokus pada efisiensi dan produktivitas melalui perubahan model bisnis Danamon Simpan Pinjam (DSP), peningkatan kerjasama dengan komunitas, mitra strategis dan koperasi untuk segmen *agriculture*. Selain itu, peningkatan sinergi dengan perusahaan anak melalui program *cross selling* untuk produk pembiayaan non otomotif dan peningkatan layanan terpadu.

Danamon juga akan meningkatkan pangsa pasar di segmen komersial dan korporasi dengan *risk adjusted return* yang memadai dan peningkatan *fee based income* melalui *bancassurance*, *trade finance*, *forex* dan produk lainnya.

Pendanaan

Peningkatan pendanaan melalui optimalisasi jaringan kantor dan program akuisisi nasabah melalui pendekatan *community banking* dan sinergi dengan jaringan anak perusahaan.

Danamon juga akan menjajaki program sekuritisasi aset dan melakukan eksplorasi pendanaan melalui instrumen pasar modal yang sesuai dengan profil risiko Danamon.

Danamon akan menerbitkan obligasi menggantikan obligasi/MTN/NCD yang akan jatuh tempo dan penambahan obligasi/MTN/NCD secara bertahap tergantung kepada kebutuhan pendanaan, kondisi pasar, dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhitungkan dan menjaga rasio LDR Danamon.

Biaya Overhead

Danamon akan berusaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui program transformasi bisnis dan restrukturisasi yang berkelanjutan guna mendukung pencatatan tingkat profitabilitas yang sehat dan *sustainable*. Peninjauan ulang bisnis model yang berfokus pada tingkat produktifitas SDM melalui peningkatan kemampuan SDM dalam menjalankan tugas khususnya *sales*, *collection* dan *frontliner*. Selain itu, Danamon juga akan melakukan efisiensi operasional melalui konsolidasi jaringan kantor dan otomasi proses-proses manual.

Kualitas Aktiva

Mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui proses seleksi nasabah lebih ketat, peningkatan pengukuran pencegahan *fraud*, peningkatan kapasitas penagihan dan *recovery*, inisiasi model peringkat secara kuantitatif, serta otomasi proses kredit secara bertahap.

Jaringan Kerja

Danamon berencana untuk meningkatkan efisiensi jaringan distribusi dengan menyesuaikan proses dan organisasi termasuk infrastruktur dengan melakukan konsolidasi jaringan kantor dan penggabungan aktivitas yang sama menjadi satu jaringan kerja.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Dalam upaya mendukung program Bank Indonesia, Danamon berupaya menjaga tingkat suku bunga yang wajar dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, perbaikan kualitas kredit serta menyelaraskan biaya dana bank sesuai dengan perkembangan suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*). Besarnya suku bunga kredit tidak dapat terlepas dengan suku bunga dana, Danamon turut mendukung program OJK dengan pemberian maksimum suku bunga dana yang ditetapkan.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang (3-5 tahun)

Langkah-langkah strategis yang akan diterapkan dalam 3 sampai dengan 5 tahun ke depan adalah:

Kredit

Danamon akan melanjutkan pertumbuhan kredit mikro dan kecil termasuk UKM, komersial dan korporasi, pembiayaan perdagangan (*Trade Finance*), pembiayaan berbasis aset (ABF) dan pembiayaan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan pembiayaan kendaraan bermotor dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Pendanaan

Danamon akan terus berupaya memperkuat pendanaan melalui peningkatan dana pihak ketiga dan penerbitan obligasi, serta menjaga rasio LDR sesuai ketentuan yang berlaku.

Manajemen Risiko

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan terkait dengan manajemen risiko adalah menjaga pertumbuhan Danamon pada tingkat yang *acceptable* dan *prudent*, membangun model *rating* internal di semua lini bisnis, peningkatan pelaksanaan strategi manajemen dan kesadaran risiko operasional serta melakukan *study* dan persiapan terhadap *Internal Model Approach* (IMA) yang sejalan dengan regulasi OJK.

Operasional dan CREM

Menyediakan layanan yang sederhana, cepat dan unik guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta mendorong nasabah untuk menggunakan jaringan alternatif selain cabang. Terus melakukan proses sentralisasi untuk mencapai efisiensi serta menciptakan ruangan yang dinamis demi kenyamanan dan kepuasan nasabah maupun karyawan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Danamon memiliki kebijakan yang melarang keterlibatan Danamon dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Selama tahun 2014 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

Danamon menyediakan akses dan kemudahan Informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Danamon melalui media komunikasi seperti Siaran Pers, *Investor Newsletter* dan *Booklet Analyst Briefing*. Selain itu, Danamon menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, informasi investor, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan sosial, aksi korporasi dan lain-lainnya yang disajikan melalui *website* <http://www.danamon.co.id> baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan konsumen, pemenuhan kebutuhan informasi produk dan layanan, serta penanganan pengaduan nasabah dan/atau calon nasabah, Danamon menyiapkan media komunikasi melalui *Danamon Access Center* dengan Layanan Informasi 24 Jam (500-090).

Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi:

1. Divisi *Public Affairs* di nomor telepon (021) 57991001-03 atau melalui akses email: public.affairs@danamon.co.id.

Tata Kelola Perusahaan

2. Alamat *email* lain:

- danamon.access@danamon.co.id;
- corpsec@danamon.co.id; dan
- investor.relation@danamon.co.id.

HUBUNGAN INVESTOR

Divisi Hubungan Investor bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan. Peran Divisi Hubungan Investor mencakup aspek keuangan dan strategi, dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya dan tepat waktu kepada pihak internal maupun eksternal, termasuk pemegang saham, calon investor, analis, agensi pemeringkat, pemberi pinjaman dan badan regulator;
2. Melakukan kegiatan secara berkala, di antaranya: paparan kinerja per kuartal, pertemuan analis, sesi pertemuan dengan investor dan pertemuan-pertemuan lain dengan tujuan menyampaikan pembaruan kinerja/strategi Danamon secara periodik;

3. Menyediakan informasi yang memadai kepada setiap pemangku kepentingan mengenai situasi keuangan dan aksi korporasi Danamon.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan di atas, Divisi Hubungan Investor bekerjasama dengan manajemen, pimpinan setiap divisi bisnis, divisi *Financial Planning and Project, Public Affair, Integrated Risk*, dan Sekretaris Perusahaan.

Divisi Hubungan Investor juga berkomunikasi melalui berbagai media, termasuk pertemuan via media telepon, penerbitan laporan keuangan berkala (khususnya laporan pengarahannya untuk analis, laporan berkala untuk investor, laporan tahunan) yang dapat diakses pada www.danamon.co.id.

Berikut rincian kegiatan penyediaan informasi dari tim Hubungan Investor selama tahun 2014:

Forum	Frekuensi	Keterangan
Pertemuan Analis/ Paparan Publik	4 kali	Paparan Publik bagi media, analis dan manajemen senior untuk memberikan informasi terakhir mengenai kondisi keuangan dan non keuangan.
Laporan Keuangan	4 kali	Publikasi laporan keuangan kuartalan sesuai dengan persyaratan Bapepam-LK sebagai perusahaan publik
Laporan Tahunan	1 kali	Laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas kinerja, bisnis dan aktivitas lain Danamon.
Roadshow dan Konferensi	6 kali	Partisipasi dalam berbagai deal dan <i>non-deal roadshow</i> yang diadakan oleh perusahaan sekuritas ternama untuk memberikan informasi terkini akan kinerja dan strategi, tantangan dan peluang Danamon kepada investor, analis dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tatap muka dan <i>conference call</i>	146 pertemuan tatap muka dan 16 <i>conference call</i>	Pertemuan dengan analis/investor lokal/luar negeri untuk memberikan informasi atas strategi dan kinerja Danamon.

Selama tahun 2014, Tim Hubungan Investor telah mengikuti berbagai acara *roadshow/conference* sebagai berikut:

Acara	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal	Jumlah Perusahaan
17 th Annual Asian Investment Conference	Credit Suisse	Hong Kong	26-27 Maret 2014	17
CLSA Asean Forum	CLSA	Bangkok	7-9 Mei 2014	13
Investor Summit & Capital Market Expo 2014	IDX	Jakarta	17 September 2014	200

PUBLIC AFFAIRS

Divisi *Public Affairs* bertanggung jawab mengelola hubungan antara Danamon dengan pemangku kepentingan, karyawan, media massa, lembaga dan asosiasi terkait, serta pihak lainnya. Struktur organisasi Divisi *Public Affairs* terdiri dari 5 (lima) departemen, yaitu *Internal Communication, External Affairs, Event Management, Brand Management* dan *Planning and Control*, dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membangun dan mengelola citra Danamon di masyarakat melalui fungsi hubungan masyarakat.
2. Melaksanakan fungsi komunikasi untuk kebutuhan internal, dari manajemen Danamon kepada karyawan dan sebaliknya.
3. Melaksanakan fungsi komunikasi eksternal, merumuskan pesan dan bentuk komunikasi hingga penyampaiannya kepada pihak luar.
4. Melakukan koordinasi agenda kegiatan Direksi, Dewan Komisaris serta mengorganisasi kegiatan Danamon (*corporate event*), baik kegiatan internal maupun yang melibatkan pihak eksternal.
5. Menjalankan fungsi sebagai pintu pertama komunikasi (*gateway*) untuk semua pihak, dari para karyawan dan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Danamon.
6. Menjadi *brand custodian* untuk kalangan internal dengan tujuan seluruh karyawan dapat mengerti, memahami dan memiliki persepsi yang sama terhadap penggunaan *Brand* Danamon agar konsisten.
7. Memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh proses operasional dan aktivitas Divisi *Public Affairs*, sehingga risiko operasional yang ada tidak menimbulkan dampak yang merugikan kelangsungan serta menjaga keberlanjutan reputasi dan bisnis Danamon.

External Affairs

Unit *External Affairs* melakukan beberapa fungsi di antaranya:

1. Pengelolaan komunikasi korporasi dan informasi strategis Bank seperti penyampaian hasil laporan keuangan kuartalan dan tahunan dan hasil Rapat Umum Saham Tahunan dalam bentuk siaran pers.
2. Pemantauan dan analisa pemberitaan media (*media monitoring and analysis*) serta pengelolaan isu media lainnya.
3. Pembentukan dan pemeliharaan hubungan baik serta kerjasama dengan pihak eksternal, termasuk dengan media serta institusi dan lembaga relevan lainnya.
4. Diseminasi informasi untuk mendukung inisiatif *Good Corporate Governance* yaitu transparansi perusahaan melalui berbagai sarana seperti *website*, siaran pers, konferensi pers, surat kepada redaksi, wawancara, pertemuan dengan *stakeholders* terkait.

Tata Kelola Perusahaan

5. Pembuatan Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan.
6. Pengelolaan *website* Perusahaan.

Kegiatan penyampaian informasi Danamon yang dilakukan oleh unit *External Affairs* sepanjang tahun 2014 dapat dilihat di tabel berikut:

Kegiatan 2014	Frekuensi
Konferensi Pers	12
Penerbitan Laporan Keuangan Kuartalan di harian nasional	4
Laporan Tahunan	1
Paparan Publik	4
Siaran Pers	26
Liputan Media (Berita foto dan berita tulis)	2.695
Kunjungan ke Media	3
RUPS Tahunan	1
<i>Media Workshop</i>	1



Media Visit Danamon ke The Jakarta Post-11 Juni 2014.



Media Workshop Danamon dan Adira-18 November 2014.

Konferensi Pers Danamon tahun 2014

Tanggal	Nama Acara
12 Februari 2014	Paparan Kinerja Danamon Tahun 2013
26 Maret 2014	Penandatanganan Nota Kesepahaman Danamon & Indosat
16 April 2014	Paparan Kinerja Danamon Kuartal Pertama Tahun 2014
24 April 2014	Indonesia Trade & Commodity Finance Conference
5 Mei 2014	Peluncuran Sosialisasi SiMOLEK (Si Mobil Literasi Keuangan) Otoritas Jasa Keuangan dan Danamon
30 Juni 2014	Buka Puasa Media Bersama Danamon Syariah, Adira Finance, dan Adira Insurance
17 Juli 2014	Paparan Kinerja Keuangan Semester Pertama Tahun 2014
16 September 2014	Peluncuran Tabungan BISA iB dan Tabungan BISA Qurban iB Danamon Syariah
17 September 2014	Investor Summit & Capital Market Expo 2014
16 Oktober 2014	Paparan Kinerja Danamon Kuartal Ketiga 2014
30 Oktober 2014	Malam Penganugerahan Danamon Social Entrepreneur Awards & Bisa! Award 2014
17 November 2014	Peluncuran D-Mobile, Danamon <i>Mobile Banking</i>

Tata Kelola Perusahaan



Paparan Kinerja Kuartal I tahun 2014-16 April 2014.

Siaran Pers Danamon Selama 2014

Tanggal	Judul
12 Februari 2014	Danamon Umumkan Kinerja Tahun 2013
17 Maret 2014	Pemenang <i>Red Match</i> Kartu Danamon Manchester United Menyaksikan <i>Big Match</i> Manchester United Melawan Liverpool
26 Maret 2014	Indosat dan Danamon Menjalinkan Kerjasama Strategis Layanan Telekomunikasi dan Perbankan
16 April 2014	Danamon Mengumumkan Kinerja Keuangan Kuartal Pertama Tahun 2014
24 April 2014	Danamon Mendukung Perkembangan <i>Trade Finance</i> Indonesia Melalui Penyelenggaraan Indonesia <i>Trade & Commodity Finance Conference</i>
5 Mei 2014	Danamon Mendukung Program Literasi dan Edukasi Keuangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
7 Mei 2014	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Danamon
26 Mei 2014	Nasabah Kartu Danamon Manchester United bertemu langsung dengan Legenda Manchester United di Bandung
25 Juni 2014	Danamon Simpan Pinjam Melakukan Edukasi dan Apresiasi Nasabah
25 Juni 2014	Danamon Menggelar Kegiatan Donor Darah di 100 Kota di Indonesia
30 Juni 2014	Danamon Syariah, Adira Finance, dan Adira Insurance Memaparkan Perkembangan Bisnis dan Menggelar Buka Puasa Bersama Media
16 Juli 2014	Danamon Rayakan Hari Ulang Tahun Ke-58
17 Juli 2014	Danamon Mengumumkan Kinerja Keuangan Semester Pertama Tahun 2014
22 Juli 2014	Kegiatan Operasional Danamon Selama Liburan Hari Raya Idul Fitri
16 September 2014	Danamon Syariah Luncurkan Tabungan BISA iB dan Tabungan BISA Qurban iB Memberikan Solusi yang Terencana dan Kemudahan Berkurban
17 September 2014	Danamon Berpartisipasi dalam <i>Investor Summit & Capital Market Expo 2014</i>
1 Oktober 2014	Danamon <i>Social Entrepreneur Awards 2014</i> Umumkan Lima Peraih
14 Oktober 2014	Danamon Ajak Masyarakat Bogor Untuk Waspada Terhadap Penipuan Mengatasnamakan Danamon

Tanggal	Judul
16 Oktober 2014	Danamon Mengumumkan Kinerja Keuangan Kuartal Ketiga 2014
27 Oktober 2014	Danamon Memanjakan Nasabah Kartu Danamon Manchester United Menyaksikan Langsung Pertandingan Big Match Liga Inggris di Stadion Old Trafford
30 Oktober 2014	Danamon Gelar Penganugerahan Danamon <i>Social Entrepreneur Awards</i> 2014
12 November 2014	Danamon Mendukung Program Literasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan
17 November 2014	Danamon Luncurkan D-Mobile, <i>Danamon Mobile Banking</i>
9 Desember 2014	Danamon Mengumumkan bahwa Henry Ho Hon Cheong Pensiun dari Jabatan Direktur Utama; Danamon akan Mengajukan Pengangkatan Sng Seow Wah sebagai Direktur Utama dan Muliadi Rahardja Sebagai Wakil Direktur Utama pada RUPSLB Mendatang
17 Desember 2014	Danamon dan IFC Lakukan Pengembangan dan Desain Model Pembiayaan Agrobisnis
23 Desember 2014	Layanan Perbankan Danamon pada Masa Natal dan Tahun Baru 2015

Danamon			KLIPING MEDIA
Kompas Berita Indonesia The Jakarta Post Kompas Daily Kompas Tempo Kompas (pdf)	Media Indonesia Suara Pembaharuan Sinar Harapan Republika Koran Jakarta Koran Sindo	Jakarta Globe Suara Merdeka Puntan (Sulawesi) Pribahasa Rakyat Pribahasa Rakyat Info Post	TAHUN 2014 2014 2014 : 1 2014 : 12 Jan
Gatra Tempo indoh.com Gatra Info Bank Berita Ekonomi	Malaya Rakyat The Star Berita antaranews.com kompas.com detik.com	Analisa Indonesia Finance Today Jawa Post media.com www.msn.com member.antaranews.com	2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

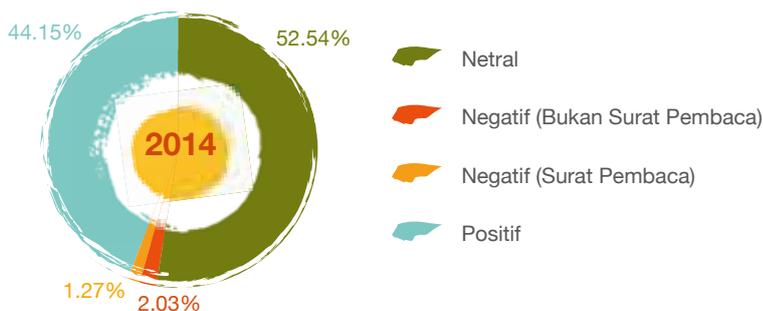


INSIDEN PERANAN Direktur Utama Danamon Henry Ho Hon Cheong (kiri) menerima Ombudsman Layanan dan Revisi Ombudsman Republik Singapura Award mengungguli pada di depan wakil Danamon yang menerima penghargaan penghargaan program Literasi dan Edukasi Perbankan di 14 kota di Indonesia periode 5-11 Mei 2014, di Pasar Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/5/14)

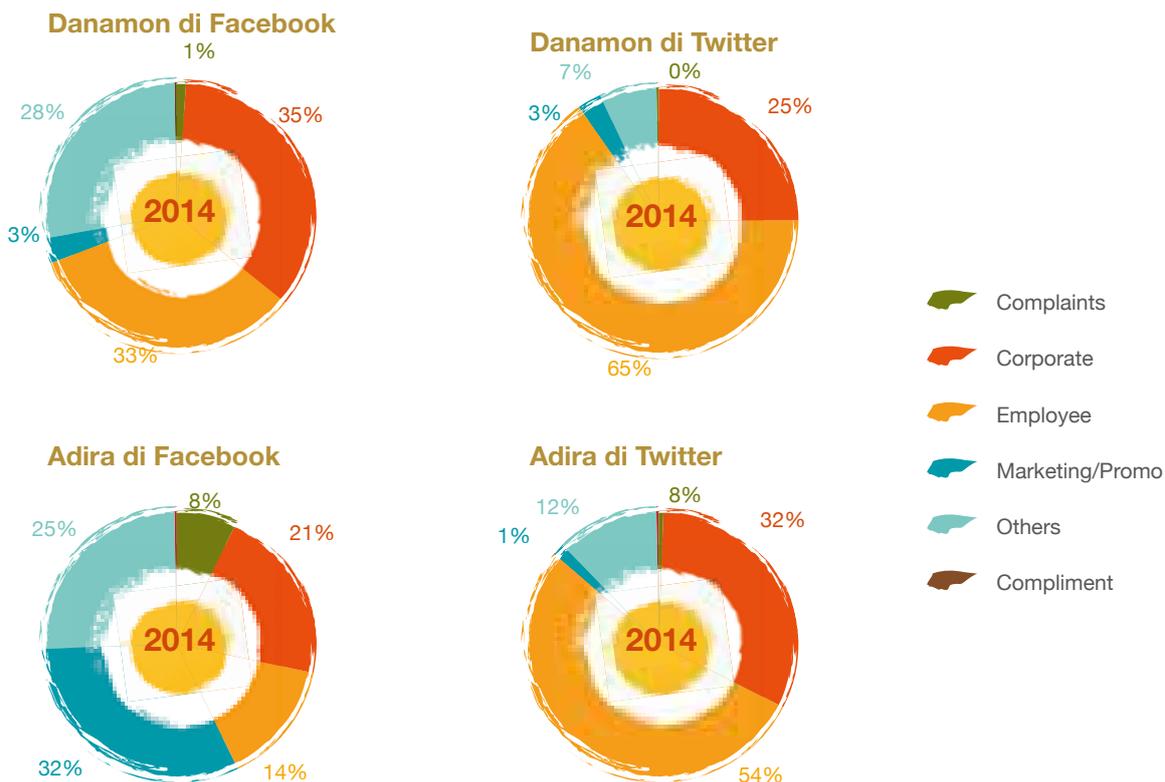
Tata Kelola Perusahaan

Danamon secara konsisten memantau pemberitaan di media massa cetak dan media elektronik dengan hasil sebagai berikut:

Media Coverage-2014



Percakapan Danamon dan Adira di Media Sosial (Facebook dan Twitter) Tahun 2014:

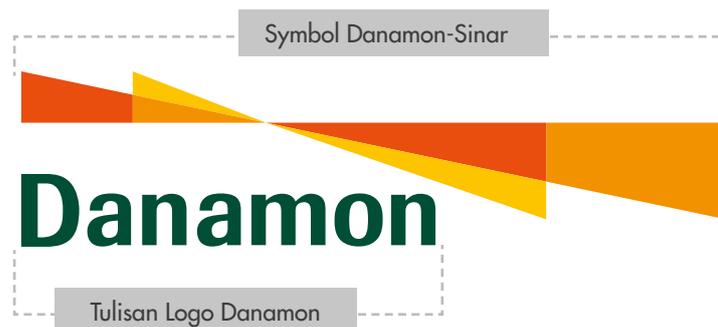


Brand Management

Brand Danamon merupakan representasi dari Visi: Kita Peduli dan Membantu Jutaan Orang untuk Mencapai Kesejahteraan dan Misi Danamon untuk menjadi Lembaga Keuangan Terkemuka di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan, yang dikomunikasikan melalui kegiatan periklanan televisi, media cetak, radio, media luar ruang dan *online social media*.

Di tahun 2014, Danamon kembali melakukan survei dan bekerja sama dengan lembaga survei internasional, Nielsen untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap *Brand* Danamon di industri perbankan di Indonesia. Hasil survei menunjukkan tingkat *brand awareness* yang positif dan Danamon dapat mempertahankan peringkat 5 bank teratas secara *awareness* di Indonesia untuk tahun 2014.

”Menjadi cahaya pemandu bagi jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan” menjadi harapan Danamon yang direpresentasikan melalui sinar yang terlukis pada logo Danamon. Konsep sinar ini sudah menjadi bagian dari logo Danamon sejak tahun 2002.



Janji "Untuk Anda, Bisa" yang telah diusung sejak tahun 2008, merupakan inti dari layanan, produk dan program Danamon. Janji ini menempatkan Danamon pada posisi unik dan berbeda dibandingkan dengan pesaingnya di pasar.



Para Peraih Danamon Social Entrepreneur Awards 2014 bersama Jajaran Direksi Danamon.

Tata Kelola Perusahaan

Sejak pertama kali diadakan pada tahun 2006, *Danamon Social Entrepreneur Awards* diselenggarakan sebagai apresiasi tertinggi kepada para wirausahawan sosial yang mewujudkan visi yang sama.

Danamon Social Entrepreneur Awards adalah penghargaan yang dipersembahkan bagi individu-individu biasa namun menghasilkan usaha yang luar biasa dan berkesinambungan untuk memberdayakan hidup dirinya maupun lingkungannya melalui solusi kewirausahaan selama minimal 1 tahun.

Danamon menganugerahkan penghargaan kepada 5 orang Pejuang Kesejahteraan Indonesia sebagai berikut:

No.	Nama		Kota	Usia	Jenis Kelamin	Bentuk kegiatan
1	Adinda Soraya Mutialarang	Pengembang Produk Desa	Bandung	25 Tahun	Perempuan	Pemberdayaan kaum petani dengan pengolahan cemilan tradisional menjadi modern
2	Alia Noor Anoviar	Penggerak Mimpi	Jakarta	23 Tahun	Perempuan	Pemberdaya kaum marjinal dengan keterampilan dan pendidikan.
3	Haris Purnawan	Pemuda Goa Pindul	Yogyakarta	24 Tahun	Laki-laki	Pemanfaatan potensi obyek wisata Gua Pindul berbasis pemberdayaan masyarakat.
4	Sanusi	Petani Urban	Tangerang	69 Tahun	Laki-laki	Pemanfaatan lahan tidur di bantaran kali menjadi tanah produktif dengan pemberdayaan masyarakat sekitar
5	Andreas Sukendro	Katalisator Kemandirian	Medan	47 Tahun	Laki-laki	Sekolah Alam Khusus untuk Anak & Remaja Berkebutuhan Khusus



Tampilan Website Danamon Social Entrepreneur Awards 2014.

Tata Kelola Perusahaan

Edukasi Perbankan

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat yang juga sejalan dengan visi Danamon yaitu “Peduli dan Membantu Jutaan Orang untuk Mencapai Kesejahteraan”, maka sebagai bentuk komitmen serta dukungan terhadap kegiatan ini, Danamon melaksanakan kegiatan Edukasi Perbankan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.

Kegiatan edukasi ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pemberian informasi mengenai:

- Manfaat yang didapat dari produk perbankan
- Hak-hak dan kewajiban mereka jika membeli/menggunakan produk yang dimiliki oleh perbankan
- Paham atas risiko yang dapat terjadi bila membeli/menggunakan produk perbankan
- Fitur dasar produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dimiliki oleh Danamon.

Brand Management berperan dalam melakukan kegiatan edukasi sesuai strategi dan arahan dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan melakukan koordinasi di internal Danamon.

Serangkaian kegiatan Edukasi Perbankan yang telah dilakukan pada tahun 2014 di antaranya:

1. Edukasi Perbankan Bersama Danamon & Si-Molek, yang telah berlangsung pada 5-12 Mei 2014.

Dalam kegiatan ini Danamon memilih tiga topik untuk di angkat dalam materi edukasi, yaitu:

- o Perencanaan Keuangan Keluarga
- o Produk-produk Dasar Perbankan Syariah
- o Menyiapkan Keuangan Personal untuk menghadapi Dunia Kerja

Kegiatan edukasi dilakukan pada 23 lokasi dari 14 kota di seluruh wilayah Indonesia dengan pemilihan:

- o Kantor cabang dan outlet Danamon,
- o Khusus Perbankan Mikro, kegiatan dilakukan di pasar-pasar tradisional,
- o Pusat-pusat perbelanjaan
- o Kampus

Pasar Juanda Bekasi



Pasar Rau Serang



Tata Kelola Perusahaan



2. Pameran Industri Jasa Keuangan Indonesia, yang diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12-13 November 2014, dengan kegiatan di antaranya:

- Seminar/lokakarya yang diadakan oleh OJK dan didukung lembaga jasa keuangan termasuk Danamon yang dilakukan di Hotel Aston, guna memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, pengenalan OJK dan Industri Jasa Keuangan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Ibu Rumah Tangga (IRT), Akademisi dan masyarakat umum.
- Pameran Industri Jasa Keuangan Indonesia yang diselenggarakan di Flobamora Mall, Kupang, untuk memperkenalkan produk dan layanan berbagai jenis industri keuangan kepada masyarakat Kupang dan Nusa Tenggara Timur, dimana penetrasi perbankan masih rendah, termasuk industri keuangan non bank dan pasar modal sehingga dapat membantu mereka dalam pengelolaan keuangan.



3. Pasar Keuangan Rakyat diselenggarakan pada tanggal 20-21 Desember 2014 di Hall A & Hall D, Jakarta International Expo.

Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh:

- Hasil survei literasi keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi dan utilitas masyarakat dalam berbagai industri keuangan masih relatif rendah.
- Kelompok masyarakat menengah bawah relatif masih belum banyak mendapatkan akses produk dan jasa keuangan.
- Produk & jasa keuangan semakin beragam baik jumlah maupun jenisnya sehingga diperlukan pengenalan dan edukasi produk keuangan kepada masyarakat.
- Masyarakat perlu dikenalkan dan diberikan edukasi mengenai produk jasa keuangan yang bersifat *low cost*.

Program ini bertujuan untuk:

- Mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan
- Memberikan informasi mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan

Tata Kelola Perusahaan



Event Management

Danamon menyelenggarakan kegiatan yang merupakan bentuk komunikasi kepada pihak eksternal seperti media, nasabah, *stakeholders*, termasuk internal yaitu karyawan. Di tahun 2014, unit *Event Management* telah menyelenggarakan 50 *corporate event*, yang sebagian besar dihadiri oleh perwakilan manajemen dalam hal ini Komisaris dan/atau Direksi.



Danamon Chinese New Year Customer Gathering 2014

Internal Communication

Unit *Internal Communication* berada di bawah Divisi *Public Affairs*, berfungsi mengelola saluran komunikasi bagi karyawan Danamon dan anak perusahaan.

Berikut adalah saluran-saluran komunikasi internal yang dikelola unit *Internal Communication*:

Bisa! Award

Bisa! Award adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan Danamon dan anak perusahaan, yang telah berprestasi dalam mendukung nilai-nilai budaya Danamon dan mewujudkan visi Bank. Bisa! Award 2014 digelar tanggal 17 Juli 2014 dengan partisipasi lebih dari 130 karyawan Danamon, Adira Finance, Adira Insurance dan Adira Kredit. Pemenang Bisa! Award 2014 diumumkan tanggal 30 Oktober 2014, dengan tiga pemenang untuk Kategori Umum dan tiga pemenang Kategori Service Excellence.



Para Pemenang Bisa! Award 2014 bersama Jajaran Direksi Danamon dan Para Juri

Portal Danamon

Untuk memfasilitasi karyawan Danamon dengan informasi terkini serta penting, seperti pelaksanaan proses kerja, data-data perusahaan, arsip kebijakan dan publikasi memo, Danamon telah menyediakan fasilitas intranet yang dapat diakses oleh karyawan setiap saat.

Tata Kelola Perusahaan



Tampilan Portal Danamon

Spirit-Majalah Internal

Danamon juga memiliki sebuah media komunikasi internal dalam bentuk majalah bernama “Spirit” yang disirkulasikan ke seluruh karyawan secara berkala. Majalah ini berisi antara lain pesan dari Direksi dan manajemen, liputan acara peluncuran produk dan layanan dan artikel-artikel inspiratif.



Tahun 2014, Spirit terbit sebanyak 9 kali dalam bentuk digital dan cetak dengan tema-tema yang berkaitan dengan *Corporate Culture* dan *Brand Personality* Danamon:

Edisi	Tema
1.	<i>Excellence is Not an act but a habit</i>
2.	<i>We Do What We Say-Walk The Talk</i>
3.	<i>All For One, One For All</i>
4.	<i>Honesty is The Best Policy</i>
5.	<i>Caring</i>
6.	<i>Energetic</i>
7.	<i>Proactive</i>
8.	<i>Enabling</i>
9.	<i>Capable</i>

E-Mail Blast

Media komunikasi ini menyampaikan informasi massal melalui email yang dapat diatur pengirimannya baik kepada seluruh karyawan maupun kelompok karyawan tertentu. Jenis informasi yang dapat ditayangkan melalui *e-mail blast* antara lain pesan dari direksi, informasi korporasi atau kebijakan SDM/divisi dan informasi produk. Sebanyak 355 *e-mail blast* telah disirkulasi selama tahun 2014.



Tata Kelola Perusahaan

Live Chat with Our Director

“Live Chat with Our Director” merupakan ajang komunikasi langsung dengan salah satu anggota Direksi Danamon melalui fasilitas *chatting* pada portal Danamon. Pada tahun 2014, program ini diadakan sebanyak 12 kali sebagai berikut:

Tanggal	Direktur
10 Januari 2014	Henry Ho Hon Cheong
21 Februari 2014	Vera Eve Lim
27 Maret 2014	Muliadi Rahardja
25 April 2014	Minhari Handikusuma
15 Mei 2014	Michellina Laksmi Triwardhany
24 Juni 2014	Herry Hykmanto
18 Juli 2014	Fransiska Oei Lan Siem
22 Agustus 2014	Satinder Pal Singh Ahluwalia
17 September 2014	Kanchan Keshav Nijasure
23 Oktober 2014	Muliadi Rahardja
25 November 2014	Vera Eve Lim
18 Desember 2014	Pradip Chhadva



Henry Ho Hon Cheong, Direktur Utama dalam *Live Chat with Our Director*

Skip Level Meeting

Aktivitas ini merupakan forum pertemuan informal antara Direktur Utama Danamon dengan beberapa karyawan senior pada satu atau dua level di bawah Direksi. Pada tahun 2014, *Skip Level Meeting* diadakan sebanyak dua kali dan diikuti oleh 24 karyawan.



Public Affairs' Planning and Control

Unit *Planning and Control* bertujuan memastikan terselenggaranya dengan baik atas seluruh proses operasional dan aktivitas yang dikelola Divisi *Public Affairs* sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan, agar *residual risks* yang ada tidak menimbulkan dampak yang merugikan kelangsungan bisnis Danamon. Unit ini juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan fungsi Sumber Daya Manusia, meliputi pengembangan dan pelatihan karyawan.

UNIT LAYANAN NASABAH

Danamon Access Center atau DAC merupakan unit layanan yang dapat diakses 24 jam melalui nomor telpon 500-900. Layanan ini tersedia untuk setiap nasabah atau pengguna jasa Danamon baik yang telah memiliki rekening ataupun pengguna jasa Danamon yang tidak memiliki rekening namun melakukan transaksi keuangan melalui Danamon. Tim DAC selalu siap memberikan bantuan layanan yang dibutuhkan, mulai dari permintaan informasi hingga penyelesaian keluhan.

DAC senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan *standard service* yang ada. Usaha ini terlihat di tahun 2014 dimana hasil yang dikeluarkan lembaga CCSEI (Contact Center Service Excellence Index) bahwa DAC mendapatkan 5 penghargaan. Priority Banking berhasil masuk peringkat ke-4, sedangkan Regular Credit Card, Regular Banking, Platinum CC serta Email masuk peringkat TOP 10.

Salah satu fokus perhatian DAC untuk terus ditingkatkan adalah area penyelesaian keluhan. Dalam hal ini *Customer Care* DAC hadir untuk menjawab tuntutan tersebut sebagai unit sentralisasi layanan pengaduan nasabah. Mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah ini mengacu pada Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Untuk terus melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas penyelesaian keluhan, DAC senantiasa meningkatkan pengawasan terhadap penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut. DAC juga memastikan tercapainya target SLA penyelesaian pengaduan.

DAC dalam hal ini tidak bekerja sendirian namun juga bekerjasama dengan unit-unit kerja terkait serta *Service Quality Team*. Kerjasama ini tidak hanya sebatas melakukan *review* atas masalah-masalah yang ada, namun juga memberi umpan balik guna meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah. Secara berkala disampaikan laporan atas masalah dan penyelesaian pengaduan nasabah kepada manajemen Danamon.

Kategori Keluhan Nasabah

Penyelesaian keluhan merupakan salah satu area yang menjadi perhatian Danamon, karena percaya apabila suatu masalah ditangani dengan benar dan baik, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.

Keluhan nasabah dibagi dalam dua kategori:

1. Penanganan pengaduan yang dapat langsung diselesaikan (*Quick Kill*) akan ditangani oleh *frontliner* pada saat yang bersamaan.
2. Penanganan yang memerlukan tindak lanjut lebih jauh (*Non Quick Kill*) akan ditangani oleh tim *Customer Care*.

Customer Care DAC

Customer Care DAC adalah unit sentralisasi layanan pengaduan nasabah. Keluhan dapat dilayangkan baik yang masuk melalui berbagai saluran seperti *Call Center*, *Correspondence*, Cabang maupun divisi Perbankan lainnya. Sebagai tolak ukur penyelesaian, nasabah akan diinformasikan rentang waktu yang dibutuhkan sesuai dengan jenis permasalahannya.

Secara berkala DAC dan tim *Service Quality* akan melakukan kajian atas masalah-masalah yang ada untuk dijadikan umpan balik bagi unit-unit terkait sebagai dasar pembenahan atas proses atau layanan di areanya. Selain itu masalah-masalah yang diterima berikut penyelesaiannya akan dilaporkan secara berkala kepada manajemen Danamon.

Tata Kelola Perusahaan

Penanganan Pengaduan Nasabah tahun 2014

Penyebab Pengaduan	Di Luar Sistem Pembayaran	Terkait Sistem Pembayaran	Total
Pemahaman karakteristik produk oleh nasabah	2.249	7.547	9.796
Informasi produk kurang memadai	440	466	906
Gangguan/kerusakan perangkat dan sistem teknologi informasi	171	3.444	3.615
Gangguan/kerusakan ATM/ <i>payment point</i>	331	7.919	8.250
Perubahan/pemutusan akad/perjanjian/kontrak	248	83	331
Kelalaian nasabah	2.537	1.157	3.694
Kelalaian bank	147	1.039	1.186
Tindak pidana perbankan	617	16	633
Lainnya	0	0	0

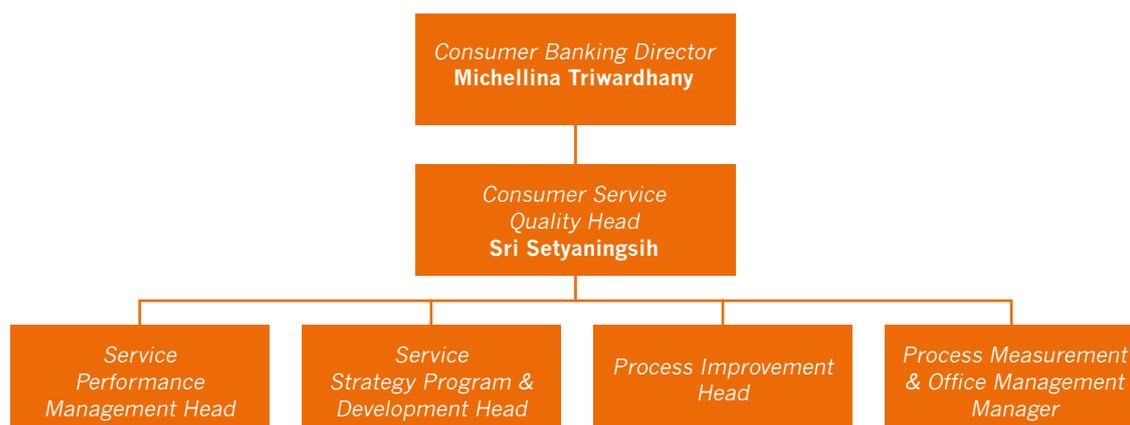
Jenis Produk	KATEGORI							Total
	Bunga/Bagi Hasil/Margin Keuntungan	Denda/ Penalti	Biaya Administrasi/ Provisi/ Transaksi	Kegagalan/ Keterlambatan Transaksi	Jumlah Tagihan/ Saldo Rekening	Lain-lain		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
1. Penghimpunan Dana								
1.1 Giro		3	2	18	5			28
1.2 Tabungan	4	21	24	290	144	904		1.387
1.3 Deposito	1			1	11			13
1.4 Antar Bank								
1.5 Lainnya	0	0	254	69	145	3037		3.505
2. Penyaluran Dana								
2.1 Kredit/Pembiayaan								
2.1.1 Investasi	5	1			2			8
2.1.2 Modal Kerja				1	3			4
2.1.3 Konsumsi	52	82	55	218	220	739		1.366
2.2 Antar Bank								
2.3 Lainnya								
3. Sistem Pembayaran								
3.1 ATM/Kartu Debit	7	7	1.264	1.855	12.294			15.427
3.2 Kartu Kredit	4	12	19	91	2.981	2.074		5.181
3.3 Kartu Pra-Bayar				1				1
3.4 <i>Direct Debit</i>	1	2	3	23	4			33
3.5 <i>Standing Instruction</i>				2				2
3.6 <i>Travellers Cheque</i>				1				1
3.7 Kliring				83		245		328
3.8 RTGS		1	1	32	2	20		56
3.9 <i>Electronic Banking</i>			17	11	27	543		598
3.10 <i>Remittance</i>	10			4				14
3.11 Lainnya						30		30

Jenis Produk	KATEGORI						Total
	Bunga/Bagi Hasil/Margin Keuntungan	Denda/ Penalti	Biaya Administrasi/ Provisi/ Transaksi	Kegagalan/ Keterlambatan Transaksi	Jumlah Tagihan/ Saldo Rekening	Lain-lain	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
4. Produk Kerjasama							
4.1 Bancassurance	26		129	58	134	73	420
4.2 Reksadana			1				
4.3 Lainnya							
5. Produk Lainnya							
5.1 Bank Garansi				2			2
5.2 Trade Finance							
5.3 Derivatif				1			1
5.4 Wealth Management				2			2
5.5 Safe Deposit							
5.6 Lainnya	3		1				4
			Total				28.411

CONSUMER SERVICE QUALITY

Consumer Service Quality (CSQ) merupakan salah satu unit di bawah Direktorat Consumer Banking yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan cabang konvensional dalam memberikan Service Excellence kepada nasabah.

Struktur Organisasi Consumer Service Quality



Service Culture dan Kualitas Pelayanan

Dalam membangun *Service Culture* dan meningkatkan kualitas pelayanan, *Consumer Service Quality* membuat inisiatif *service* yang bermanfaat bagi cabang dalam mewujudkan kepuasan, loyalitas dan *engagement* nasabah terhadap Danamon.

Tata Kelola Perusahaan

Selama tahun 2014, Danamon telah menerima banyak apresiasi di bidang *service*, antara lain:

No	Nama Penyelenggara	Nama Kegiatan Penghargaan	Kategori Penghargaan	Peringkat
1	Marketing Research Indonesia & Infobank	<i>Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2013/2014</i>	<i>Best Overall Performance Commercial Bank</i> <i>Best Teller Commercial Bank</i> <i>Best ATM Islamic Business Unit</i> <i>Best Phone Handling Islamic Business Unit</i>	5 1 1 3
2	MarkPlus Insight & Marketeers	<i>MarkPlus WOW Service Excellence Award 2014</i>	<i>The Best of Banda Aceh</i> <i>The Best of Pontianak</i> <i>The Best of Makassar</i> <i>The Champion of Medan</i> <i>The Champion of Semarang</i> <i>The Champion of Balikpapan</i> <i>The Champion of Jayapura</i> <i>The Champion of Bandung</i> <i>The Champion of Surabaya</i>	1 1 1 2 3 3 3 3 2
3	Institute of Service Management Studies (ISMS) & Infobank	<i>Service Quality Overall 2013</i>	Bandung Jakarta	1 3
4	Roy Morgan	<i>Roy Morgan Customer Satisfaction Award 2013</i>	<i>Bank institution</i>	3
5	Carre-Center for Customer Satisfaction and Loyalty (Carre-CCSL)	<i>Excellence Service Experience Award 2014</i>	<i>Good Grade for Regular Banking Category</i>	-

Beberapa inisiatif yang dilakukan untuk menunjang terlaksananya “*Service Culture*” dan “*Service Excellence*” yang konsisten, antara lain: *Service Program*, *Service Competition*, *Service Measurement*, dan *Service Training & Development*.

Consumer Service Quality telah memberikan pelatihan *Service* kepada ±2.719 karyawan *Retail Banking*, *Operation*, *Human Resources-Employee Service Center (ESC)*, *Small Medium Enterprise (SME)* di seluruh Indonesia. Selain itu, *Consumer Service Quality* juga memberi perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas layanan dengan melakukan perbaikan proses yang berdampak bagi nasabah. Perbaikan proses ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan layanan nasabah dan memberikan kenyamanan dalam bertransaksi dengan proses yang *simple, fast and flexible*.

Perbaikan proses (*Process Improvement*) yang telah dilakukan antara lain *Paperless Account Opening*, *Time Deposit Quick Redemption by Transfer to Saving*, *Process Improvement Western Union*, *Centralized Customer Complaint/D ‘Connect* dan *Sales & Service Officer (SSO) Documentation Project*.

Perbaikan proses tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan Danamon sebagai Bank dengan pelayanan *Customer Service* dan *Teller* tercepat. Selain itu, telah dilakukan kegiatan *Service Clinic* terhadap 250 cabang Danamon, yang bertujuan memperbaiki proses dan standar pelayanan kepada nasabah.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan kendali tingkah laku karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Danamon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan. Danamon senantiasa melakukan sosialisasi dan internalisasi Budaya Perusahaan agar tetap hidup dan dijalankan dalam kegiatan sehari-hari yang tercermin dalam kegiatan kerja, berinteraksi dan mengambil keputusan.

Pokok-Pokok Budaya Perusahaan

Danamon memiliki budaya perusahaan melalui penerapan nilai-nilai budaya Danamon yang terdiri dari Peduli, Jujur, Mengupayakan yang Terbaik, Kerja Sama dan Profesionalisme yang Disiplin.

Peduli

Kita memiliki perhatian yang tulus terhadap kebaikan dan kemajuan sesama. Ini mendorong kita untuk selalu menjadi yang terbaik.

Jujur

Kita senantiasa memegang kebenaran kepada diri sendiri dan orang lain tanpa ada yang disembunyikan.

Mengupayakan yang Terbaik

Kita berani mencari cara yang lebih baik dalam bekerja untuk meraih hasil yang terbaik dengan mempertimbangkan risiko yang ada dan tanpa mengorbankan ketangguhan perusahaan kita.

Kerjasama

Kita menjadikan kemajemukan di antara kita sebagai kekuatan sebuah tim untuk meraih tujuan bersama.

Professional yang Disiplin

Kita menjalankan tanggung jawab dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi, melalui Insan yang Disiplin, Pemikiran yang Disiplin, dan Tindakan yang Disiplin.

KODE ETIK

Danamon menyusun Kode Etik berdasarkan Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan, Etika Perbankan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode Etik menjadi pedoman dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan Bank ataupun Perjanjian Kerja Bersama. Kode Etik ini mencakup kebijakan kepatutan/kepentingan berdasarkan nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan moral yang menyangkut integritas, hati nurani, kesadaran diri, profesionalisme dan citra positif serta nama baik Danamon.

Cakupan Penerapan Kode Etik

Para pihak yang mencakup Direksi, Komisaris, dan karyawan tanpa pengecualian, wajib memahami, mentaati, dan melaksanakan Kode Etik Danamon. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap Kode Etik akan diberikan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode Etik disusun mengacu pada nilai-nilai budaya perusahaan. Kode Etik Danamon pada pokoknya mengatur mengenai:

Kode Etik-Pertentangan Kepentingan

Para Pihak harus menghindari situasi pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bank.

Hubungan dengan Danamon, yang mengatur tentang:

1. Status Pekerja

Pada dasarnya Bank tidak menghendaki Pekerja dan Direksi terikat perjanjian kerja dengan pemberi kerja lain selama jam kerja, dan atau memperoleh penghasilan lain di luar Bank.

2. Perlindungan dan Penggunaan Hak Milik Bank

Pada prinsipnya penggunaan atas hak milik Bank adalah untuk pelaksanaan pekerjaan dan harus mengikuti prosedur yang berlaku serta demi kepentingan

Tata Kelola Perusahaan

Bank. Penggunaan untuk tujuan selain untuk kepentingan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Pimpinan Unit Kerja.

3. Hubungan Keluarga

Dalam hal penerimaan Para Pihak baru, dihindari calon Para Pihak yang mempunyai hubungan keluarga langsung dengan Para Pihak lainnya (bapak, ibu, istri, suami, kakak, adik, atau anak). Apabila dengan pertimbangan tertentu Para Pihak tersebut harus dipertahankan maka tidak diperkenankan berada dalam satu unit kerja yang berhubungan langsung atau saling mempengaruhi.

Hubungan dengan Pihak Lain, yang mengatur tentang:

1. Hubungan dengan Pihak-Pihak Lain

Menjaga kerahasiaan nasabah, relasi, dan atau rekanan sesuai ketentuan yang berlaku. Menghindari pengambilan keputusan atas nama Bank yang mengandung unsur pertentangan kepentingan dan semata-mata dilakukan atas dasar persahabatan, ikatan kekeluargaan, dan atau hal-hal lain yang pada dasarnya menguntungkan pribadi atau orang lain. Tidak mempergunakan nama Bank untuk kepentingan pribadi, antara lain untuk kegiatan politik dan atau usaha-usaha pribadi lainnya. Tidak memberikan sesuatu kepada pihak lain yang dapat menimbulkan prasangka negatif dan dapat mencemarkan nama Perusahaan.

2. Tata Cara Pelayanan Nasabah

Pekerja harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencari alternatif solusi atas masalah nasabah dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Hubungan Dengan Mitra (Pihak Ketiga/ Suplier/Vendor)

Para Pihak harus menghindarkan diri dari keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, keluarga, perkawanan, atau atas dasar alasan tidak profesional lainnya.

4. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/ Bingkisan

Pada prinsipnya Bank tidak menyetujui pemberian atau penerimaan, segala bentuk hadiah/bingkisan kepada/dari pihak-pihak lain sebagai bentuk balas jasa, ungkapan simpati yang berkaitan dengan bisnis antar pribadi.

5. *Entertainment*

Pada prinsipnya *entertainment* hanya dapat dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Pekerja tertentu untuk kepentingan Bank dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Bank.

6. Perlindungan dan Penggunaan Hak Milik

Para Pihak tidak diperkenankan memakai atau menerima fasilitas milik nasabah, relasi, dan atau rekanan dan tidak diperkenankan mendapat atau meminta pinjaman dari mereka untuk kepentingan pribadi.

7. Penyuapan

Bank melarang adanya penyuapan dalam berbagai bentuk.

8. Aktivitas di Luar Bank

Pekerja dan Direksi tidak diperbolehkan menduduki jabatan-jabatan kepengurusan aktif dalam partai politik maupun organisasi kemasyarakatan yang bermuatan politik yang berpotensi menyita jam kerja maupun konsentrasi, kecuali dengan persetujuan Bank.

Hubungan Antar Pegawai, yang mengatur tentang:

1. Etika Kerja Sama
Hubungan antar Para Pihak tidak dipengaruhi oleh ancaman, tindak kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan yang didasari perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, ataupun ketidakmampuan pribadi baik melalui komentar, gurauan dan atau tindakan, begitu pula hubungan antar Para Pihak tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan individu Para Pihak dan Bank atau dari kelompok dari Bank.
2. Pernikahan antar Pegawai
Bilamana terjadi pernikahan antar Para Pihak, maka tidak diperkenankan berada dalam satu unit kerja yang berhubungan langsung atau dapat saling mempengaruhi.

Kode Etik-Hal Penanganan Informasi Hubungan Para Pihak dengan Perusahaan

1. Pengamanan Informasi
Semua informasi milik Bank berstatus *proprietary right* (hak kepemilikan Bank yang tidak bisa dimiliki pihak lain tanpa izin). Para Pihak bertanggungjawab mengamankan dan menjaga kerahasiaan informasi yang ditanganinya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian informasi kepada publik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Informasi Milik Pihak-pihak Lain
Para Pihak wajib melindungi segala bentuk informasi milik pihak-pihak lain yang diketahuinya. Untuk itu Para Pihak tidak berhak menyebarkan informasi sebelum diketahui/disepakati secara formal oleh kedua belah pihak yang terlibat, atau yang berdasarkan komitmen dengan pihak-pihak lain atau peraturan perundangan yang berlaku, harus dirahasiakan.

Kode Etik-Hal Kepatuhan dan Etika

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan Terkait

Para Pihak wajib mempelajari, memahami dan mentaati setiap ketentuan, kebijakan atau peraturan yang berlaku dan atau semua petunjuk/perintah sehubungan dengan jabatan/posisinya dalam hierarki organisasi. Jika menyangkut hubungan dengan pihak-pihak lain, maka dibatasi oleh ketentuan, kebijakan atau peraturan yang berlaku pada masing-masing pihak. Bagi Para Pihak yang melakukan penyimpangan kelalaian atau pelanggaran terhadap Ketentuan, Kebijakan atau Peraturan yang berlaku, akan dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Hal-hal yang Menyangkut Etika

Para pihak harus mencerminkan nilai profesional dan menjaga etika dalam berpenampilan dan cara berpakaian. Para Pihak dilarang bertindak atau mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, mengarah pada kekurangan fisik, SARA atau yang dapat digolongkan memaki, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain secara emosional dan tidak profesional, demi menjaga lingkungan kerja yang harmonis. Para Pihak dengan alasan apapun dilarang merokok di seluruh lingkungan kerja, baik pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja baik dilakukan sendiri maupun bersama, kecuali di ruangan khusus merokok, demi menjaga lingkungan kerja yang sehat, bersih dan menghindari bahaya kebakaran.

Penyebarluasan, Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sebagai bagian dari upaya penerapan, setiap pegawai telah menandatangani Surat Pernyataan Kode Etik yang diserahkan kepada Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pusat/Wilayah. Pimpinan Unit Kerja mensosialisasikan Kode Etik kepada pegawai

Tata Kelola Perusahaan

lain di bawah koordinasinya dan pegawai diwajibkan melaporkan kepada atasan langsungnya, atau Pimpinan Unit Kerja dan/atau bagian SDM setempat, apabila terjadi pelanggaran, maupun percobaan pelanggaran, terhadap Kode Etik. Selain itu, kode etik menjadi bagian dari proses penilaian kinerja yang dilakukan per semester.

Konsekuensi atas pelanggaran serius terhadap kode etik dapat diberikan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblower System adalah saluran komunikasi yang diberikan oleh Bank yang memungkinkan karyawan, nasabah, *vendor* atau pihak lainnya untuk melaporkan kejadian *fraud* atau pelanggaran lainnya tanpa takut. Sistem *whistleblower* merupakan salah satu bentuk komitmen Danamon dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan praktek bisnis yang berintegritas.

Dalam memberikan rasa aman bagi pelapor, Danamon tidak mewajibkan pelapor untuk menyertakan identitas. Namun jika pelapor menyebutkan identitasnya, maka Danamon akan melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Semua informasi yang masuk ke jalur *whistleblower* atau *fraud hotline* akan direview dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait seperti: Divisi SDM, *Fraud Investigation Unit* SKAI atau Unit investigasi *fraud* yang ada di *Line of Business* atau anak perusahaan. Berdasarkan Kebijakan *Whistleblower*, setiap laporan yang diterima beserta hasil investigasi akan diregistrasi setiap bulan untuk kemudian dilaporkan ke manajemen dan Komite Audit

secara berkala. Laporan *whistleblower* juga dilaporkan ke OJK setiap semester sesuai dengan SEBI No. 13/28/DPNP mengenai pelaporan implementasi strategi anti *fraud*.

Kebijakan Whistleblower

Danamon mendukung program *whistleblower* dengan menerbitkan SK. Direksi No. Kep: DIR-COMP-025 perihal Kebijakan *Whistleblower* dan SK.Dir No. Kep: DIR-CORP.SEC-007 perihal Kebijakan *Fraud* dan Komite *Fraud*. Kebijakan ini telah disosialisasikan ke seluruh karyawan melalui berbagai media seperti: email blast, Portal perusahaan, dan *website* perusahaan (www.danamon.co.id).

Danamon juga memberikan perlindungan bagi karyawan yang melaporkan *fraud* atau tindakan pelanggaran lainnya dengan menerbitkan SK. Direksi No. Kep: DIR-SDM-060 perihal Perlindungan Karyawan. Hal ini agar memberikan dukungan dan rasa aman bagi karyawan yang melaporkan perbuatan *fraud* tersebut.

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Dalam rangka memberikan kemudahan dan rasa aman, Danamon menyediakan sarana pelaporan yang diatur dalam Kebijakan *Whistleblower*.

Laporan pelanggaran terkait *fraud*, pelanggaran kode etik, pelanggaran kesusilaan, ancaman dan lain-lain dapat disampaikan oleh pelapor (karyawan atau pihak ketiga) melalui jalur komunikasi faks atau email yang ditujukan kepada:

- Satuan Kerja Audit Intern,
- Divisi Sumber Daya Manusia, dan
- Satuan Kerja Kepatuhan

No Fax: +62 21 25505950

Email: whistleblower@danamon.co.id

Khusus untuk pelanggaran *fraud* dapat juga ditujukan ke unit *Fraud Investigation* di bawah SKAI melalui Email: fraud@danamon.co.id.

Setiap laporan perlu dilengkapi dengan:

1. Nama yang diindikasikan terlibat pelanggaran atau potensi pelanggaran
2. Kronologi kejadian
3. Waktu dan tempat kejadian.

Pelanggaran oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaporan atas pelanggaran atau potensi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi, disamping melalui jalur komunikasi di atas pelapor juga dapat menyampaikan laporannya secara tertulis dan melalui surat tertutup ditujukan kepada Ketua Komite Audit (Komisaris Independen).

Perlindungan Bagi Pelapor

Danamon berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelapor, guna menumbuhkan rasa aman dan mendorong pelapor untuk berani melaporkan pelanggaran. Perlindungan ini diberikan dalam bentuk:

- a. Perlindungan Kerahasiaan identitas pelapor termasuk informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
- b. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.
- c. Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai karyawan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik.
- d. Perlindungan tidak hanya untuk pelapor tetapi dapat juga diperluas sampai kepada anggota keluarga pelapor.

Selain itu, Danamon juga menyediakan perlindungan hukum sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Komitmen ini meliputi perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata, serta perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.

Penanganan Pengaduan, Pihak Yang Mengelola Pengaduan, dan Pemberian Sanksi

Laporan yang diterima oleh Satuan Kerja Audit Intern, SDM dan/atau Satuan Kerja Kepatuhan akan dievaluasi untuk menentukan apakah akan diproses lebih lanjut ke tahap investigasi atau diteruskan kepada pihak yang tepat.

Proses investigasi dilakukan dengan memegang asas praduga tak bersalah dan objektif. Untuk menjaga objektivitas pemeriksaan, investigasi atas potensi pelanggaran dilakukan oleh Tim Investigasi Internal yang independen. Laporan Hasil Investigasi disertai bukti pendukung dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit secara berkala.

Laporan Hasil Investigasi menjadi dasar keputusan pengambilan tindakan dan/atau pemberian sanksi. Selanjutnya, para pihak atau pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai peraturan internal Danamon. Untuk menjaga objektivitas, pemberian sanksi dilakukan oleh Komite *Fraud* di tingkat Kantor Pusat dan Regional.

Tata Kelola Perusahaan

Hasil Penanganan Pengaduan 2014

Sepanjang tahun 2014, Danamon telah menerima 128 laporan melalui sistem pelaporan pelanggaran dan telah diinvestigasi. Sampai dengan akhir tahun 2014 investigasi telah diselesaikan terhadap 71 laporan, 22 diantaranya merupakan kasus *fraud* dan 49 kasus non *fraud*. Sedangkan 57 laporan masih dalam proses investigasi.

Unit Bisnis/ Anak Perusahaan	Jumlah Pengaduan yang masuk	Status Pengaduan			
		<i>Total Closed</i>	Telah Selesai		Dalam Proses Investigasi
	Terbukti <i>Fraud</i>		Tidak Terbukti <i>Fraud</i>		
Danamon	108	54	7	47	54
Danamon-Unit Usaha Syariah	-	-	-	-	-
Anak Perusahaan	20	17	15	2	3
Jumlah	128	71	22	49	57

Danamon menilai bahwa pelaksanaan kebijakan *Whistleblower* telah berjalan efektif sebagai salah satu cara pengungkapan kecurangan yang terjadi.

PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Danamon secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang dilakukan sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Penilaian dilakukan terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG

Nama Bank : PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Posisi : Per Desember 2014

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Danamon

Peringkat		Definisi Peringkat
Individual	2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen Bank secara individual maupun secara konsolidasi (Bank dan Anak Perusahaan) telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank dan Anak Perusahaan.
Konsolidasi	2 (Baik)	

Analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah berjalan dengan Baik dan telah diterapkan secara menyeluruh dan terstruktur terhadap tiga aspek tata kelola yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Penilaian penerapan GCG dilakukan terhadap faktor-faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; tugas dan tanggung jawab Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite dan satuan kerja; penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan; penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan dan laporan internal; serta rencana strategis.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan, Danamon telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai sehingga proses pelaksanaan prinsip-prinsip GCG telah *berjalan secara efektif dan menghasilkan outcome* yang berkualitas. Hal ini tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut:

- Jumlah, komposisi, kriteria, independensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon.
- Tersedianya Kebijakan-Kebijakan Tata Kelola, Pedoman dan Tata Tertib serta pengaturan tugas, tanggung jawab serta fungsi masing-masing organ Danamon yang mendukung efektivitas pelaksanaannya.
- Pelaksanaan fungsi satuan kerja kepatuhan, audit internal dan audit eksternal yang memadai yang tercermin dari kepatuhan Danamon yang baik terhadap peraturan dan komitmen serta pelaksanaan audit internal dengan cakupan yang sesuai dengan tingkat risiko Danamon.

Tata Kelola Perusahaan

- Penerapan manajemen risiko dan kecukupan pengendalian internal yang didukung dengan kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen yang memadai dalam mendukung kegiatan operasional Danamon.
- Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ-organ Danamon telah berjalan memadai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- Pelaksanaan rencana strategis dan bisnis secara konsisten
- Pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan, Informasi produk, laporan tahunan serta laporan pelaksanaan GCG Danamon secara transparan dan mudah diakses oleh *Stakeholders*.

GCG Konsolidasi

Dalam upaya memperkuat pelaksanaan penerapan GCG secara konsolidasi, Danamon secara berkesinambungan melakukan konsolidasi dan *alignment* atas prinsip-prinsip GCG Danamon untuk diterapkan di Anak Perusahaan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas dari masing-masing anak perusahaan. Masing-masing anak perusahaan telah dilengkapi dengan pedoman dan kebijakan GCG yang menjadi acuan dan komitmen bersama bagi seluruh organ Danamon.

Dalam penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan GCG konsolidasi, penilaian dilakukan terhadap penerapan GCG Danamon secara individual dan penerapan GCG di masing-masing anak perusahaan. Penilaian

penerapan GCG Anak Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada faktor-faktor penilaian GCG sesuai standar perbankan. Hasil penilaian secara umum Baik yang tercermin dari beberapa indikator, sebagai berikut:

- Masing-masing Anak Perusahaan telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai sesuai dengan karakteristik dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing anak perusahaan.
- Semua proses dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja dan ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan dan prosedur internal yang didukung dengan tersedianya struktur tata kelola yang lengkap dan berfungsi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- Kualitas *outcome* atas penerapan prinsip GCG memadai dan memenuhi prinsip-prinsip GCG serta memenuhi harapan *stakeholders*.

Berdasarkan penilaian atas pelaksanaan GCG Danamon dan Anak Perusahaan, maka hasil penilaian GCG konsolidasi untuk semester I-2014 secara umum Baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Danamon dan Anak Perusahaan. Namun demikian, Danamon akan senantiasa melakukan pengkajian secara berkesinambungan untuk mencapai proses yang optimal, pengendalian yang efektif, tingkat kepatuhan dan tercapainya kinerja yang memenuhi harapan *stakeholders*.

PENGHARGAAN TERKAIT PELAKSANAAN TATA KELOLA

Danamon menerima penghargaan selama tahun 2014 yaitu:

- *Best Overall Award-ASEAN Corporate Governance Scorecard*” dari Indonesian Institute of Corporate Directorship (IICD) di tahun 2014.
- Peringkat 1 “*Annual Report Award 2013*” Kategori *Private Keuangan Listed*



Best Corporate Governance Award
The Indonesian Institute for Corporate Governance
Best Corporate Governance Overall
(8 December 2014)



Annual Report Award (ARA)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia (BEI), Ditjen Pajak, Kementerian BUMN, Komnas Kebijakan Governance dan Ikatan Akuntan Indonesia.
Juara 1 Annual Report Award (ARA) 2013 Kategori Private Keuangan Listed.

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Danamon telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan tidak ada pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ng Kee Choe
Komisaris Utama

Henry Ho Hon Cheong
Direktur Utama

Tata Kelola Perusahaan Unit Usaha Syariah

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan persyaratan mutlak bagi keberhasilan perusahaan saat ini. Untuk itu, hal tersebut selalu diupayakan di UUS Danamon. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dari regulator, namun agar dapat mendukung Perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhannya dan berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam jangka panjang.

Penerapan GCG hanya dapat dilakukan dengan adanya sinergi dan komitmen dari seluruh organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, pejabat pimpinan dan seluruh karyawan Perusahaan.

Manfaat penerapan GCG bagi Danamon dapat dilihat melalui pencapaian kinerja Danamon baik secara kuantitatif maupun kualitatif mencakup keuangan dan non keuangan, serta apresiasi dari pihak eksternal.

Inisiatif UUS Danamon

Pada tahun 2014, UUS Danamon tetap berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip GCG pada pelaksanaan strategi bisnisnya, yaitu fokus pada pertumbuhan portofolio usaha kecil dan menengah khususnya:

- Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan (Kopkar), serta pembiayaan kepada BPR Syariah;
- Penghimpunan dana pihak ketiga segmen ritel;

- Pemberian layanan *cash management*; dengan mengoptimalkan jaringan kantor yang telah ada dan melengkapi produk serta layanan syariah pada kantor tersebut. Selain melakukan hal-hal tersebut, UUS Danamon pun bekerjasama dengan bank induk untuk meningkatkan pemasaran bersama melalui jaringan kantor bank induk dan meningkatkan pertumbuhan pendanaan melalui jaringan Layanan Syariah (*office channeling/OC*).

Sehubungan dengan hal tersebut maka UUS Danamon pada tahun 2014 telah melakukan *Branch Transformation* yaitu pemindahan alamat, penutupan kantor dan melakukan pengkajian ulang guna mengoptimalkan jaringan kantor yang ada dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi cabang-cabang yang memiliki layanan Gadai Emas Syariah;
2. Melakukan penambahan jumlah Layanan Syariah (*Office Channelling*);
3. Melakukan pemindahan, pembukaan dan penutupan ATM yang ada pada di jaringan kantor;

Dengan demikian, pada akhir 2014 UUS Danamon memiliki 25 Kantor Cabang Syariah (KCS), 27 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan 145 Layanan Syariah/*Office Channeling* (LS/OC)

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, UUS Danamon pun pada tahun 2014 melakukan penyempurnaan dokumen-dokumen yang akan digunakan oleh nasabah dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan usaha yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh GCG sehingga diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Penyempurnaan dokumen tersebut antara lain dilakukan pada brosur, aplikasi pembukaan rekening/produk, perjanjian-perjanjian dan dokumen lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) perihal Perlindungan Konsumen.

Penerapan GCG yang efektif, akan bermanfaat bagi kelanjutan perusahaan melalui kinerja keuangan yang baik, pertumbuhan bisnis dan komitmen dalam menerapkan praktik-praktik perbankan yang sehat. Bank juga memastikan kondisi keuangan dan non keuangan dipublikasikan dengan lengkap dan tepat waktu kepada *stakeholders*.

Dalam rangka pengembangan bisnisnya, selama tahun 2014 UUS Danamon melakukan beberapa kegiatan antara lain:

a. Peluncuran beberapa produk UUS

Danamon:

- Pembiayaan Ijarah Muntahiyya bittamlik (IMBT), yaitu Pembiayaan dengan prinsip sewa beli antara pemilik obyek IMBT dan penyewa (Nasabah/Lessee) untuk mendapatkan imbalan (Ujrah) atas obyek IMBT yang disewakan dengan diakhiri perpindahan hak milik obyek IMBT melalui jual beli.
- Tabungan BISA Qurban iB, yaitu produk tabungan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam pembelian hewan qurban dengan cara penyetoran dana secara bulanan.

b. Kegiatan dalam rangka iB Vaganza UUS Danamon di tahun 2014

Pada tahun 2014 ini UUS Danamon juga menyelenggarakan kegiatan yang mendukung program Literasi Keuangan yang telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program tersebut dituangkan dalam kegiatan iB Vaganza dengan berbagai macam tema kegiatan, antara lain *talkshow*, *media gathering* dan pameran. Berbagai tema diselenggarakan dalam kegiatan iB Vaganza tersebut antara lain pengelolaan keuangan dan investasi, *updating* informasi tentang perkembangan keuangan Syariah, termasuk pula edukasi produk dan layanan jasa perbankan dengan berbagai segmen masyarakat antara lain pengusaha, karyawan dan ibu rumah tangga.

1. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1.1. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2014 tidak ada perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah UUS Danamon. Dengan demikian susunan Dewan Pengawas Syariah UUS Danamon adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin (Ketua)
2. Drs H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS (Anggota)
3. Dr. Hasanudin, M.Ag (Anggota)

1.2. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah UUS Danamon telah memenuhi ketentuan PBI no.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah jo PBI no. 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI no. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pada tahun 2014, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah UUS Danamon masih sama dengan tahun 2013, sesuai tabel berikut:

Tata Kelola Perusahaan Unit Usaha Syariah

Nama	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin (Ketua)	DPS	Bank Bukopin
Drs H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS (Anggota)	DPS DPS DPS	a)Unit Syariah Asuransi Bintang b)Unit Syariah Asuransi Manulife c) BPRS Harta Insan Karimah
Dr. Hasanudin, M.Ag (Anggota)	DPS DPS DPS	a)BNi Syariah b)Asuransi Tugu Pratama c) Asuransi Re-Indo d)Toyota Astra Finance Services

1.3. Program Kerja DPS 2014

1. Rapat DPS minimal 12 (duabelas) kali dalam setahun untuk pembahasan masalah syariah *compliance*, pengajuan produk baru maupun permintaan opini atas beberapa kondisi yang terjadi di lapangan;
2. Melakukan *review* secara berkala termasuk pengawasan atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS dengan cara uji petik (*sampling*) atas beberapa nasabah baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan;
3. Menjalin komunikasi dengan Divisi Syariah Assurance & Operations-UUS Danamon dalam pelaksanaan segala kegiatan DPS UUS Danamon (antara lain permintaan Opini DPS), memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat UUS Danamon yang berwenang mengenai hal-hal yang dianggap perlu;
4. Membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS setiap 6 bulanan untuk diserahkan kepada Bank Indonesia, dengan salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan
5. Menambah informasi/ pengetahuan dengan terus-menerus mengoptimalkan potensi Dewan Pengawas Syariah melalui berbagai pelatihan dan workshop guna perkembangan dan kemajuan UUS Danamon;
6. Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon pada khususnya dan kepada manajemen Danamon pada umumnya dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

1.4. Realisasi Kerja DPS 2014:

1. Rapat DPS telah dilakukan selama 13 (tiga belas) kali di tahun 2014, dengan agenda yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Hari & Tanggal	Tempat	Agenda	Peserta
1.	Kamis, 23 Januari 2014,	MBD	1. <i>Update</i> kinerja UUS Danamon & komposisi <i>Financing by Akad & Product</i> . 2. Kode Etik	1. Prof. Dr. Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin. M. Ag 3. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
2.	Selasa, 25 Februari 2014	MBD	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Danamon & Komposisi <i>Financing by Akad & Product</i> . 2. <i>Update</i> atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Danamon (Diskusi)	1. Prof. Dr. Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin. M. Ag. 3. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS

No	Hari & Tanggal	Tempat	Agenda	Peserta
3.	Rabu, 2 April 2014	Gedung DSN MUI	Diskusi mengenai Fitur IMBT	Dr. Hasanudin. M.Ag.
4.	Selasa, 15 April 2014	MBD	1. <i>Update</i> kinerja UUS Danamon & Komposisi <i>Financing</i> berdasarkan Akad & Produk 2. Rekomendasi Fitur IMBT	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
5.	Kamis, 22 Mei 2014	Plaza Kuningan	Pengelolaan Dana Zakat/ZIS melalui Unit ZIS UUS BDI.	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
6.	Kamis, 19 Juni 2014	Plaza Kuningan	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Danamon & Komposisi <i>Financing</i> by Akad & Product 2. <i>Update Branch Transformation</i>	1. Prof. Dr. HM Din Syamsuddin 2. Hasanudin. M.Ag. 3. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
7.	Selasa, 19 Agustus 2014	Plaza Kuningan	1. ITFC (International Trade Finance Corporation) 2. <i>Update Branch Transformation</i>	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
8.	Kamis, 4 September 2014	Gedung MUI	1. Diskusi Istilah pada brosur produk funding. 2. Pembiayaan KPR dengan Akad MMQ 3. Restrukturisasi Pembiayaan PT. Citra Sari Makmur (CSM) 4. Notaris Rekanan UUS Danamon	Dr. Hasanudin. M.Ag.
9.	Kamis, 25 September 2014,	Plaza Kuningan	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Danamon & Komposisi <i>Financing</i> berdasarkan Akad & Produk 2. <i>Syariah Forward Agreement</i> 3. <i>Branch Transformation</i>	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
10.	Jumat, 31 Oktober 2014	Plaza Kuningan	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Danamon 2. Pembiayaan IMBT, ITFC, <i>Cross Selling</i>	1. Dr. Hasanudin, M.Ag 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS 3. Dr. Hasanudin. M.Ag.
11	Senin, 24 November 2014	Wisma Nusantara Lantai 29	<i>Update Branch Transformation</i>	Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
12	Kamis, 27 November 2014	MBD Pkl 09.00-10.00 WIB	<i>Update Branch Transformation</i>	1. Dr. Hasanudin. M.Ag. 2. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS
13	Kamis, 27 November 2014	MBD Pkl 11.00-13.00	1. <i>Update</i> Kinerja UUS Danamon 2. <i>Update</i> Permasalahan yang ada di UUS Danamon	1. Prof. Dr. HM Din Syamsuddin 2. Hasanudin. M.Ag. 3. Drs. Karnaen A Perwataatmadja MPA., FIIS

Tata Kelola Perusahaan Unit Usaha Syariah

Berdasarkan tabel di atas, maka selama tahun 2014, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

Nama	Total Kehadiran
1. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin	5
2. Drs H. Karnoen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS	10
3. Dr. Hasanudin, M.Ag	12

Dengan demikian jumlah penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2014 telah memenuhi peraturan Bank Indonesia. Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah UUS Danamon dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil keputusan rapat tersebut telah dicatat dalam Risalah Rapat, didokumentasikan secara lengkap serta disampaikan kepada Direktur dan/atau manajemen UUS Danamon untuk diimplementasikan.

- Melakukan *review* dan mengevaluasi pemenuhan prinsip syariah secara berkala serta melakukan uji petik (*sampling*) atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, melakukan *review* dan mengevaluasi aspek syariah atas akad-akad penghimpunan dan penyaluran dana, kebijakan dan prosedur operasional untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dan

pelaksanaannya di lapangan. Selama tahun 2014, DPS telah melakukan uji petik (*sampling*) yang dilakukan dengan memilih *sample* sebanyak nasabah pendanaan dan nasabah pembiayaan, yang terdiri dari:

- 10 nasabah pendanaan,
 - 45 nasabah Koperasi Karyawan dan
 - 45 Nasabah Komersial
 - 10 Nasabah BPRS serta
 - 30 nasabah Solusi Emas Syariah
- Dari sebanyak 140 nasabah tersebut, DPS telah memilih sebanyak 32 (tiga puluh dua) nasabah dengan kriteria pembiayaan dengan kisaran angka/ nilai pembiayaan terbesar, sedang dan terkecil. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- 4 nasabah pendanaan,
 - 9 nasabah Koperasi Karyawan dan
 - 5 Nasabah Komersial
 - 4 Nasabah BPRS serta
 - 10 nasabah Solusi Emas Syariah;

- Selama tahun 2014, DPS telah melakukan koordinasi dengan Divisi Syariah *Assurance & Operations* guna menunjang fungsinya sebagai DPS, antara lain dengan menerbitkan 11 (sebelas) Opini DPS, yang rinciannya sebagai berikut:

No	Permasalahan/Topik
1	Permohonan Opini DPS atas Denda dan Ganti Rugi (Ta'widh) atas Produk Pembiayaan IMBT iB
2	Permohonan Opini DPS atas Penamaan Unit Kerja
3	Permohonan Opini DPS atas Produk Tabungan Bisa Qurban iB
4	Opini DPS atas Kode Etik Tambahan Khusus untuk Pegawai Unit Usaha Syariah (UUS) Danamon
5	Opini DPS atas Produk Pembiayaan IMBT Setelah Surat Notifikasi OJK
6	Opini DPS Pembayaran Bagi Hasil atas Deposito Investasi Dana Harian
7	Opini DPS atas Teknis Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Koperasi Karyawan (Kopkar)
8	Permohonan Opini DPS atas Produk "Tabungan Bisa UMRAH iB" dengan Tambahan Fitur Gratis Asuransi Syariah
9	Opini DPS atas Nasabah Pembiayaan Murabahah
10	Fatwa DPS UUS PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. tentang Porsi Bagian Amil pada Unit ZIS UUS Danamon dan Mitra Lembaga Amil Zakat
11	Kerjasama Pembiayaan Trade Finance Syariah antara UUS Danamon dan ITFC (International Islamic Trade Finance Corporation)

- Melaporkan hasil pengawasan DPS setiap 6 bulan sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Internal dan Divisi Kepatuhan Danamon.
- DPS UUS Danamon pada tahun 2014 telah mengikuti pelatihan/*workshop* guna mengembangkan/mengoptimalkan potensinya sebagai DPS, sesuai tabel berikut ini:

TRAINING/WORKSHOP

Ijtima Sanawi (*Annual Meeting* Dewan Pengawas Syariah seluruh Indonesia), tanggal 16-18 Desember 2014, Hotel Mercure-Ancol, Jakarta

- Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon dilakukan pada saat rapat rutin DPS setiap bulan ataupun pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon. Dengan adanya saran-saran yang diberikan oleh DPS maka kegiatan UUS Danamon dapat memenuhi kinerja sebagaimana yang ditetapkan dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku khususnya mengenai prinsip-prinsip syariah.

1.5. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan salinan kepada Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal, Direksi & Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. serta DSN-MUI melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk 2 (dua) periode, yaitu periode Januari 2014-Juni 2014 dan periode Juli 2014-Desember 2014. Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdiri atas:

- Laporan keuangan serta pengembangan jaringan cabang, produk & sumber daya manusia pada periode pengawasan tersebut
- Kertas kerja pengawasan pengembangan produk
- Kertas kerja pengawasan kegiatan Bank
- Opini DPS yang diterbitkan pada periode pengawasan tersebut.

Tata Kelola Perusahaan Unit Usaha Syariah

Selain melakukan pengawasan, DPS juga memberikan rekomendasi, saran dan nasihat, baik kepada Danamon maupun manajemen Unit Usaha Syariah dalam bentuk Opini-Opini Dewan Pengawas Syariah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan manajemen secara berkala.

1.6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Seperti halnya di tahun 2013, maka pada tahun 2014 ini tidak ada pembaharuan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah yang dibuat tanggal 11 November 2011. Namun UUS Danamon selalu akan menyelaraskan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah tersebut dengan ketentuan yang berlaku apabila ada peraturan baru yang terbit baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun dari instansi terkait lainnya.

1.7. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah UUS Danamon diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Komite Nominasi Danamon serta ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Danamon. Jumlah remunerasi dan fasilitas lainnya selama periode tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (gross)	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi	3	722,975,148
2. Fasilitas Lainnya	3	Program Asuransi Kesehatan (berserta keluarga)

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas 2 miliar Rupiah	-
Diantara 1 miliar s/d 2 miliar Rupiah	-
Diatas 500 juta rupiah s.d. 1 miliar Rupiah	-
Di bawah Rp 500 juta	3

2. DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH

- Direktur UUS Danamon melakukan koordinasi dengan seluruh jenjang organisasi di UUS Danamon guna menjalankan rekomendasi atau masukan dari DPS yang berasal dari hasil rapat rutin dan Laporan Hasil Pengawasan DPS;
- Direktur UUS Danamon melakukan koordinasi dengan seluruh jenjang direktorat di Bank Induk guna pengembangan dan peningkatan bisnis UUS Danamon;
- Direktur UUS Danamon menjaga tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah Danamon;
- Direktur UUS Danamon melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (unit syariah) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. DAFTAR KONSULTAN DAN PENASEHAT HUKUM

Di tahun 2014, UUS Danamon hanya menggunakan 1 (satu) jasa konsultan hukum, untuk konsultasi rencana kerjasama antara UUS Danamon dan Islamic Trade Finance Company (ITFC) yaitu:

Nama Konsultan	Uraian pekerjaan
Karimsyah Law Firm Alamanda Tower, Level 27 Jalan TB Simatupang Kav. 23-24 Jakarta 12430, Republik Indonesia Tel: (+62-21) 2966-0001; Fax: (+62-21) 2966-0007 E-mail: info@karimsyah.com; Website: www.karimsyah.com	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan dokumentasi berupa akad pembiayaan dan kerjasama pembiayaan dengan ITFC

4. PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada tahun 2014 tidak terdapat kasus *Internal Fraud* di UUS Danamon. Berikut adalah tabelnya:

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Direksi		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Total <i>internal fraud</i>	Nihil	Nihil	3	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	2	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	1	Nihil	Nihil	Nihil

5. PERMASALAHAN HUKUM

Pada tahun 2014 tidak terdapat permasalahan hukum di UUS Danamon, berikut adalah tabelnya:

Permasalahan Hukum	Jumlah Total	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

6. AKTIVITAS UUS DANAMON

6.1. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial

Menunjuk pada UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab II tentang Azas, Tujuan dan Fungsi, Bank juga menjalankan fungsi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Baitul Maal, yaitu menerima dana dalam bentuk Zakat, Sedekah, Infak dan Hibah atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Pada tahun 2014, UUS Danamon lebih banyak menyalurkan Dana Sosial dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013 Dana Sosial yang dikeluarkan sebanyak 22 *event* dengan total penyaluran Rp620.472.950.

Sedangkan jumlah penyaluran pada tahun 2014 sebanyak 61 *event* dengan total penyaluran dana Rp1.192.015.000. Berikut adalah tabel Penyaluran Dana Qardhul Hasan UUS Danamon selama tahun 2014:

Tata Kelola Perusahaan Unit Usaha Syariah

No	Tanggal	Nominal	Tujuan
1	2 Januari 2014	30.000.000	Perbaikan Masjid Nur Falah, DesaTanjung Sari, Jampang Tengah-Jawa Barat
2	2 Januari 2014	51.000.000	Yayasan Danamon Peduli
3	3 Januari 2014	1.000.000	Jami Al Hidayah Mosque
4	27 Januari 2014	25.000.000	Rumah Zakat-Program Siaga Banjir 2014
5	4 Februari 2014	15.000.000	DTA Miftahul Hikmah-Pembangunan Ruang Kelas Baru TA 2013
6	3 Februari 2014	18.000.000	<i>Donation for Gunung Sinabung by Area Sumatera I</i>
7	6 Februari 2014	50.000.000	Al Azhar Peduli Umat-Tanggap bencana banjir Jakarta
8	28 Februari 2014	50.000.000	Al Azhar Peduli Umat-Gunung Kelud
9	7 Maret 2014	11.800.000	Pemda Soreang-Bedah Rumah Warga Miskin
10	14 Maret 2014	10.000.000	Pembangunan Pondok Pesantren Nurul Huda untuk yatim dan dhuafa
11	2 April 2014	1.000.000	KJKS BMT Umat Sejahtera-pengobatan gratis & pembagian sembako
12	14 April 2014	30.000.000	Pengobatan sdr.Ahmad Fauzi-kemoterapi
13	15 April 2014	30.000.000	Santunan Duka-Djaja Tanjung Mas-biaya RS
14	23 April 2014	5.000.000	IB Working Group iB Syariah untuk yayasan Miftahurrabbani-Batam
15	16 Mei 2014	10.000.000	Baksos Sunatan Massal 50 anak-Desa Cidahu
16	9 Mei 2014	9.500.000	Sunatan Massal yatim piatu yang diselenggarakan oleh ex.SMP VIII '83
17	20 Mei 2014	5.000.000	Pendirian Rumah Hadits Madrasah Al Fajr/RUHAMA oleh APU
18	21 Mei 2014	23.175.000	Kebutuhan sekolah anak yatim piatu TA.2014-2015 oleh A.Chairul Syah-OB Ciracas
19	26 Mei 2014	5.000.000	Pembangunan Gedung Serbaguna dan Musholla di Sutenjaya oleh Unika Parahyangan
20	26 Mei 2014	22.000.000	Sunatan Massal anak kurang mampu-oleh SES Sumatera2-Lampung
21	10 Juni 2014	30.000.000	Beasiswa untuk yg tidak mampu Universitas Padjajaran Fak. Peternakan
22	13 Juni 2014	50.000.000	Pembangunan Ruang Kelas IIQ Ciputat
23	16 Juni 2014	5.000.000	Bantuan Peringatan Hari Lansia-BPRS Bhaktimakmur Indah
24	26 Juni 2014	25.000.000	Bantuan Renovasi Musholla Al Bayan-Dewi Sartika
25	30 Juni 2014	38.000.000	Rohis MBD-Pemberian santunan utk Fisabilillah,dan Yayasan Yatim Piatu Ihsan Gemilang & Yayasan Yatim Piatu Al Amanah.
26	2 Juli 2014	10.000.000	Pembangunan Pondok Pesantren Ashhaburratib Al Madani
27	3 Juli 2014	9.500.000	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan (santunan yatim dan dhuafa) oleh Yayasan Daruttaqwa SDIT Harapan Umat
28	10 Juli 2014	5.000.000	Bantuan Pendidikan siswa asuh-Yayasan Al-Kahfi
29	14 Juli 2014	20.000.000	Penambahan Dana Perbaikan Masjid Nurfalalah Desa TG.Sari Jampang Tengah-Sukabumi
30	22 Juli 2014	2.000.000	Santunan Dana Sosial ke Panti Asuhan YAPENNATIM
31	23 Juli 2014	10.000.000	Pembangunan Rumah Sakit Indonesia

No	Tanggal	Nominal	Tujuan
32	23 Juli 2014	5.000.000	Sekolah Gratis untuk anak-anak kurang mampu dan penghafal Quran Yayasan Madinatur Rahmah Hidayah
34	23 Juli 2014	5.000.000	Santunan Panti Asuhan Anak dan Panti Jompo Siti Syarifah
35	23 Juli 2014	3.000.000	Sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu dan penghafal Quran-Lembaga Tahfidz Sulaimaniyah
36	23 Juli 2014	5.000.000	Kegiatan Sosial Peduli Yatim-Yayasan Indonesia Cerdas Bermanfaat
37	24 Juli 2014	3.000.000	Kegiatan Ramadhan untuk yatim piatu dan dhuafa-Yayasan Cahaya Alam
38	12 Agustus 2014	10.000.000	Renovasi Musholla Al Hikmah, Kompleks Danamon Jatiasih-Bekasi
39	12 Agustus 2014	3.000.000	Panti asuhan yatim piatu An Ni'mah
40	18 Agustus 2014	3.000.000	Bantuan operasional untuk Yayasan Yatim Piatu Daarul Anshor Kamil
41	18 Agustus 2014	5.000.000	Yayasan Yatim dan Dhuafa Bait Al Quran, Jombang Tangerang
42	22 Agustus 2014	50.000.000	Renovasi Masjid Jami Al Hidayah, Ciracas-Jaktim
43	23 September 2014	5.000.000	Sekolah Gratis untuk Penghafal Quran-Pondok Pesantren Sulaimaniyah
44	23 September 2014	31.800.000	Penyaluran Hewan Qurban-Rumah Zakat
45	23 September 2014	34.100.000	Penyaluran Hewan Qurban-Al Azhar Peduli Umat
46	2 Oktober 2014	5.000.000	Santunan Anak Yatim dan Fakir Miskin-Yayasan Yatim Piatu Al Fajar
47	26 September 2014	50.000.000	Penggalangan Dana-Yayasan Rumah Zakat
48	8 Oktober 2014	20.000.000	Pembangunan Musholla Nurul Falah-MI Islamiyah Sidayu
49	9 Oktober 2014	3.000.000	Dana Operasional Taman Pendidikan Al-Qur'an Qalbun Salim-Yayasan Komunitas Rumah Alif
50	8 Oktober 2014	30.000.000	Gerakan Satu Juta Al Qur'an untuk Beasiswa Pendidikan-GRES
51	17 Oktober 2014	9.000.000	Beasiswa STIKES Muhammadiyah Kudus
52	28 Oktober 2014	200.000.000	Yayasan Danamon Peduli
53	23 Oktober 2014	10.000.000	TPQ Nurul Huda-Komplek Danamon Jatiasih
54	23 Oktober 2014	10.000.000	Renovasi Masjid Al-Ikrom, Bogor
55	27 Oktober 2014	5.140.000	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Peternakan Unpad
56	6 November 2014	30.000.000	Bantuan Pengobatan sdr.Baried Dayyan
57	19 November 2014	5.000.000	Khitanan massal oleh Masjid Jami' Al Ihsan, Komp.Sandang Klender Jaktim
58	1 Desember 2014	25.000.000	Pembangunan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa oleh Yayasan Babul Jannah Al-Mukarromah
59	23 Desember 2014	3.000.000	Yayasan Al Kahfi, Bekasi Selatan
60	23 Desember 2014	2.000.000	Bantuan Pengobatan ibunda sdri.Lanang
61	23 Desember 2014	10.000.000	Renovasi Musholla Riyadul Muftadiin, Bogor
Total		1.192.015.000	

Tata Kelola Perusahaan Unit Usaha Syariah

6.2. Prestasi UUS Danamon

Berikut penghargaan yang diterima oleh UUS Danamon di tahun 2014, yaitu:

- Peringkat Pertama *Best ATM* dengan skor sebesar 100 dari MRI dan Majalah Infobank dalam Survey Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2013/2014;



- Peringkat Pertama (1st) *Best ATM* for Islamic Business Unit dengan score 100.00 dari majalah Infobank;



- Peringkat ke-3 *Best Phone Handling* for Islamic Business Unit dengan score 68.85 dari majalah Infobank;



7. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Untuk periode tahun 2014, tidak ada pendapatan non halal pada UUS Danamon

8. HASIL PENILAIAN SENDIRI GCG UUS DANAMON 2014

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a)x(b)	Predikat	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	2	35 %	0.70	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur UUS Danamon lulus <i>fit & proper test BI</i>, independen, tidak memiliki benturan kepentingan & penunjukannya telah dilaporkan ke BI - Direktur UUS Danamon bertanggung jawab dalam pengelolaan UUS Danamon, menindaklanjuti rekomendasi DPS & menyediakan data untuk pengawasan DPS.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1	20%	0.20	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPS 3 orang, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi serta rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dengan masa jabatan tidak melebihi Direksi/Dewan Komisaris. Rangkap jabatan anggota DPS telah sesuai ketentuan BI - DPS telah menilai & memastikan pemenuhan prinsip syariah atas produk dan pedoman operasional UUS Danamon serta menyampaikan laporan pengawasan sesuai ketentuan BI - DPS melakukan rapat 13 kali selama 2014. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat, didokumentasikan dengan baik serta disampaikan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti manajemen UUS Danamon - Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi/fasilitas lain DPS telah dilaporkan pada Laporan Pelaksanaan GCG. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS Danamon. Sesuai Tata Tertib Kerja DPS, anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Danamon untuk kepentingan pribadi
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10%	0.20	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh UUS Danamon direview oleh Divisi Syariah Assurance & Operations, Divisi Kepatuhan Danamon dan dimintakan opini DPS untuk memastikan kesesuaian produk tersebut dengan Fatwa DSN-MUI. - UUS Danamon berupaya agar pelaksanaan produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan Bank Indonesia, antara lain dengan melakukan review berkala atas kebijakan produk & melakukan proses audit internal

Tata Kelola Perusahaan Unit Usaha Syariah

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a)×(b)	Predikat	Keterangan
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposito inti	2	10%	0.20	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - UUS Danamon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya kepada Nasabah Inti dengan senantiasa mengacu pada ketentuan BI/OJK - UUS Danamon tidak memberikan perlakuan khusus bagi Nasabah Pembiayaan Inti dan Deposito Inti sehingga perlakuan kepada nasabah inti mengikuti kebijakan umum UUS Danamon - Produk Program penyediaan dana UUS Danamon telah dikaji ulang secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun - Daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposito Inti telah disampaikan ke BI sesuai ketentuan yang berlaku
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	25%	0.25	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> - UUS Danamon telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan mengumumkannya pada surat kabar nasional sesuai ketentuan BI. - UUS Danamon telah menyampaikan sasaran, strategi dan kebijakan pengembangan UUS Danamon dalam RBB dan menyampaikan informasi perkembangan usaha syariah dalam Laporan Realisasi RBB serta Laporan Tahunan Bank - UUS Danamon telah melakukan Self Assessment GCG, membuat Laporan Pelaksanaan GCG - UUS Danamon memiliki pelaporan internal yang baik dan mampu menyajikan data/informasi dari <i>core system</i> maupun <i>supporting system</i>. Sistem pelaporan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pelatihan dan pengalaman serta IT <i>security system</i> yang memadai sesuai prosedur IT Security Danamon
Nilai Komposit			100.%	1.55	Baik	

Predikat: Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik*)

KESIMPULAN UMUM:

Berdasarkan hasil *self assessment* GCG posisi tahun 2014, UUS Danamon memperoleh Nilai Komposit 1,55 atau dengan predikat Baik. Pelaksanaan GCG di UUS Danamon pada tahun 2014 telah memenuhi prinsip-prinsip GCG secara umum, yaitu penerapan prinsip syariah yang didukung dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Beberapa hal yang menjadi kekuatan penting dalam penerapan GCG pada tahun 2014 ini antara lain adalah:

1. Sinergi yang baik antara Direksi, Dewan Pengawas Syariah, pejabat yang ditunjuk dan seluruh karyawan UUS Danamon;
2. Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada di UUS Danamon;
3. Keterbukaan pelaksanaan pelaporan kondisi keuangan serta pelaporan eksternal lainnya;
4. Fungsi kontrol yang ketat pada setiap kegiatan di UUS Danamon;
5. Penerapan prinsip kehati-hatian dan independensi dalam penyaluran dana atas setiap fasilitas pembiayaan yang diberikan UUS Danamon.

Namun demikian, UUS Danamon secara berkesinambungan akan terus melakukan penyempurnaan terkait dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, penyediaan sistem manajemen informasi yang lebih efektif, peningkatan proses dan prosedur kerja serta optimalisasi seluruh potensi yang ada pada jaringan kantor UUS Danamon.

Pelaksanaan GCG di masa yang akan datang akan terus ditingkatkan, dan hal ini merupakan komitmen dari seluruh manajemen dan karyawan UUS Danamon demi mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholders*.

Unit Usaha Syariah
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.



Herry Hykmanto
Direktur Syariah